

02. Penerapan Pengarusutamaan GEDSI

Tidak Ada Seorang pun
yang Tertinggal



Daftar Singkatan

ARG	Anggaran Responsif GEDSI.
BPfA	<i>Beijing Platform for Actions</i> (Landasan Aksi Beijing)
CAT	<i>Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment</i> . (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia)
CEDAW	<i>Convention on the Elimination of All Forms of Violence Against Women</i> . (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan)
CRC	<i>Convention on the Rights of the Child</i> (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)
CRPD	<i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> .
CSOs	<i>Civil Society Organisations</i> (Organisasi Masyarakat Sipil).
DUHAM	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
GAB	<i>Gender Action Budget</i> (Anggaran Aksi Gender)
GEDSI	<i>Gender Equality, Disability and Social Inclusion</i> (Kesetaraan Gender, Inklusi Disabilitas dan Inklusi Sosial).
GSNI	<i>Gender Social Norms Index</i> (Indeks Norma Sosial Gender)
HAM	Hak Asasi Manusia.
ICCPR	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> . (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
ICERD	<i>International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination</i> (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial)
ICESCR	<i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i> . (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
ICRMW	<i>International Convention on the Rights of Migrant Workers and Members of their Family</i> . (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya)

INKLUSI	Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif.
KPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
KTP	Kartu Tanda Penduduk.
LNOB	<i>Leave No One Behind</i> (Tidak ada seorang pun yang tertinggal)
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
OPDIS	Organisasi Penyandang Disabilitas.
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa.
PMI	Pekerja Migran Indonesia.
PPRGI	Perencanaan dan Penganggaran Responsif GESDI.
PUG	Pengarusutamaan Gender.
PUGIS	Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial.
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i> (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
SDM	Sumber Daya Manusia.
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang.
UDHR	<i>Universal Declaration on Human Rights</i> (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).
UU	Undang-Undang.
UUD	Undang-Undang Dasar.
WHO	<i>World Health Organisation</i> (Organisasi Kesehatan Dunia)

Tentang Program INKLUSI

Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) adalah program yang mendukung pembangunan manusia Indonesia seutuhnya guna terwujudnya Visi Indonesia 2045, dan agenda transformatif dari Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030: Tidak ada seorang pun yang tertinggal (*no-one is left behind*) dalam proses pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

INKLUSI bekerjasama dan mendukung Bappenas dan kementerian/lembaga pemerintah lainnya serta Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan gerakan sosial, termasuk organisasi perempuan dan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDIS) dalam melakukan perubahan sosial transformatif guna terwujudnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, inklusi disabilitas, dan inklusi sosial dengan tujuan akhir:

Memastikan ‘tidak seorang pun tertinggal. Lebih banyak masyarakat marginal berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari keputusan tentang pembangunan sosial budaya dan ekonomi, dan politik Indonesia.

Organisasi masyarakat sipil sebagai Mitra INKLUSI bekerja dengan berbagai kelompok marginal yang selama ini belum terjangkau agar mereka dapat memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dan bermakna dalam pengambilan keputusan, mendapatkan akses terhadap informasi dan layanan publik, kontrol/penguasaan terhadap sumber-sumber daya, serta memperoleh manfaat dari pembangunan secara adil, setara, inklusif dan berkelanjutan.



Daftar Isi

Tentang Program INKLUSI

Pengantar

- Mengapa Buku Ini Disusun?
 - Maksud
 - Tujuan
 - Bagaimana Menggunakan Buku Ini?
 - Sistematika Buku II
 - Istilah dan Pengertian
-

01

Pengarusutamaan GESDI dalam Pembangunan **20**

Penyelenggaraan Pengarusutamaan GESDI

Tahapan Penyelenggaraan Pengarusutamaan GESDI

02

Perancangan / Desain **24**

Tahap 1: Pengumpulan Data Inklusif

Tahap 2: Analisis GESDI

Tahap 3: Menyusun Dokumen Analisis Situasi GESDI

Tahap 4: Menyusun Teori Perubahan GESDI

Tahap 5: Menyusun Strategi dan Pendekatan GESDI

Tahap 6: Menyusun Rencana Aksi GESDI

Lembar Kerja

03

Perencanaan dan Penganggaran Responsif GESDI **66**

Apa Itu Perencanaan dan Penganggaran Responsif GESDI?

Landasan Hukum dan Kebijakan

Tujuan Perencanaan dan Penganggaran Responsif GESDI

Mekanisme Pengintegrasian GESDI dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif GESDI

Komponen Perencanaan dan Penganggaran Responsif GESDI

Apa itu Perencanaan Responsif GESDI?

Penerapan Perencanaan Responsif GESDI

04

Pelaksanaan

80

Langkah 1: Memastikan Partisipasi Inklusif Kelompok Marginal

Langkah 2: Menjalin dan Memperkuat Kemitraan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan yang Inklusif

Langkah 3: Sistem, Struktur, dan Tata Kelola Inklusif

Langkah 4: Sumber Daya Manusia dan Keuangan

Langkah 5: Komunikasi Inklusif

Langkah 6: Pengadaan Barang, Jasa dan Layanan Inklusif

05

Monitoring dan Evaluasi

90

Monitoring dan Evaluasi GESDI

Langkah-Langkah Monitoring dan Evaluasi Transformatif GESDI

Langkah 1: Memastikan Aspek GESDI Terintegrasi Secara Spesifik dalam Logika Program

Langkah 2: Memastikan Aspek GESDI Terintegrasi dalam Indikator dan Proses

Langkah 3: Membingkai Pertanyaan Monitoring dan Evaluasi Transformatif GESDI

Langkah 4: Mengelola Risiko dalam Pengumpulan Data

Langkah 5: Memfasilitasi Penggunaan Evaluasi

Alat 1: Latihan Interaktif: Memahami Identitas

100

Sebelum Mulai

Refleksi Diri

Lembar Kerja

Roda Identitas

Sungai Kehidupan (*The River Of Life*)

Lembar Kerja

Penilaian Diri

Lembar Kerja

Alat 2: Pengenalan tentang Analisis Kekuasaan 108

Apa Itu Analisis Kekuasaan?

Metode Pemetaan Kekuasaan

Metode 1: Pemetaan Pelibatan Pemangku Kepentingan

Metode 2: Mengidentifikasi Kekuasaan dan Garis Pengaruh Individu

Alat 3: Contoh Pertanyaan Pengumpulan Data Pembuka Wawasan 116

Alat 4: Mengidentifikasi dan Mengukur Norma Sosial 120

Mengidentifikasi Norma Sosial

Identifikasi Perilaku yang Ingin Dipelajari

Identifikasi Kelompok Acuan

Mengidentifikasi Perilaku, Sikap dan Keyakinan tentang Orang Lain

Mengidentifikasi Sanksi

Mengukur Perubahan Norma



Alat 5: Mengukur Norma Sosial Gender	128
Indeks Norma Sosial Gender	
Dimensi dan Indikator Indeks Norma Sosial Gender	
Penilaian	
Alat 6: Contoh <i>Template</i> Teori Perubahan	132
Alat 7: Contoh <i>Template</i> Rencana Aksi GESDI	134
Alat 8: Kriteria Menentukan Akomodasi yang Layak	136



Pengantar

Buku II: Penerapan Pengarusutamaan GEDSI merupakan bagian dari seri Buku Pegangan : *“Tidak Ada Seorang pun yang Tertinggal. Penerapan Strategi Pengarusutamaan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial”*.

Mengapa Buku Ini Disusun?

Konsep dan strategi pengarusutamaan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam pembangunan masih relatif baru diterapkan di Indonesia, termasuk oleh sebagian besar Mitra dan pemangku kepentingan INKLUSI baik di tingkat nasional dan sub-nasional. Buku ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud

Untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan buku pegangan yang dapat dipakai untuk memperkuat penyelenggaraan pengarusutamaan gender, disabilitas dan inklusi sosial, khususnya bagi Mitra dan Sekretariat INKLUSI, serta pemangku kepentingan lain yang terlibat dengan program INKLUSI sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Tujuan

Secara khusus buku ini disusun dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai berikut:

- **Referensi satu atap:** terkait konsep-konsep dasar, definisi, komitmen Pemerintah Indonesia, serta kerangka kebijakan dan hukum di tingkat nasional dan internasional dalam mewujudkan GEDSI. Buku pegangan ini juga memuat strategi dan pendekatan, serta alat analisis dan langkah-langkah pengarusutamaan GEDSI, mulai dari perancangan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- **Peningkatan kesadaran dan pemahaman:** tentang pentingnya pengarusutamaan GEDSI untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal guna mewujudkan masyarakat inklusif dan tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
- **Pengembangan kapasitas sumber daya manusia:** mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam menyelenggarakan kebijakan/program/ anggaran/kegiatan yang berperspektif GEDSI.
- **Penguatan organisasi:** meningkatkan sistem kerja, kapasitas dan tata kelola

organisasi berbasis pendekatan GESDI melalui proses belajar yang berkelanjutan, yang menghargai hak dan martabat semua orang tanpa terkecuali, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan prinsip-prinsip program INKLUSI.

- **Penguatan komitmen dan akuntabilitas:** memperkuat komitmen dan akuntabilitas Mitra INKLUSI dan para pemangku kepentingan terkait lainnya terhadap kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial, sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan fungsinya masing-masing.
- **Keberlanjutan:** mendukung pencapaian hasil-hasil pembangunan yang adil, setara, inklusif dan berkelanjutan untuk semua.

Bagaimana Menggunakan Buku Ini?

Buku pegangan ini terdiri dari tiga buku:

- Buku I: Memahami kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial dalam pembangunan
- Buku II: Penerapan pengarusutamaan GESDI dalam pembangunan
- Buku III: Informasi pendukung.

Buku I, II dan III saling terkait satu sama lain, yang dapat digunakan secara keseluruhan atau terpisah, sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna. Buku pegangan ini juga dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses secara langsung, sebagai referensi dan sumber informasi tambahan.



Sistematika Buku II

Buku II disusun berdasarkan sistematika di bawah ini, yang dapat diakses secara langsung melalui tautan yang tersedia.

Pengantar

Memuat penjelasan tentang mengapa buku pegangan ini dibuat, termasuk maksud dan tujuan, bagaimana menggunakannya, dan sistematika penulisan Buku II. Pada bagian Pengantar juga memuat istilah dan pengertian dari konsep-konsep utama yang dipakai dalam buku pegangan ini.

Mengapa Buku Ini Disusun?

Bagaimana Menggunakan Buku Ini?

Sistematika Buku II

Istilah dan Pengertian

BAGIAN I: Penerapan Pengarusutamaan GESDI dalam Pembangunan

Bab 1: Pengarusutamaan GESDI dalam Pembangunan

Bab 1 menjelaskan tentang penyelenggaraan pengarusutamaan GESDI dalam pembangunan, termasuk tahapan dalam mengintegrasikan GESDI dalam proses penyusunan kebijakan / program / kegiatan / anggaran, yang dilengkapi dengan alat dan contoh pertanyaan yang dapat digunakan.

Penyelenggaraan Pengarusutamaan GESDI

Tahapan Penyelenggaraan
Pengarusutamaan GESDI

Bab 2: Perancangan / Desain

Bab 2 memuat tentang tahapan dan langkah-langkah dalam mengintegrasikan GESDI pada tahap perancangan / desain program pembangunan, yang terdiri dari: 1) pengumpulan data inklusif, termasuk data GESDI dan data inklusif disabilitas; 2 melakukan analisis GESDI; 3) menyusun dokumen laporan analisis situasi GESDI; 4) menyusun teori perubahan GESDI; 5) menyusun strategi dan pendekatan GESDI; serta; 6) menyusun rencana aksi GESDI.

Tahap 1: Pengumpulan Data Inklusif

Tahap 2: Analisis GESDI

Tahap 3: Menyusun Dokumen Analisis
Situasi GESDI

Tahap 4: Menyusun Teori Perubahan GESDI

Tahap 5: Menyusun Strategi dan
Pendekatan GESDI

Tahap 6: Menyusun Rencana Aksi GESDI

Bab 3: Perencanaan dan Penganggaran Responsif GESDI

Bab ini memuat tentang pengertian perencanaan dan penganggaran responsif GESDI, landasan hukum dan kebijakan, serta penerapan perencanaan dan penganggaran responsif GESDI, termasuk langkah-

Apa itu Perencanaan dan Penganggaran
Responsif GESDI?

Landasan Hukum dan Kebijakan

langkah yang perlu dilakukan, yang dilengkapi dengan contoh templat dalam melakukan perencanaan dan penganggaran responsif GESDI.

Apa itu Perencanaan Responsif GESDI?

Penerapan Perencanaan Responsif GESDI

Apa Itu Penganggaran Responsif GESDI?

Penerapan Penganggaran Responsif GESDI

Bab 4: Pelaksanaan

Bab ini memuat tentang proses dan langkah-langkah mengintegrasikan GESDI dalam tahap pelaksanaan dan pengelolaan program. Langkah-langkah integrasi GESDI tersebut : 1) memastikan partisipasi inklusif kelompok marginal; 2) pelibatan pemangku kepentingan yang inklusif; 3) sistem, struktur dan tata kelola inklusif; 4) sumber daya manusia and keuangan; 5) komunikasi inklusif; 6) pengadaan barang, jasa dan layanan inklusif.

Langkah 1: Memastikan Partisipasi Inklusif Kelompok Marginal

Langkah 2: Menjalin dan Memperkuat Kemitraan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan yang Inklusif

Langkah 3: Sistem, Struktur, dan Tata Kelola Inklusif

Langkah 4: Sumber Daya Manusia dan Keuangan

Langkah 5: Komunikasi inklusif

Langkah 6: Pengadaan Barang, Jasa dan Layanan Inklusif

Bab 5: Monitoring dan Evaluasi

Bab ini memuat tentang langkah-langkah dalam mengintegrasikan GESDI dalam monitoring dan evaluasi program pembangunan, termasuk juga fitur dalam melakukan monitoring dan evaluasi yang berperspektif GESDI.

Langkah 1: Memastikan Aspek GESDI Terintegrasi Secara Spesifik dalam Logika Program

Langkah 2: Memastikan Aspek GESDI Terintegrasi dalam Indikator dan Proses

Langkah 3: Membingkai Pertanyaan Monitoring dan Evaluasi Transformatif GESDI

Langkah 4: Mengelola Risiko dalam Pengumpulan Data

Langkah 5: Memfasilitasi Penggunaan Evaluasi

BAGIAN II: Alat**Alat 1: Latihan Interaktif: Memahami Identitas****Alat 2: Pengenalan tentang Analisis Kekuasaan****Alat 3: Contoh Pertanyaan Pengumpulan Data Pembuka Wawasan****Alat 4: Mengidentifikasi dan Mengukur Norma Sosial****Alat 5: Mengukur Norma Sosial Gender****Alat 6: Contoh *Template* Teori Perubahan****Alat 7: Contoh *Template* Rencana Aksi GEDSI****Alat 8: Kriteria Menentukan Akomodasi yang Layak**

Istilah dan Pengertian

Dalam buku pegangan ini yang dimaksud dengan:

GESDI	<p>GESDI merupakan singkatan dari bahasa Inggris: <i>Gender Equality, Disability and Social Inclusion</i>, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial.</p> <p>GESDI merupakan wujud dari penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi dan martabat manusia. GESDI merujuk pada kondisi di mana hak, kebutuhan, kapabilitas, pengalaman, partisipasi dan kontribusi semua orang dalam pembangunan diakui, dihargai, dan diakomodasi secara adil, setara dan inklusif.</p>
Analisis GESDI	<p>Metode pengumpulan dan analisis data dan informasi secara sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketimpangan GESDI atas dasar ragam identitas (jenis kelamin, gender, disabilitas, umur, suku, agama, lokasi geografis dan karakteristik sosial lainnya), yang dialami perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya, termasuk perbedaan peran, norma sosial, dan relasi kuasa, kesempatan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya, manfaat, kebutuhan, tantangan dan hambatan, serta bagaimana berbagai perbedaan-perbedaan tersebut memengaruhi pengalaman orang/kelompok dalam memperoleh keistimewaan, atau sebaliknya ketidaksetaraan dan eksklusif.</p>
Gender	<p>“Nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat”. ¹ Gender dapat berbeda antar masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, dapat dipertukarkan, diubah dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman, sistem nilai dan lingkungan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang berlaku pada masyarakat tertentu pada waktu dan tempat tertentu.²</p>
Kesetaraan Gender ³	<p>“Kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia melalui proses yang adil dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi aktif, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. ⁴ Kesetaraan gender adalah hasil dari ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat dan akses terhadap pelayanan”. ⁵</p>

¹ Peraturan Presiden. Draft Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Strategi Nasional Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (September 2023).

² Disadur dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2013). Surat Edaran Bersama tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Lampiran 2 Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2020). Buku Panduan. Perencanaan & Penganggaran Responsif Gender; World Health Organization (2020). Incorporating intersectional gender analysis into research on infectious diseases of poverty: a toolkit for health researchers, Canadian Institutes of Health Research What is gender? What is sex?. CIVICUS. The Gender and Social Inclusion Toolkit

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Glossary Gender.

⁴ Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Strategi Nasional Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Tahun, Draft 22 Sept 2023

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Glossary Gender.

Disabilitas	Merupakan hasil dari interaksi antara orang yang memiliki keterbatasan (<i>impairment</i>) dengan hambatan lingkungan dan sikap yang menyebabkan orang yang memiliki keterbatasan tersebut tidak dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak dengan orang lain. ⁶
Inklusi disabilitas	Proses dan kondisi terhadap penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, di mana penyandang disabilitas dengan berbagai keragaman disabilitas dan identitas yang dimiliki (jenis kelamin, gender, umur, suku, agama, ras, kelas, lokasi geografis dan status sosial lainnya) dapat berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam keseluruhan proses pembangunan dan pengambilan keputusan, memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya dan layanan publik, serta manfaat dari pembangunan secara adil, setara, inklusif dan berkelanjutan. ⁷
Inklusi sosial	Proses dan upaya untuk meningkatkan kondisi, martabat, kesempatan, partisipasi, dan kapasitas orang/kelompok yang mengalami diskriminasi, marginalisasi, dan eksklusi berbasis identitas (seks/jenis kelamin, gender, umur, suku, agama/kepercayaan, ras, golongan, lokasi geografis, asal usul, migrasi, kewarganegaraan, dan identitas/status sosial ekonomi lainnya), dalam pembangunan secara adil, setara dan inklusif. ⁸
Inklusif	Konsep yang memberi perhatian pada semua pihak, khususnya masyarakat rentan dan marginal seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, lansia dan kelompok minoritas, yang seringkali terlupakan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dalam pembicaraan tentang TPB /SDGs konsep ini dikenal juga dengan frase <i>“no one left behind”</i> atau “tidak ada satupun yang tertinggal”. ⁹
Eksklusi sosial	Proses dan kondisi di mana individu/kelompok tertentu mengalami diskriminasi, marginalisasi, dan eksklusi berbasis identitas (seks/jenis kelamin, gender, disabilitas, suku/etnis, agama/kepercayaan, ras dan golongan, bahasa, lokasi geografis, asal usul, migrasi, dan status sosial ekonomi lainnya), sehingga tidak memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi, dan menyampaikan aspirasi

⁶ Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol

⁷ Diadaptasi dari definisi Inklusi disabilitas yang dipakai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam United Nations Disability Inclusion Strategy (June 2019), p. 20; dan ‘the Inter-Agency Standing Committee Task Team on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action’ (July 2019), Guidelines: Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action Tim Tugas Komite Tetap Antar-Lembaga tentang Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan (Juli 2019), Pedoman: Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan.

⁸ Diadaptasi dari definisi yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. United Nations. Department of Economic and Social Affairs (2016) Leaving no one behind: the imperative of inclusive development: Report on the World Social Situation; Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2019). Panduan Fasilitasi Desa Inklusif.

⁹ Disadur dari European Union, UCLG ASPAC, Kementerian PPN/Bappenas, APEKSI, APPSI dan Localise SDGs. [Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Peta Jalan Pemda untuk Bangkit dan Atasi Pandemi. Sustainable Development Goals Roadmap for Local Governments to Recover from and Overcome the Pandemic](#)

dalam keseluruhan proses pembangunan dan pengambilan keputusan, memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya dan layanan publik, serta manfaat dari pembangunan sesuai dengan hak-haknya sebagai manusia.¹⁰

Marginalisasi	Proses, kondisi dan tindakan pengabaian hak dan peminggiran berbasis identitas (jenis kelamin/seks, gender, disabilitas, umur, suku/etnis, agama/keyakinan, lokasi geografis, dan identitas sosial ekonomi lainnya) terhadap orang/kelompok tertentu sehingga tidak dapat berpartisipasi secara aktif dan bermakna untuk menyampaikan aspirasi dalam pengambilan keputusan, memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya dan layanan publik, berkontribusi dan mendapatkan manfaat pembangunan secara adil, setara, inklusif dan berkelanjutan. ¹¹
---------------	--

Pengarusutamaan GESDI	STRATEGI pembangunan untuk memastikan hak, aspirasi, pengalaman dan kebutuhan semua orang, sebagai dimensi integral, melekat dan tidak terpisahkan dalam proses pembangunan mulai dari perancangan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari suatu kebijakan/program/kegiatan/anggaran, serta dalam menilai dampaknya terhadap perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan orang/kelompok marginal, agar tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam pembangunan, dengan tujuan akhir untuk mewujudkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial, dan kesetaraan hasil bagi semua orang, menuju masyarakat dan pembangunan yang adil, setara, merata, inklusif dan berkelanjutan. ¹²
--------------------------	---

Interseksionalitas ¹³	Kerangka analisis dan pendekatan pembangunan berbasis alat analisis identitas yang digunakan dalam penyusunan kebijakan dan advokasi untuk memahami dan menganalisis kompleksitas dari ragam identitas seperti seks, gender, disabilitas, umur, lokasi geografis dan identitas sosial lainnya, yang saling berhubungan, tumpang tindih, beririsan, dan berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan yang lebih luas (sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum), yang secara bersamaan membentuk relasi kuasa yang tidak setara, sehingga menyebabkan orang/kelompok tertentu memperoleh hak istimewa (privilege), dan/atau sebaliknya mengalami diskriminasi, marginalisasi dan eksklusi dalam proses pembangunan, pada waktu, tempat, situasi, dan kondisi tertentu. ¹⁴
----------------------------------	---

¹⁰ Diadaptasi dari definisi yang dipakai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. United Nations. Department of Economic and Social Affairs (2016) *Leaving no one behind: the imperative of inclusive development: Report on the World Social Situation*; Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2019). *Panduan Fasilitasi Desa Inklusif*.

¹¹ Diadaptasi berbagai sumber seperti Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2021). *Handbook Desa Inklusif*; The World Fair Trade Organisation (WFTO). *Defining the Marginalized*; National Collaborating Center for Determinants of Health. *The Glossary of Essential Health Equity Terms*; Liberties. *What is Marginalization? Definition and Coping Strategies*.

¹² Diadaptasi dari pengertian pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan disabilitas yang dipakai oleh Pemerintah Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan CRPD.

¹³ Istilah 'interseksionalitas' adalah istilah yang diperkenalkan oleh Kimberlé Crenshaw (1989), seorang feminis berkulit hitam dan akademisi teori ras kritis (critical race) dari Amerika Serikat.

¹⁴ AWID (August, 2004). [Intersectionality: A Tool for Gender and Economic Justice](#). *Women's Rights and Economic Change*, No. 9

Kelompok marginal	Kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan tereksklusi dalam tatanan masyarakat baik secara sosial, ekonomi, budaya dan politik, dikarenakan diskriminasi atas dasar perbedaan identitas (misalnya jenis kelamin, disabilitas, gender, umur, suku, etnis, ras, agama/kepercayaan, bahasa, adat, kesehatan, lokasi geografis, dan karakteristik sosial ekonomi lainnya), serta faktor-faktor lain seperti keterpencilan, keterbatasan mobilitas, keterputusan layanan dan akses akibat kondisi darurat tertentu seperti bencana dan konflik, sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mengakses sumber daya dan layanan publik, serta mengontrol dan memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan setara. Termasuk dalam definisi ini adalah kelompok marginal dan rentan lainnya dalam masyarakat yang mengalami stigma, diskriminasi, pengucilan, peminggiran dari masyarakat lainnya dan belum tercantum dalam kategori yang disebutkan di atas. ¹⁵
Kelompok rentan	Kelompok yang memiliki risiko tinggi terhadap kemiskinan dan pengucilan sosial dibandingkan masyarakat pada umumnya, ¹⁶ yang mengalami kondisi yang tidak proporsional yang diakibatkan oleh: keterbatasan akses pada layanan dasar, kesempatan ekonomi yang disebabkan oleh kemiskinan, keterpencilan, atau keterbatasan mobilitas, keterputusan layanan dan akses akibat kondisi darurat (<i>emergency</i>) untuk menjangkau semua orang, serta tersisih karena usia, kemampuan fisik, dan identitas sosialnya. ¹⁷ Termasuk kelompok rentan antara lain adalah bayi, balita dan anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, orang lanjut usia, dan penyandang disabilitas, korban bencana alam dan korban bencana sosial. ¹⁸

¹⁵ Lihat [Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi \(2019\). Panduan Fasilitasi Desa Inklusif: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Informasi & Perpustakaan, Universitas Airlangga \(12 April 2020\). Pemberdayaan Literasi Kaum Marginal](#), European Institute for Gender Equality/EIGE (2023). Marginalized groups; CBM (2023). Inclusive Participation Toolbox. Marginalised groups.

¹⁶ [Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi \(2019\). Panduan Fasilitasi Desa Inklusif](#)

¹⁷ Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2021). Modul Bimbingan Teknis Desa Inklusi.

¹⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 29, Ayat (1), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia



01 Pengarusutamaan GEDSI dalam Pembangunan

Bab 1 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis dalam melakukan pengarusutamaan GEDSI dalam pembangunan.

Bab ini memuat penjelasan mengenai tahapan dalam mengintegrasikan GEDSI dalam ke dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari perancangan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang dilengkapi dengan alat dan contoh-contoh pertanyaan yang dapat digunakan sebagai panduan dalam penyelenggaraan pengarusutamaan GEDSI dalam pembangunan.



Penyelenggaraan Pengarusutamaan GESDI

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025 – 2045, menetapkan bahwa **Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif** merupakan Tujuan 14 untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk itu perlu mengintegrasikan **pengarusutamaan GESDI** dalam seluruh proses pembangunan.

Pengarusutamaan GESDI merupakan STRATEGI pembangunan berbasis hak asasi manusia, untuk memastikan hak asasi manusia, termasuk aspirasi dan pengalaman dari setiap orang, sebagai dimensi integral, melekat dan tidak terpisahkan dari setiap kebijakan/program/kegiatan/anggaran, mulai dari proses perancangan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta dalam menilai dampaknya terhadap perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan orang/kelompok marginal, agar tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam pembangunan, dengan tujuan akhir untuk mewujudkan kesetaraan hasil bagi semua orang, menumbuhkan budaya inklusif di semua aspek kehidupan, serta mewujudkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial menuju masyarakat dan pembangunan yang adil, setara, merata, inklusif dan berkelanjutan.¹⁹

Lihat juga Buku I: Bab 3.2 tentang Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial Dalam RPJPN 2025-2045.

Pengarusutamaan GESDI berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok di bawah ini.

Contoh pertanyaan pokok pengarusutamaan GESDI

- Apa isu GESDI yang akan diatasi? Apa faktor-faktor penyebabnya? Siapa yang paling terkena dampak dari isu GESDI tersebut? Bagaimana mengatasi isu GESDI tersebut? Apa tindakan aksi

¹⁹ Diadaptasi dari pengertian pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan disabilitas yang dipakai oleh Pemerintah Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan CRPD.

yang perlu dilakukan? Siapa pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dalam mengatasi isu GEDSI tersebut? Apa sistem dan prosedur, lingkungan pemampu, serta sumber-sumber daya yang dibutuhkan?

- Apakah aspirasi, pengalaman, pengetahuan dan keterampilan perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas dan kelompok marginal, serta pemangku kepentingan lainnya dipertimbangkan dan digunakan dalam proses pengambilan keputusan?
- Apakah kebutuhan dan prioritas yang berbeda-beda dari perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya diakomodasi?
- Bagaimana perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya dapat berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam proses pengambilan keputusan dan penetapan prioritas?
- Apakah perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya memiliki akses dan kontrol yang sama terhadap sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi dan mendapat manfaat dari pembangunan?
- Apakah perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya memperoleh manfaat yang adil dan setara dari kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang dilakukan?

Keberhasilan dalam mewujudkan GEDSI sangat dipengaruhi oleh mekanisme **penyelenggaraan pengarusutamaan GEDSI** dalam pembangunan.

Penyelenggaraan pengarusutamaan GEDSI adalah mekanisme tata kelola integrasi aspek kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial dalam keseluruhan proses pembangunan yang meliputi perancangan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan dari tingkat pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota, dan desa.²⁰

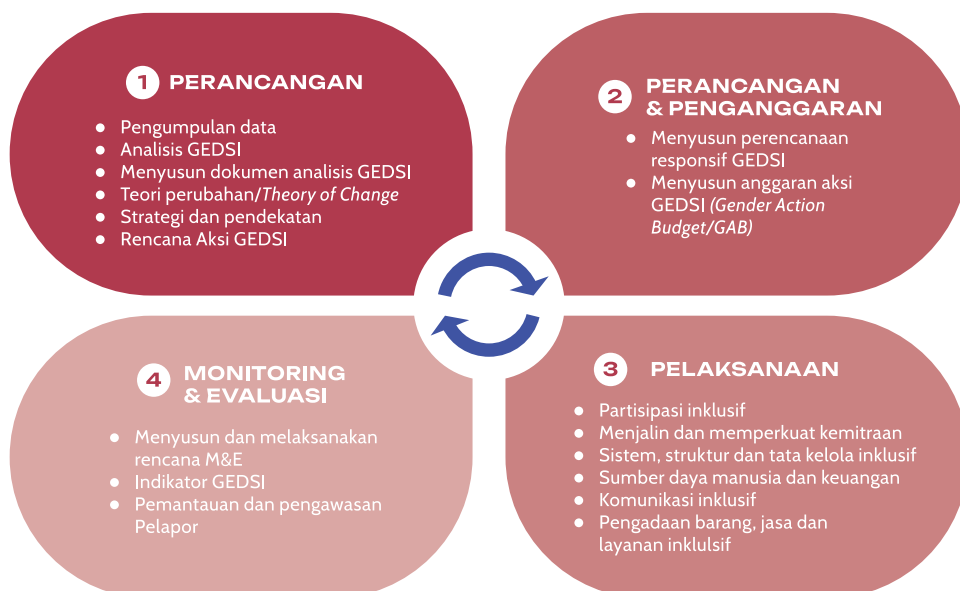
²⁰ Diadaptasi dari Draft Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender. 22 September 2023.

Tahapan Penyelenggaraan Pengarusutamaan GESDI

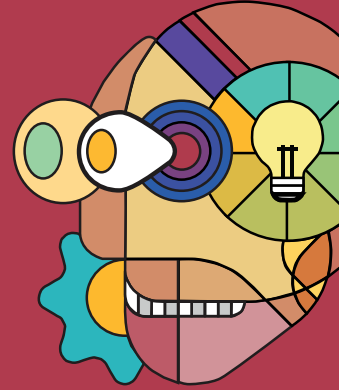
Secara umum penyelenggaraan pengarusutamaan GESDI dilakukan dengan mengintegrasikan aspek GESDI ke dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

- **Tahap perancangan/desain:** melakukan analisis GESDI untuk mengidentifikasi isu GESDI, faktor penyebab, menyusun dokumen analisis situasi GESDI, menyusun ToC, mengidentifikasi dan menyusun matriks pengelolaan risiko, dan menyusun rencana aksi GESDI (*GEDSI Action plan*)
- **Tahap perencanaan dan penganggaran:** menyusun perencanaan dan anggaran responsif GESDI termasuk melakukan analisis GESDI dan anggaran aksi GESDI
- **Tahap pelaksanaan:** mengimplementasikan kebijakan/program/kegiatan/anggaran yang sudah disusun untuk mencapai hasil dan tujuan akhir yang sudah ditetapkan
- **Tahap monitoring dan evaluasi:** menyusun dan melaksanakan rencana Monev, termasuk indikator responsif GESDI, melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap kemajuan dan hasil, termasuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan, peluang, uji petik, praktek baik, dan melakukan perubahan (adaptasi) yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik, serta pelaporan hasil.

Gambar 1: Tahapan Pengarusutamaan GESDI dalam Pembangunan

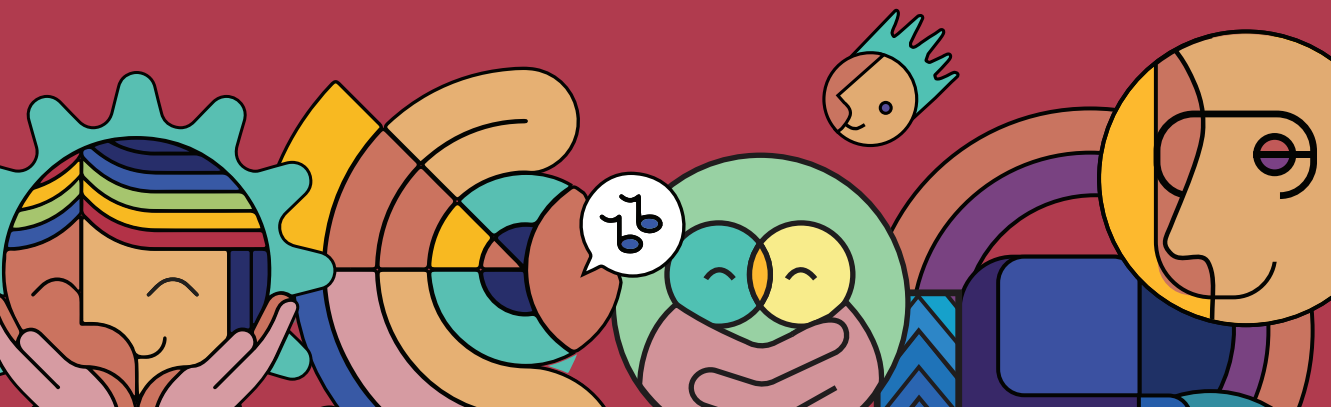


02 Perancangan / Desain



Bab 2 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis dalam mengintegrasikan GEDSI dalam proses perancangan/ desain dari suatu program pembangunan.

Tahapan dan kegiatan pengintegrasikan GEDSI dalam proses perancangan / desain program, terdiri dari 1) pengumpulan data inklusif, termasuk data GEDSI dan data khusus disabilitas; 2) melakukan analisis GEDSI; 3) menyusun laporan analisis GEDSI, 4) menyusun teori perubahan; 5) menyusun strategi dan pendekatan GEDSI; 6) menyusun rencana aksi GEDSI; beserta alat dan contoh–contoh yang dapat digunakan.



Untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu GESDI, maka perlu melakukan pengumpulan data inklusif terpilah berdasarkan jenis kelamin, gender, ragam disabilitas, umur, lokasi geografis dan karakteristik identitas sosial lainnya (d disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan). Proses pengumpulan dan analisis data inklusif dilakukan dengan berkonsultasi dan melibatkan perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan perwakilan kelompok marginal yang mengalami ketimpangan GESDI serta para pemangku kepentingan lainnya.

Data inklusif terpilah merupakan alat utama yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketimpangan GESDI, faktor-faktor penghambat (*barrier*) dan pendukung (*enabler*) GESDI, kesempatan dan peluang, kebutuhan kelompok marginal, rencana aksi, serta implikasinya bagi pencapaian tujuan yang akan dilakukan (kebijakan/ program/ anggaran/ kegiatan).

Contoh pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dapat membantu dalam melakukan pengumpulan data inklusif terpilah yang dibutuhkan.

Contoh pertanyaan pengumpulan data inklusif

- Apa isu ketimpangan GESDI yang terjadi pada lokasi sasaran dan apa faktor-faktor penyebabnya?
- Apa dampak dari ketimpangan GESDI terhadap kelompok marginal (menurut jenis kelamin, gender, disabilitas, umur, dan lokasi geografis), masyarakat dan bagi pembangunan sosial, ekonomi, politik dan lingkungan secara keseluruhan?
- Siapa kelompok marginal yang paling tertinggal dan tereksklusi akibat dari ketimpangan GESDI tersebut? (menurut jenis kelamin, gender, disabilitas, umur, lokasi geografis, dan sebagainya)
- Kapan dan di mana ketimpangan GESDI yang dialami oleh kelompok marginal ini terjadi? (misal, rumah tangga, komunitas, organisasi, masyarakat, layanan publik, negara).

- Bagaimana mereka terdampak oleh ketimpangan GEDSI yang terjadi? (menurut jenis kelamin, gender, disabilitas, umur, lokasi geografis, dan sebagainya).
- Apa kebutuhan-kebutuhan praktis dan strategis kelompok marginal untuk mengatasi ketimpangan GEDSI yang dialami? (menurut jenis kelamin, gender, disabilitas, umur, lokasi geografis, dan sebagainya)
- Apa intervensi yang perlu dilakukan untuk mengatasi ketimpangan GEDSI tersebut?



Tahap 1: Pengumpulan Data Inklusif

Data inklusif dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu: 1) data responsif GESDI; 2) data khusus inklusif disabilitas.

Data Responsif GESDI

Persiapan

Pengumpulan dan analisis data responsif GESDI membutuhkan persiapan, pertimbangan khusus dan sumber daya pendukung yang memadai. Daftar centang (*checklist*) di bawah ini dapat digunakan sebagai acuan untuk membantu menilai kesiapan dalam merencanakan dan melakukan pengumpulan dan analisis data responsif GESDI.

Jika pertanyaan di bawah ini ada yang dijawab ‘tidak yakin’ atau ‘tidak’, maka identifikasikan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan kesiapan dalam melakukan pengumpulan data responsif GESDI.

Tujuan dan
penggunaan

Apakah sudah ada pemahaman yang jelas dan sama tentang mengapa data ini harus dikumpulkan, dan bagaimana hasil informasi yang diperoleh akan digunakan?

- Ya
 Tidak yakin
 Tidak

Merencanakan bagaimana data akan digunakan sebelum memulai pengumpulan dan analisis data akan membantu dalam menentukan fokus dan tujuan dari pengumpulan dan analisis data tersebut. Terdapat berbagai tujuan pengumpulan data responsif GESDI misalnya:

- Memastikan suara dan perspektif dari berbagai kelompok dapat terwakilkan.
- Monitoring dan evaluasi, termasuk penetapan *baseline* dan *endline*.
- Identifikasi dan analisis masalah atau isu serta advokasi tindak lanjut.
- Monitoring akuntabilitas penyedia layanan.
- Perencanaan dan pengambilan keputusan internal.

Kebutuhan	<p>Apakah pengumpulan data ini sangat dibutuhkan, atau apakah ada sumber data lainnya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan penggunaan data yang diinginkan? Misalnya data dari pemerintah, OMS lokal, ataupun dari penyedia layanan ?</p> <p>Hal ini perlu dipertimbangkan, mengingat bahwa pengumpulan data membutuhkan biaya besar dan juga dapat berdampak pada subyek atau responden yang menjadi sumber data yang akan kumpulkan, terutama jika sifatnya sensitif atau memakan waktu lama</p>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak yakin <input type="checkbox"/> Tidak
Tidak merugikan	<p>Apakah proses pengumpulan dan analisis data tidak merugikan subyek atau responden dan pengumpul data? Kerugian tersebut misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerugian secara sosial-ekonomi dan waktu terkait dengan partisipasi dalam proses pengumpulan data, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari mencari nafkah, merawat , atau beristirahat. • Trauma karena membahas atau mengungkapkan topik sensitif. • Mengancam keselamatan pribadi dan pengucilan terhadap pengumpul data, responden, dan pihak lain yang terlibat. • Stigmatisasi atau perhatian yang tidak diinginkan, terutama untuk kelompok yang terpinggirkan. • Data tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya karena data yang dikumpulkan berdasarkan pendapat atau diwakilkan oleh orang lain tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. <p>Proses manajemen risiko yang dapat dilakukan, antara lain memastikan privasi, kerahasiaan dan keselamatan, menyediakan dukungan psikososial dan layanan rujukan lainnya; mengintegrasikan saran dari organisasi perwakilan dan perantara (seperti organisasi penyandang disabilitas, layanan bagi korban kekerasan, dan jaringan lainnya); menjaga proses pengumpulan data berlangsung singkat, dan memberikan kompensasi kepada responden atas waktu yang diberikan.</p>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak yakin <input type="checkbox"/> Tidak

<p>Pelibatan pemangku kepentingan</p>	<p>Apakah pelibatan pemangku kepentingan telah dilakukan secara memadai dan bermakna?</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Melibatkan kelompok perwakilan atau perantara</i> termasuk organisasi penyandang disabilitas, organisasi yang berfokus pada hak perempuan dan gender, organisasi dan jaringan masyarakat adat, agama, budaya, atau kelompok minoritas dan marginal lainnya, pejuang hak asasi manusia, dan penyedia layanan sosial. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan pendekatan yang digunakan sensitif, tidak merugikan, dan agar dapat benar-benar menjangkau setiap kelompok.• <i>Melibatkan pengguna data, atau analisis dan temuan dalam desain dan implementasi</i> – pengguna data, misalnya lembaga dan penyedia layanan pemerintah dan non-pemerintah, pemimpin dan pembuat keputusan, dan media.	<p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak yakin <input type="checkbox"/> Tidak</p>
<p>Kelayakan</p>	<p>Apakah rencana pengumpulan data realistis dilihat dari waktu, anggaran, keahlian, kapasitas pengelolaan dan pengawasan data termasuk juga dalam menjamin kualitas dan mutu data?</p> <p>Hal ini juga termasuk akses ke pendamping, penerjemah dan juru bahasa, terutama saat bekerja dengan penyandang disabilitas dan kelompok etnis dan bahasa minoritas.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak yakin <input type="checkbox"/> Tidak</p>
<p>Analisis dan umpan balik</p>	<p>Apakah organisasi/lembaga memiliki keterampilan, sistem, dan sumber daya untuk menganalisis dan menyajikan data sudah tersedia dan dapat dilakukan dengan cara yang mudah dipahami dan dapat digunakan secara praktis oleh pengguna data?</p> <p>Aspek utama dari pendekatan responsif atau transformatif GESDI adalah bahwa dalam mengumpulkan data tentang kelompok yang memiliki risiko marginalisasi dan eksklusi perlu melibatkan dan menyampaikan hasil temuan kepada kelompok tersebut agar mereka dapat memahami dan menggunakan data tersebut, sehingga dapat membantu meningkatkan partisipasi karena kegiatan yang dilakukan bermanfaat bagi mereka,</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak yakin <input type="checkbox"/> Tidak</p>

Setelah proses persiapan selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data yang mencakup survei atau wawancara terfokus.

Lingkungan Pemampu Pengumpulan Data Inklusif

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan pengumpulan data adalah sebagai berikut:

Memastikan Partisipasi Inklusif

Memastikan partisipasi kelompok berisiko atau kelompok yang mengalami ketidaksetaraan dan eksklusi dalam kegiatan pengumpulan data responsif GESDI, termasuk dalam perencanaan, pengumpulan, analisis, dan diseminasi penggunaan temuan merupakan hal yang penting dilakukan.

Untuk mendorong partisipasi, maka hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain:

- **Komunikasi:** Pastikan bahwa informasi tentang pengumpulan, analisis, dan penggunaan data dapat dikomunikasikan secara jelas melalui sarana komunikasi yang dapat diakses dan dipahami oleh berbagai kelompok. Hal ini mencakup pertimbangan mengenai:
 - ◇ *Mekanisme / media:* apa yang paling sesuai - tertulis, lisan, gambar, secara daring, pertemuan untuk khalayak umum; menampung aspirasi masyarakat, kunjungan masyarakat, menjalin hubungan dan dialog yang berlanjut; pelibatan melalui perantara atau secara langsung?
 - ◇ *Bahasa dan kompleksitas:* bahasa apa (termasuk bahasa isyarat dan *braille*) yang digunakan oleh kelompok yang ingin dijangkau? Apakah informasi dan proses pengumpulan data dapat dilakukan dalam bahasa mereka?
 - ◇ *Kepercayaan:* sumber informasi apa yang digunakan dan dipercaya? Informasi mungkin sebaiknya diberikan melalui narahubung/perantara yang dipercaya dan mampu menjelaskan prosesnya dengan tepat, misalnya organisasi penyandang disabilitas, organisasi dan jaringan perempuan berbasis komunitas, dan penyedia layanan setempat. Dalam beberapa hal, mungkin lebih baik untuk melakukan pelibatan narahubung yang dipercaya. Hal ini perlu dilakukan terutama jika status hukum atau sosial seseorang

atau suatu kelompok tersebut masih tidak jelas, dan/atau dapat berisiko mengancam keselamatan mereka, atau merupakan orang/kelompok yang sangat terpinggirkan sehingga mereka tidak memiliki kemampuan atau sumber daya untuk berpartisipasi secara memadai atau tanpa konsekuensi negatif.

- **Lokasi dan waktu:** Proses pengumpulan data perlu diadakan di lokasi dan waktu yang mudah diakses oleh setiap orang dan kelompok yang berisiko atau yang mengalami ketidaksetaraan dan terpinggirkan. Hal ini termasuk memastikan aksesibilitas fisik secara langsung atau daring; menghindari biaya perjalanan; memastikan privasi, kerahasiaan dan keamanan; dan mempertimbangkan norma keluarga, sosial dan budaya setempat serta orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut pada waktu tertentu.
- **Pengaturan staf:** Staf dan relawan yang terlibat dalam semua tahap kegiatan terkait dengan data responsif GEDSI perlu diberikan pembekalan pelatihan dengan baik mengenai isi, tujuan, dan metode, daftar pertanyaan, dan melakukan umpan balik yang peka terhadap GEDSI. Staf dan relawan harus dapat memastikan keamanan dan kenyamanan para responden setiap saat. Staf dan relawan perlu melakukan refleksi diri, menyadari identitas dan bias mereka sendiri dan dapat menerapkan proses yang adil dan tidak menghakimi, termasuk memastikan bahwa mereka tidak terpengaruh, hanya mendengar dan mengikuti suara pihak yang lebih kuat, dominan, dan/atau pandai berbicara.

Memahami Bias

Terdapat berbagai jenis bias yang dapat memengaruhi kualitas pengumpulan dan analisis data terpilah GEDSI. Pendekatan interseksionalitas menekankan pentingnya menyadari identitasnya sendiri, karena setiap orang memiliki perspektif dan pengalaman berbeda yang memengaruhi kemampuan untuk tetap objektif dalam menginterpretasi informasi yang diperoleh. Dalam pengumpulan dan analisis data tanpa disadari, dapat melakukan bias-bias berikut ini:

- **Bias konfirmasi:** mencari, menafsirkan, atau mengingat informasi untuk menegaskan keyakinan, atau pikiran tentang hasil dari kajian yang akan dilakukan.
- **Bias pengamat:** mempengaruhi hasil pengumpulan data dengan harapan-

harapan atau melakukan tindakan-tindakan tertentu.

- **Bias nilai dan budaya:** mendukung budaya, sifat, atau keyakinan tertentu yang selaras dengan nilai-nilai sendiri.
- **Bias identitas:** mendukung pandangan satu kelompok di atas yang lain atas dasar identitas - seperti pakar, pemegang kekuasaan, identitas jenis kelamin, gender, disabilitas dan sebagainya. Bias ini dapat terjadi baik pada pengumpul data maupun responden.

Oleh karena itu penting melakukan refleksi terhadap potensi berbagai bias yang mungkin terjadi yang dapat memengaruhi hasil dari pengumpulan dan analisis data GEDSI. Menyadari potensi bias merupakan langkah pertama yang penting dilakukan untuk meminimalkan bias. Contoh pertanyaan untuk memahami potensi bias dapat dilihat pada box di bawah ini.

Pertanyaan memahami potensi terjadinya bias

Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dapat membantu dalam memahami potensi terjadinya bias :

- Apa yang menjadi motivasi kajian ?
- Bagaimana latar belakang yang dimiliki memengaruhi dalam menganalisis fakta yang terjadi? Apa yang kurang atau salah menafsirkan akibat dari latar belakang yang dimiliki?
- Apa sumber-sumber informasi yang dimiliki? Seberapa banyak multipihak dan tipe-tipe multipihak yang terlibat dalam kajian atau penelitian? Apakah kajian ini dimaksudkan untuk mencari berbagai perspektif yang berbeda?
- Siapa yang akan memberikan informasi? Apa motivasi mereka dalam memberikan informasi tersebut?
- Dalam situasi apa informasi tersebut diberikan? Apakah informasi yang diberikan memengaruhi kita dan mengapa mereka memberikan informasi tersebut kepada kita?

Strategi penting lain yang perlu dilakukan termasuk desain instrumen pengumpulan data dan kerangka pengambilan sampel yang cermat dan hati-hati, keanggotaan tim yang beragam yang memiliki nilai-nilai dan perspektif yang berbeda yang dapat

secara bebas mendiskusikan interpretasi data; analisis yang tajam dan tepat, dan berdasarkan berbagai sumber.

Data Terpilah

Data terpilah mencakup informasi yang lengkap agar penelusuran tentang karakteristik dan pola khusus di dalam dan di antara kelompok dapat dilakukan. Data terpilah dapat digunakan untuk analisis ketidaksetaraan dan eksklusi berdasarkan berbagai faktor yang beririsan – misalnya hubungan antara gender, umur, disabilitas dan lokasi.

Data terpilah sangat penting untuk mewujudkan GESDI serta untuk mengukur daya tanggap dan akuntabilitas pengembalian tugas terhadap kelompok marginal.

Jika data terpilah tidak tersedia, pengumpulan data terpilah dapat dijadikan salah satu prioritas kegiatan atau *output* yang akan dihasilkan dari program yang diusulkan. Data terpilah yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai landasan dalam mengintegrasikan GESDI dalam tahap penyelenggaraan pembangunan selanjutnya. Selain itu, juga membantu mengatasi keterbatasan akan ketersediaan data inklusif terpilah yang dapat digunakan oleh pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan para pemangku kepentingan lainnya.

Analisis data kuantitatif terpilah dan informasi kualitatif sangat penting untuk mengidentifikasi siapa yang tertinggal - dan mengapa. Analisis data terpilah harus mempertimbangkan bahwa ketidaksetaraan dan diskriminasi berhubungan langsung dengan eksklusi dan aspirasi, yang berarti kelompok yang terpinggirkan sering kurang terwakili atau mungkin tidak muncul sama sekali dalam data yang ada.

Mengumpulkan dan menganalisis data terpilah memerlukan upaya yang lebih intensif karena datanya terkait dengan karakteristik individu (misalnya jenis kelamin, gender, ragam disabilitas, usia, lokasi), dan variabel yang menjadi perhatian harus dikumpulkan dan dicatat secara konsisten. Jika data tidak lengkap, analisis tidak akan mungkin dilakukan atau dapat menghasilkan temuan yang bias.

Memutuskan tingkat disagregasi (berapa banyak variabel per data individu) akan bergantung pada tujuan pengumpulan dan analisis. Jika dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan kategori yang digunakan dalam data resmi yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik, maka akan dapat membandingkan hasil temuan dengan kumpulan data yang lebih besar. Namun, dalam beberapa area, kategori BPS tidak memiliki tingkat disagregasi yang diperlukan dalam melakukan analisis interseksionalitas. Oleh karena itu disarankan untuk menggunakan kategori BPS sebagai titik awal dan menambahkan kategori tambahan yang relevan dengan tujuan data. Kategori dan istilah yang digunakan BPS dapat dilihat di [situs web](#) BPS.

Paling tidak, data terpilah berdasarkan jenis kelamin, gender, disabilitas, umur, dan lokasi, termasuk apakah di perkotaan atau pedesaan merupakan kategori yang berguna untuk melakukan analisis. Perlu diperhatikan bahwa data terpilah disabilitas memerlukan perhatian spesifik. ([Lihat Data Khusus Disabilitas](#)).

Dalam proses pengumpulan data responsif GEDSI, setiap orang harus diberi pilihan untuk mengungkapkan, atau tidak mengungkapkan informasi tentang identitas/karakteristik pribadinya. Prinsip identifikasi diri penting – agar individu tersebut dapat menyampaikan tentang karakteristik identitas dirinya yang perlu dicatat, misalnya, dengan menyatakan identitas etnis atau gender, bukan berdasarkan asumsi atau ditentukan secara otomatis berdasarkan penampilan mereka.

Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin dan Gender

Sering kali data terpilah berdasarkan jenis kelamin/seks dan gender dipertukarkan dan atau dianggap sama. Dalam kenyataan, hal ini berbeda. Oleh karena itu baik pengumpul data dan responden perlu memahami perbedaan tersebut.

Data terpilah berdasarkan jenis kelamin adalah data yang memuat informasi tentang identitas seseorang berdasarkan kategori seks/jenis kelamin biologis yang ditentukan pada saat kelahiran: misalnya perempuan (*female*), dan laki-laki (*male*) Sedangkan data terpilah berdasarkan gender secara teknis adalah data yang

memuat informasi berdasarkan kategori identitas gender seseorang yang dikonstruksikan secara sosial. Data ini meminta responden untuk memberikan informasi tentang identitas gender, yang mungkin bisa sama atau berbeda dengan identitas jenis kelamin biologis yang ditentukan pada saat lahir.²¹

Instrumen dan pengumpul data perlu menanyakan dan memuat secara jelas kategor identitas yang akan dikumpulkan, apakah berdasarkan jenis kelamin biologis (*female, male*) atau berdasarkan identitas gender, misal perempuan (*women*), laki-laki (*men*) atau kategori lainnya (*others*). Responden pertama-tama harus menyadari terlebih dahulu identitas apa yang ditanyakan (kebanyakan orang tidak mengerti atau bagaimana mengungkapkannya, khususnya terkait dengan identitas gender lainnya, misalnya waria karena tabu, malu, stigma dan diskriminasi yang dialami. Kenyamanan, keselamatan, kerahasiaan data identitas perlu diperhatikan sesuai dengan prinsip tidak merugikan (*Do No harm*))

Pengumpul data (peneliti dan evaluator) dalam mengidentifikasi variable data terpilah (seks dan/atau gender) yang akan digunakan harus disesuaikan dengan topik dan tujuan, dan perlu meminta masukan terkait data terpilah yang relevan dari perwakilan dari kelompok populasi yang datanya akan dikumpulkan .

Mengumpulkan data sosio-ekonomi seringkali melibatkan metodologi pendapatan dan pengeluaran yang rumit. Namun, ada beberapa metode alternatif lainnya yang cenderung memberikan informasi yang cukup baik untuk melakukan analisis interseksionalitas, meskipun mungkin tidak seakurat metodologi yang biasanya digunakan, antara lain:

- Kepemilikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai syarat menerima bantuan sosial, seperti Rastra (beras sejahtera) atau Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut termasuk dalam 30 persen penduduk termiskin (dengan asumsi bahwa bentuk bantuan sosial tersedia di daerah tersebut dan bahwa rumah tangga tersebut mengetahui tentang SKTM dan telah mendaftar jika memenuhi syarat).

²¹ Diadaptasi dari Draft Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender. 22 September 2023.

- Pemeringkatan kesejahteraan masyarakat yang membagi rumah tangga ke dalam kelompok termiskin, menengah, atau mampu.
- Pengamatan berdasarkan indikator kemiskinan atau kesejahteraan yang telah ditetapkan untuk daerah tersebut, misalnya bahan bangunan rumah atau kepemilikan aset umum (sepeda motor, parabola, *smartphone*).
- Identifikasi mandiri ke dalam kelompok miskin, menengah, atau mampu dibandingkan anggota masyarakat lainnya (tetapi metode ini dapat bersifat terlalu subjektif, sehingga kurang akurat).

Terdapat juga metodologi lain yang lebih terperinci yang dapat digunakan untuk melakukan analisis status sosial ekonomi di antara anggota rumah tangga termasuk pengukuran tingkat kemiskinan, yang disebut sebagai *Equality Insights*, yang telah [diujicobakan di Indonesia](#).²²

Tabel 1 Contoh variabel dan pilihan jawaban yang memungkinkan

Variabel	Pilihan jawaban
Jenis kelamin:	Perempuan; Laki-laki
Tanggal lahir	(bln/thn)
Agama:	Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, Lainnya
Memiliki akte kelahiran	1 = Ya; 0 = Tidak
Memiliki KTP	1 = Ya; 0 = Tidak
Tidak memenuhi syarat kepemilikan KTP (usia <17)	1 = Ya; 0 = Tidak
Status perkawinan:	Belum menikah; Menikah tinggal serumah; Menikah tidak serumah; Menikah tetapi suami/istri kabur; Cerai hidup; Cerai mati; Pasangan tidak menikah dan tinggal bersama
Usia pada saat kawin pertama	[tahun]
Tinggal dalam rumah tangga poligami	1 = Ya; 0 = Tidak
Kepala Keluarga	1 = Ya; 0 = Tidak

²² A rapid survey tool has been developed and is discussed in *Equality Insights*, IWDA (2022) *Equality Insights Rapid Tool Development Report*. See chapter *Survey Considerations and Content* for the structure and questions

Status disabilitas	Pilihan jawaban	
1. Apakah Anda mengalami kesulitan melihat, meskipun memakai kacamata? ²³	<input type="checkbox"/> Tidak - tidak ada kesulitan <input type="checkbox"/> Ya – beberapa kesulitan	<input type="checkbox"/> Ya – banyak kesulitan <input type="checkbox"/> Tidak bisa sama sekali
2. Apakah Anda mengalami kesulitan mendengar, meskipun menggunakan alat bantu dengar? ²⁴	<input type="checkbox"/> Tidak - tidak ada kesulitan <input type="checkbox"/> Ya – beberapa kesulitan	<input type="checkbox"/> Ya – banyak kesulitan <input type="checkbox"/> Tidak bisa sama sekali
3. Apakah Anda mengalami kesulitan berjalan atau menaiki tangga?	<input type="checkbox"/> Tidak - tidak ada kesulitan <input type="checkbox"/> Ya – beberapa kesulitan	<input type="checkbox"/> Ya – banyak kesulitan <input type="checkbox"/> Tidak bisa sama sekali
4. Apakah Anda mengalami kesulitan mengingat atau berkonsentrasi?	<input type="checkbox"/> Tidak - tidak ada kesulitan <input type="checkbox"/> Ya – beberapa kesulitan	<input type="checkbox"/> Ya – banyak kesulitan <input type="checkbox"/> Tidak bisa sama sekali
5. Apakah Anda mengalami kesulitan dengan perawatan diri seperti membersihkan seluruh tubuh atau berpakaian?	<input type="checkbox"/> Tidak - tidak ada kesulitan <input type="checkbox"/> Ya – beberapa kesulitan	<input type="checkbox"/> Ya – banyak kesulitan <input type="checkbox"/> Tidak bisa sama sekali
6. Dengan menggunakan bahasa (daerah) Anda, apakah Anda mengalami kesulitan berkomunikasi, misalnya memahami atau dimengerti?	<input type="checkbox"/> Tidak - tidak ada kesulitan <input type="checkbox"/> Ya – beberapa kesulitan	<input type="checkbox"/> Ya – banyak kesulitan <input type="checkbox"/> Tidak bisa sama sekali



²³ Untuk pertanyaan ini, orang yang menjawab 'tidak bisa sama sekali' dapat dikategorikan buta total (totally blind), sedangkan yang menjawab 'ya, beberapa kesulitan' dan 'ya, banyak kesulitan' dapat dikategorikan sebagai 'low vision' atau legally blind.

²⁴ Untuk pertanyaan ini, orang yang menjawab 'tidak bisa sama sekali' dapat dikategorikan Tuli total (totally deaf), sedangkan yang menjawab 'ya, beberapa kesulitan' dan 'ya, banyak kesulitan' dapat dikategorikan sebagai 'hard of hearing'. Orang yang totally deaf tidak bisa dibantu dengan alat bantu dengar dan biasanya harus dibantu dengan Juru Bahasa Isyarat (JBI). Adapun hard of hearing dapat dibantu dengan alat bantu dengar dan pada sebagian orang-orang hard of hearing tidak membutuhkan JBI.

Variabel	Pilihan jawaban
Ringkasan tentang status disabilitas:	
Ringan: jawaban 'Ya – beberapa kesulitan' atas paling tidak satu dari enam pertanyaan.	1 = Ya; 0 = Tidak
Sedang: jawaban 'Ya – banyak kesulitan' atas paling tidak satu dari enam pertanyaan.	1 = Ya; 0 = Tidak
Berat: jawaban 'Tidak bisa sama sekali' atas paling tidak satu dari enam pertanyaan.	1 = Ya; 0 = Tidak
Tingkat pendidikan tertinggi	
Formal	SD, SMP, SMA, Pendidikan tinggi
Informal	Paket A, Paket B, Paket C

Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel umumnya digunakan karena biasanya tidak memungkinkan untuk menjangkau semua populasi atau terlalu banyak sumber daya yang diperlukan untuk mencakup keseluruhan populasi. Desain data menentukan apa/siapa yang akan menjadi populasi dari penelitian— misalnya, suatu kabupaten/kota, desa, murid sekolah, pekerja migran perempuan, penyandang disabilitas.

Pemilihan metode sampling harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, sumber daya, dan jaringan. Sampel dapat bersifat mewakili, yaitu apabila setiap individu dipilih secara acak secara proporsional, untuk mewakili populasi yang lebih besar, dan hasil yang ditemukan dalam analisis sampel, kurang lebih, juga akan berlaku untuk semua populasi asal dari pengambilan sampel tersebut. Pengambilan sampel untuk penelitian dan evaluasi secara umum tidak dibahas di sini, tetapi informasi lebih lanjut dapat dibaca di situs web [Better Evaluation](#).

Analisis berbasis sampel acak atau representatif kurang begitu tepat untuk digunakan dalam pengumpulan data tentang kelompok minoritas atau terpinggirkan. Alasannya:

- Subkelompok sampel yang memiliki karakteristik yang akan dianalisis jumlahnya relatif kecil sehingga proporsinya menjadi hilang, misalnya jika ingin melihat dampak dari gabungan identitas sebagai sumber penyebab ketidaksetaraan dan pengucilan (misalnya, gender, disabilitas, dan lansia).
- Tidak diketahui secara pasti jumlah populasi kelompok minoritas atau

terpinggirkan, sehingga sulit untuk mengambil sampel yang representatif dari populasi tersebut. Misalnya jika kita mendefinisikan populasi sebagai 'penyandang disabilitas di provinsi X', proporsi yang signifikan tersembunyi atau sulit dijangkau sehingga pengambilan sampel acak yang representatif dari kelompok ini tidak layak dilakukan.

- Sensitivitas dan memerlukan pelatihan khusus, keselamatan dan kerahasiaan, membangun hubungan dan kepercayaan agar dapat menanyakan hal-hal tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh ditanyakan kepada semua orang atau dengan metode cepat.

Oleh karena itu, pengumpulan data yang berfokus pada kelompok minoritas atau terpinggirkan atau topik sensitif, sebaiknya menggunakan sampel non-acak dan tidak representatif, antara lain:

- Pengambilan sampel secara sengaja, dengan memilih secara sengaja orang atau kelompok yang memiliki karakteristik yang ingin dikaji.
- Pengambilan sampel berdasarkan informasi yang diberikan jaringan atau nara hubung/perantara yang dapat membantu mengidentifikasi responden yang tepat.
- Pengambilan sampel rujukan berantai (*snowball sampling*), yaitu responden diminta merekomendasikan orang lain yang memiliki karakteristik yang ingin dikaji untuk menjadi responden.

Persetujuan dan Privasi

Sebelum melakukan pengumpulan data, perlu mendapatkan persetujuan dari sumber data atas informasi yang akan diberikan (*informed consent*). Dalam upaya memperoleh persetujuan (*informed consent*), perlu dipahami hal-hal berikut ini:

- Isi data yang akan dikumpulkan dan berapa lama prosesnya akan berlangsung.
- Tujuan kegiatan terkait dengan data tersebut dan bagaimana informasi tersebut akan digunakan.
- Bagaimana data akan ditandai dengan label dan disimpan, termasuk apakah data termasuk informasi identifikasi diri (nama, alamat) dan siapa yang akan memiliki akses ke data tersebut.
- Kemampuan untuk menghentikan proses kapan pun dan kemampuan untuk tidak menjawab pertanyaan apa pun yang menyebabkan responden tidak nyaman.

Data harus dilindungi dan dirahasiakan di semua tahap kegiatan. Informasi tentang diri seseorang hanya diperlukan jika ada tindak lanjut yang ditargetkan. Aturan yang berlaku adalah apabila informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang (misalnya nama, alamat) tidak diperlukan, maka tidak diperbolehkan untuk direkam.

Berhati-hatilah saat menggunakan kutipan dari atau saat merujuk ke wawancara tertentu. Terkadang meskipun tanpa nama, gabungan informasi lainnya seperti status disabilitas, pekerjaan, lokasi dapat mengungkap identitas seseorang. Memasukkan informasi dengan cara yang dapat dikaitkan dengan orang atau kelompok tertentu hanya dapat dilakukan dengan izin dari orang atau kelompok tersebut.

Data Khusus Disabilitas²⁵

Data Inklusif Disabilitas dalam Kegiatan

Jika ingin mengumpulkan data secara umum tentang partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan yang akan dilakukan, misalnya pelatihan, pertemuan, dan lokakarya, maka dapat dilakukan tiga pilihan utama sebagai berikut:

(1) Mencantumkan pertanyaan pada formulir pendaftaran:

Apakah Anda memiliki kesulitan yang dapat menghambat untuk berpartisipasi penuh dalam acara ini?

ATAU

Apakah Anda mengidentifikasi diri sebagai orang dengan disabilitas? (Perhatikan bahwa pertanyaan ini bisa saja ditanggapi dengan jawaban 'tidak' jika yang bersangkutan ingin menyembunyikan atau tidak ingin mengakui adanya keterbatasan).

Jika Anda dapat mengajukan pertanyaan ini dalam proses pra-pendaftaran sebelum memfinalisasi rancangan kegiatan/acara, pertanyaan ini dapat ditindaklanjuti dengan pertanyaan berikut ini:

²⁵ Acuan ini diadaptasi dari Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Indonesia and the Phillipines (not dated) Practical Guide for Identification and Use of Disability Data Based on the Washington Group Short Set of Questions on Disability; Panduan Praktis Identifikasi dan Penggunaan Data Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pertanyaan Singkat Kelompok Washington, and explanatory video; Informasi umum tentang Washington Group tersedia di Washinton Group on Disability Statistic. About the Washington Group. Terutama baca panduan bagi pewawancara/interviewer guidelines 8 Februari 2023 dan kuesioner pertanyaan.

'Jika ya, dukungan apa yang Anda butuhkan dari kami agar dapat lebih mudah berpartisipasi?'

Pertanyaan ini dapat secara langsung ditindaklanjuti kepada yang bersangkutan untuk didiskusikan lebih lanjut.

Jawaban atas pertanyaan di atas sudah dapat digunakan untuk dapat memilah partisipasi dan melakukan respons pasca evaluasi berdasarkan ragam disabilitas sesuai dengan kebutuhan, dan yang lebih penting untuk menyediakan dukungan serta akomodasi yang layak dibutuhkan oleh penyandang disabilitas untuk memaksimalkan partisipasi mereka dalam kegiatan secara penuh dan bermakna.

(2) Meminta bantuan dari organisasi penyandang disabilitas setempat untuk memberikan informasi apakah program telah menjangkau anggota organisasi penyandang disabilitas secara memadai. Informasi yang disampaikan mungkin kurang akurat, terutama jika pihak penanya belum memperoleh pelatihan untuk menyampaikan pertanyaan terkait disabilitas secara peka.

(3) Menggunakan kuesioner Washington Group (lihat di bawah ini). Kuesioner ini akan memberikan data yang lebih akurat tetapi mungkin kurang praktis untuk dimasukkan ke dalam formulir pendaftaran atau menerima umpan balik.

Mengumpulkan Data Disabilitas secara Terperinci – Kuesioner Washington Group

Apabila ingin mengumpulkan data untuk memahami secara lebih terperinci tentang jumlah (prevalensi) penyandang disabilitas di suatu lokasi tertentu, dan ragam disabilitas yang dialami, dapat menggunakan Kuesioner Washington Group.

Kuesioner Washington Group

Kuesioner Washington Group (Washington Group Short Set/WG-SS) berisi serangkaian pertanyaan yang disusun untuk mengidentifikasi orang dengan keterbatasan fungsional. Kuesioner ini bertujuan untuk memudahkan standarisasi data disabilitas di dalam dan di semua pengaturan yang berbeda. Data ini kemudian dapat digunakan dalam proses perencanaan dan alokasi sumber daya. Pemerintah

Indonesia telah menggunakan kuesioner WG-SS yang dimasukkan ke dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020.

Berikut ini adalah serangkaian pertanyaan dalam kuesioner WG-SS dan pilihan jawabannya:

1. Apakah Anda mengalami kesulitan melihat, meskipun memakai kacamata? ²⁶	<input type="checkbox"/> Tidak - tidak ada kesulitan <input type="checkbox"/> Ya – beberapa kesulitan <input type="checkbox"/> Ya – banyak kesulitan <input type="checkbox"/> Tidak bisa sama sekali
2. Apakah Anda mengalami kesulitan mendengar, meskipun menggunakan alat bantu dengar? ²⁷	<input type="checkbox"/> Tidak - tidak ada kesulitan <input type="checkbox"/> Ya – beberapa kesulitan <input type="checkbox"/> Ya – banyak kesulitan <input type="checkbox"/> Tidak bisa sama sekali
3. Apakah Anda mengalami kesulitan berjalan atau menaiki tangga?	<input type="checkbox"/> Tidak - tidak ada kesulitan <input type="checkbox"/> Ya – beberapa kesulitan <input type="checkbox"/> Ya – banyak kesulitan <input type="checkbox"/> Tidak bisa sama sekali
4. Apakah Anda mengalami kesulitan mengingat atau berkonsentrasi?	<input type="checkbox"/> Tidak - tidak ada kesulitan <input type="checkbox"/> Ya – beberapa kesulitan <input type="checkbox"/> Ya – banyak kesulitan <input type="checkbox"/> Tidak bisa sama sekali
5. Apakah Anda mengalami kesulitan dengan perawatan diri seperti membersihkan seluruh tubuh atau berpakaian?	<input type="checkbox"/> Tidak - tidak ada kesulitan <input type="checkbox"/> Ya – beberapa kesulitan <input type="checkbox"/> Ya – banyak kesulitan <input type="checkbox"/> Tidak bisa sama sekali
6. Dengan menggunakan bahasa (daerah) Anda, apakah Anda mengalami kesulitan berkomunikasi, misalnya memahami atau dimengerti?	<input type="checkbox"/> Tidak - tidak ada kesulitan <input type="checkbox"/> Ya – beberapa kesulitan <input type="checkbox"/> Ya – banyak kesulitan <input type="checkbox"/> Tidak bisa sama sekali

²⁶ Untuk pertanyaan ini, orang yang menjawab 'tidak bisa sama sekali' dapat dikategorikan buta total (totally blind), sedangkan yang menjawab 'ya, beberapa kesulitan' dan 'ya, banyak kesulitan' dapat dikategorikan sebagai 'low vision' atau legally blind.

²⁷ Untuk pertanyaan ini, orang yang menjawab 'tidak bisa sama sekali' dapat dikategorikan Tuli total (totally deaf), sedangkan yang menjawab 'ya, beberapa kesulitan' dan 'ya, banyak kesulitan' dapat dikategorikan sebagai 'hard of hearing'. Orang yang totally deaf tidak bisa dibantu dengan alat bantu dengar dan biasanya harus dibantu dengan Juru Bahasa Isyarat (JBI). Adapun hard of hearing dapat dibantu dengan alat bantu dengar dan pada sebagian orang-orang hard of hearing tidak membutuhkan JBI.

Badan Pusat Statistik telah mengklasifikasikan penyandang disabilitas sebagai:

- Ringan (*light*): jawaban 'Ya – beberapa kesulitan' atas paling tidak satu dari enam pertanyaan.
- Sedang (*moderate*): jawaban 'Ya – banyak kesulitan' atas paling tidak satu dari enam pertanyaan.
- Berat (*severe*). jawaban 'Tidak bisa sama sekali' atas paling tidak satu dari enam pertanyaan.

Kuesioner di atas juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah seseorang memiliki disabilitas tunggal, ganda atau multi. Responden yang memiliki satu gangguan fungsional saja berarti memiliki disabilitas tunggal, responden yang mengidentifikasi dirinya memiliki dua gangguan fungsional berarti memiliki disabilitas ganda, sedangkan responden yang memiliki lebih dari dua gangguan fungsional berarti memiliki multi disabilitas.

Tip Menggunakan Kuesioner Washington Group

Apabila memasukkan kuesioner WG-SS ke dalam suatu survei, penting bagi enumerator untuk memahami pertanyaannya dan bagaimana menganalisis pertanyaan tersebut. Enumerator perlu mendapat pelatihan sebelumnya untuk menggunakan kuesioner ini. Pelatihan daring tidak berbayar tersedia (dalam bahasa Inggris) melalui the [Humanitarian Leadership Academy](#)²⁸, dan berbagai sumber lainnya termasuk [panduan bagi pewawancara \(interviewer guidelines\)](#) yang tersedia di situs web [Washington Group](#).²⁹



²⁸ Kaya. Collecting Data for the Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action

²⁹ Washington Group on Disability Statistics. About the Washington Group.

Tip menggunakan kuesioner Washington Group bagi enumerator:

- WG-SS hanya digunakan untuk responden orang dewasa.
- WG-SS bukanlah alat diagnostik untuk mengidentifikasi kondisi atau gangguan kesehatan atau untuk rujukan orang ke layanan yang relevan.
- Pertanyaan harus disampaikan secara netral. Kata 'disabilitas' tidak digunakan saat memulai pertanyaan atau saat menjelaskan atau menyampaikan pertanyaan. Alasannya, kata 'disabilitas' dapat menyebabkan data menjadi tidak dapat dipercaya, karena responden enggan mengungkapkan keterbatasan fungsionalnya karena stigma yang terkait dengan disabilitas.
- Misalnya, enumerator seharusnya memulai pertanyaan dengan berkata 'Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang kesulitan yang mungkin Anda alami saat melakukan berbagai kegiatan' bukan 'Saya akan bertanya tentang beberapa pertanyaan tentang disabilitas yang mungkin Anda miliki'.
- Jangan menggunakan pertanyaan yang bersifat menyeleksi responden (*screening questions*). Semua pertanyaan harus ditanyakan kepada setiap responden dalam sampel. Enumerator dilarang untuk menanyakan terlebih dahulu apakah ada yang anggota keluarganya mengalami disabilitas, kemudian menggunakan kuesioner hanya untuk para responden tersebut.
- Enumerator dilarang berasumsi seseorang memiliki atau tidak memiliki disabilitas hanya dengan mengamati responden.

Lihat juga Buku III Bab B: Berkomunikasi dengan penyandang disabilitas dan video berinteraksi dan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas *Tuli* dan *netra* yang dikembangkan oleh SIGAB-INKLUSI.

Tahap 2: Analisis GESDI

Analisis GESDI merupakan landasan utama dalam melakukan pengarusutamaan GESDI. Tanpa analisis GESDI, pengarusutamaan GESDI tidak mungkin dilakukan. Sebelum melakukan analisis GESDI perlu dipahami terlebih dahulu hal-hal mendasar sebagai berikut:

Apa Itu Analisis GESDI?

Analisis GESDI adalah metode pengumpulan dan analisis data dan informasi secara sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketimpangan GESDI atas dasar ragam identitas (jenis kelamin, gender, disabilitas, umur, suku, agama, lokasi geografis dan karakteristik sosial lainnya), yang dialami perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya, termasuk perbedaan peran, norma sosial, dan relasi kuasa, kesempatan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya, manfaat, kebutuhan, tantangan dan hambatan, serta bagaimana berbagai perbedaan-perbedaan tersebut memengaruhi pengalaman orang/kelompok dalam memperoleh keistimewaan, atau sebaliknya ketidaksetaraan dan eksklusi.

Dalam melakukan analisis GESDI perlu mempertimbangkan tujuan, kebutuhan dan konteks, termasuk sistem sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum, serta norma sosial, budaya lokal, kebijakan dan peraturan yang berlaku pada waktu, tempat, situasi dan kondisi tertentu. Analisis GESDI dilakukan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan partisipasi inklusif dan tidak merugikan (*do-no-harm*). Penerapan prinsip-prinsip ini penting agar proses dan hasil analisis GESDI yang dilakukan tidak menimbulkan, melanggengkan atau bahkan memperkuat diskriminasi, marginalisasi dan eksklusi yang ada, sehingga membuat kelompok marginal semakin tertinggal dalam proses pembangunan.

Mengapa Perlu Melakukan Analisis GESDI?

Analisis GESDI merupakan landasan utama bagi pengarusutamaan GESDI, dengan tujuan untuk:

- Mengidentifikasi, memahami dan menganalisis isu GESDI termasuk relasi kuasa, diskriminasi, ketidaksetaraan dan eksklusi yang dialami oleh kelompok marginal

berdasarkan ragam identitas yang dimiliki, yang berlandaskan pada bukti /data terpilah bukan asumsi.

- Mengidentifikasi siapa kelompok marginal yang paling terdiskriminasi, tereksklusi dan tertinggal berdasarkan jenis kelamin, gender, disabilitas, lokasi geografis, dan sebagainya, serta faktor penyebabnya.
- Memahami perbedaan peran, status, kebutuhan, kapasitas, relasi kuasa, pengambilan keputusan, termasuk tantangan, hambatan dan peluang, dan pengaruhnya terhadap partisipasi, akses dan kontrol kelompok marginal terhadap manfaat dan pencapaian tujuan program secara keseluruhan.
- Memahami sistem sosial budaya, ekonomi dan politik, termasuk kelompok pemangku kepentingan, norma dan praktik-praktik sosial budaya yang menghambat dan mendukung GESDI.
- Memahami dan mengatasi potensi dampak dari berbagai intervensi yang dilakukan terhadap kelompok marginal atas dasar ragam identitas yang dimiliki.

Apa Manfaat dari Analisis GESDI?

Membantu pemerintah, masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya dalam:

- Menjangkau kelompok marginal yang paling tertinggal, meningkatkan partisipasi aktif dan bermakna, akses dan kontrol serta manfaat pembangunan secara adil, setara, inklusif dan berkelanjutan, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.
- Mengatasi terbatasnya ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, gender, disabilitas, umur, ras, suku/etnisitas, agama, lokasi geografis dan karakteristik sosial lainnya untuk menyusun kegiatan dan menilai perubahan.
- Menyusun strategi, pendekatan, prioritas dan rencana aksi GESDI termasuk strategi pengelolaan risiko untuk mengatasi dampak negatif program terhadap kelompok sasaran, sesuai dengan prinsip do no harm, pengembangan kapasitas bagi kelompok marginal dan para pemangku kepentingan, penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana, teknologi dan infrastruktur dan fasilitas layanan inklusif lainnya yang dibutuhkan, serta rekomendasi untuk mengatasi relasi kuasa yang tidak setara, serta berbagai bentuk diskriminasi, marginalisasi, ketidakadilan, ketidaksetaraan dan eksklusi, serta isu ketimpangan GESDI secara keseluruhan.
- Memperkuat budaya pembangunan inklusif, yang tumbuh dari bawah (*bottom up*)

oleh masyarakat, dan dari atas (*top-down*) oleh pemerintah melalui partisipasi inklusif kelompok marginal dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan analisis GESDI.

- Membuat keputusan inklusif yang didasarkan pada keragaman identitas, perspektif, aspirasi dan pengetahuan, berbasis bukti dan data terpilih, yang sesuai dengan kebutuhan semua orang.
- Memonitor dan mengevaluasi kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam menghilangkan diskriminasi dan ketimpangan GESDI.

Kapan Melakukan Analisis GESDI?

Analisis GESDI pada tahap perancangan sangat penting dilakukan, karena merupakan landasan bagi proses pengintegrasian GESDI pada tahapan selanjutnya dari proses pembangunan. Selain itu, analisis GESDI juga perlu dilakukan pada tahap-tahap selanjutnya dari penyelenggaraan pengarusutamaan GESDI.

Siapa yang Melakukan Analisis GESDI?

Analisis GESDI secara teknis dilakukan oleh tenaga ahli GESDI yang didukung oleh para pemangku kepentingan terkait, termasuk para pimpinan, pembuat kebijakan, perencana dan pelaksana, staf yang terlibat, dan kelompok marginal yang menjadi sasaran. Dukungan diwujudkan dalam bentuk komitmen, sumber daya manusia dan keuangan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan analisis GESDI. Untuk isu-isu spesifik GESDI tertentu, misalnya yang terkait disabilitas, pekerja migran, masyarakat adat, dan kelompok minoritas, sesuai dengan prinsip *nothing about us, without us*, maka perlu melibatkan perwakilan dari kelompok-kelompok tersebut dalam melakukan pengumpulan data dan analisis GESDI.

Apa Sumber-Sumber Daya yang Dibutuhkan?

Secara garis besar, sumber-sumber daya yang dibutuhkan dalam melakukan analisis GESDI adalah:

- **Sumber daya manusia** yang memiliki keahlian khusus dalam isu-isu GESDI dan sektor pembangunan terkait.
- **Sumber daya keuangan** untuk melakukan penelitian, pengumpulan data, dan analisis

- **Data statistik (kuantitatif) dan data/informasi kualitatif** terkait GEDSI baik data primer (misalnya, penelitian dan kajian lapangan, konsultasi, wawancara, FGD) maupun data sekunder dari berbagai sumber (BPS, laporan penelitian, temuan lapangan, pemantauan dan evaluasi program).
- **Partisipasi inklusif dari multipihak**, termasuk orang/kelompok marginal yang mengalami ketidaksetaraan dan eksklusi, organisasi penyandang disabilitas, organisasi perempuan, organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemerintah terkait dalam keseluruhan proses, mulai dari proses perancangan, konsultasi, pengumpulan dan analisis data dan pelaporan. Partisipasi aktif dan bermakna dari kelompok marginal terutama sangat penting agar dapat memperoleh masukan dan umpan balik sesuai dengan prinsip “*nothing about us, without us*”.
- **Komitmen dari pimpinan lembaga/organisasi/program dan seluruh staf** di setiap tingkatan untuk merealisasikan analisis GEDSI.

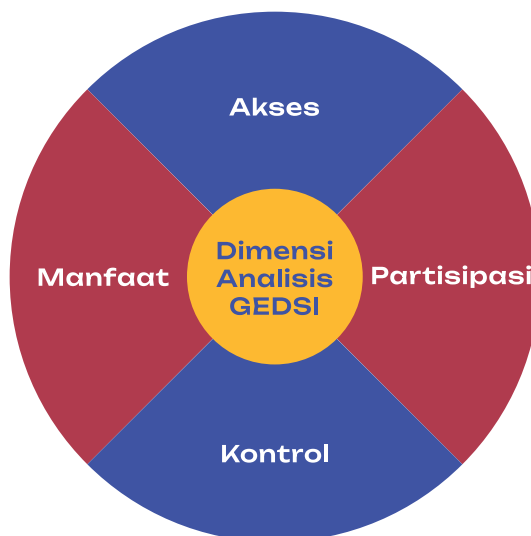
Dimensi Analisis GEDSI

Sejalan dengan kerangka analisis GEDSI yang dipakai oleh pemerintah, terdapat empat dimensi pokok analisis GEDSI yang dipakai untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketimpangan GEDSI, yaitu:

- **Akses:** kapasitas seseorang untuk memperoleh akses terhadap penggunaan sumber-sumber daya produktif, aset serta layanan publik agar dapat berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam pembangunan. Sumber-sumber daya produktif, aset dan layanan publik, antara lain termasuk informasi, waktu, teknologi, sumber keuangan, layanan kredit dan perbankan, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, sarana dan prasarana yang aksesibel, pengembangan kapasitas, kepemimpinan, dan sebagainya. Pada dimensi ini juga perlu melakukan analisis kebijakan/peraturan yang memengaruhi akses kelompok marginal terhadap sumber daya, aset dan layanan publik serta partisipasi dalam pembangunan.
- **Partisipasi:** kesempatan dan kapasitas seseorang untuk dapat berpartisipasi secara aktif, bermakna dan inklusif, dalam proses pengambilan keputusan, menyampaikan aspirasi, masalah, kebutuhan, dan berkontribusi dalam

pembangunan. Dimensi partisipasi dimaksudkan untuk memahami perbedaan partisipasi perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya di berbagai bidang kehidupan, pembagian peran gender di ranah domestik dan publik, mobilitas, ragam aktifitas dan waktu yang dimiliki untuk berpartisipasi, serta kebutuhan praktis dan strategis yang perlu diakomodasi untuk memastikan partisipasi aktif dan bermakna bagi kelompok marginal yang tertinggal.

- **Kontrol:** kapasitas seseorang untuk mengontrol dan membuat keputusan sendiri, tanpa paksaan atau ancaman dari orang lain terhadap penggunaan sumber-sumber daya, aset dan layanan publik. Termasuk dalam dimensi kontrol misalnya keputusan untuk menggunakan aset seperti tanah, rumah, dan harta warisan, keputusan untuk menikah, punya anak, bekerja, pilihan politik, menjalankan kepercayaan/keyakinan, tanpa paksaan dan ancaman. Misalnya, perempuan kepala keluarga dapat mengakses dan sekaligus memiliki tanah dan harta warisan atas namanya sendiri, serta mengambil keputusan mandiri tentang penggunaan tanah dan harta warisan yang dimiliki, untuk dipakai sendiri, dijual atau disewakan. Kontrol terkait dengan relasi kuasa dan norma sosial, termasuk norma sosial gender, sikap dan pandangan terhadap penyandang disabilitas dan orang dengan identitas sosial lainnya, serta aksesibilitas terhadap sumber-sumber daya yang memengaruhi kapasitas seseorang untuk mengontrol dan



membuat keputusan. Oleh karena itu pada dimensi kontrol perlu menganalisis relasi kuasa dan norma sosial yang berlaku pada masyarakat, situasi dan kondisi tertentu di semua tingkatan.

- **Manfaat:** kapasitas seseorang untuk memperoleh manfaat sosial, budaya, ekonomi, politik, sebagai hasil dari akses, partisipasi dan kontrol dari penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia dan terpenuhinya kebutuhan praktis seperti makanan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, serta kepentingan strategis yang bersifat jangka panjang, misalnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja dengan disabilitas, perempuan, anak, lansia dan kelompok marginal, yang tertuang didalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Selain ke empat dimensi tersebut, kebijakan/peraturan, norma sosial, relasi kuasa, kebutuhan juga menjadi dimensi penting dalam menganalisis dan mengatasi isu ketimpangan GEDSI termasuk faktor-faktor penyebabnya, baik di tingkat individu, keluarga, komunitas, organisasi dan masyarakat serta negara.

Contoh:

Terdapat **relasi kuasa yang tidak setara** antara penyandang disabilitas dan orang tanpa disabilitas, serta **norma sosial** dan perilaku diskriminatif (**abelisme**) di mana penyandang disabilitas sering kali dipandang tidak mampu, dan tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Penyandang disabilitas sering kali tidak dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga **kebijakan** yang dibuat tidak responsif terhadap **kebutuhan-kebutuhan** penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana, serta fasilitas layanan publik sering kali didasarkan hanya pada standar kebutuhan orang tanpa disabilitas dan tidak aksesibel. Akibatnya, penyandang disabilitas semakin terpinggirkan, tidak dapat **mengakses** layanan publik dan **berpartisipasi** secara aktif dan bermakna dalam berbagai kegiatan pembangunan, serta diwakili oleh orang lain dalam mengambil keputusan penting atas dirinya, bahkan seringkali tanpa persetujuan (**kontrol**) yang bersangkutan; sehingga kebutuhan mereka tidak terakomodasi dan mereka tidak dapat merasakan **manfaat** pembangunan secara adil dan setara dengan orang-orang lain.

Langkah-Langkah Analisis GESDI

Langkah 1: Mengidentifikasi dan Memahami Karakteristik Masyarakat yang Terkena Dampak atau Berpotensi Terkena Dampak dari Suatu Kebijakan / Program / Anggaran / Kegiatan

Kelompok marginal tidak homogen, untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal, maka hal yang perlu dilakukan pada Langkah 1 adalah:

- Memahami identitas individu /kelompok dalam masyarakat, bagaimana identitas tersebut menyebabkan orang/kelompok tertentu memperoleh keistimewaan dan/atau sebaliknya mengalami marginalisasi pada waktu, tempat, situasi dan kondisi tertentu, serta mengidentifikasi siapa kelompok masyarakat yang memiliki keistimewaan tersebut, siapa kelompok marginal, dan siapa diantara kelompok marginal tersebut yang paling tereksklusi dan tertinggal.
- Menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan, perantara atau perwakilan jaringan atau kelompok, seperti organisasi penyandang disabilitas, kelompok masyarakat adat, organisasi hak-hak perempuan dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak dari suatu kebijakan/program/anggaran/kegiatan.

Instrumen : [Alat 1: Latihan Interaktif: Memahami Identitas](#)

Dalam mengidentifikasi dan memahami karakteristik masyarakat pada lokasi sasaran, perlu mengumpulkan data terpilah dan informasi sebagai pembuka wawasan terkait dengan karakteristik demografis, sistem sosial, budaya, ekonomi, politik dan pemerintahan, termasuk norma sosial budaya, adat istiadat yang terkait GESDI, baik yang dapat menghambat atau mendukung GESDI, pola pembagian kerja gender dan pengambilan keputusan di ranah domestik dan publik, serta kebijakan / program / kegiatan yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya di luar pemerintah, dan sebagainya. Pada tahap ini, melakukan konsultasi dengan para pemangku kepentingan dan perwakilan kelompok marginal, dan seluruh anggota masyarakat yang memiliki potensi terkena dampak dari pembangunan yang akan dilakukan, perlu dilakukan sejak awal.

Analisis dilakukan berdasarkan data terpilah jenis kelamin, gender, disabilitas, umur dan lokasi (jika memungkinkan) yang telah dikumpulkan. Alat yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi dan memahami serta menganalisis karakteristik masyarakat yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak dari suatu program dapat dilihat pada [Alat 3: Contoh pertanyaan pengumpulan data pembuka wawasan](#).

Instrumen : [Alat 3: Contoh Pertanyaan Pengumpulan Data Pembuka Wawasan](#)

Langkah 2: Mengidentifikasi Isu GESDI dan Implikasi Kebijakan/Program/Anggaran /Kegiatan pada Orang/Kelompok yang Memiliki Identitas yang Berbeda-Beda

Untuk mengidentifikasi isu GESDI, kegiatan, program atau kebijakan, tanyakan apakah semua orang (apapun identitasnya), dengan menggunakan empat dimensi:

Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM)



Telah dan/atau akan mendapatkan **akses** ke layanan, sumber daya dan peluang yang mereka butuhkan



Telah dan/atau akan dapat **berpartisipasi** dalam diskusi, perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi sejauh yang mereka inginkan



Telah dan/atau akan memiliki **kontrol** yang memadai atas sumber daya, kegiatan, proses dan keputusan yang akan memengaruhi kehidupan mereka



Telah dan/atau akan mendapatkan **manfaat** secara setara dengan orang lain

Alat Roda identitas dapat digunakan untuk membantu diskusi ini, dan ingat juga prinsip partisipasi inklusif, kesetaraan dan non-diskriminasi – libatkan orang dalam diskusi ini.

Instrumen : [Alat 1: Latihan Interaktif: Memahami Identitas](#)

Langkah 3: Mengidentifikasi dan Analisis Data dan Informasi yang Tersedia

Analisis GESDI membutuhkan data dan informasi yang terpilah (jenis kelamin, gender, disabilitas, umur, lokasi geografis, dan sebagainya) terkait dengan isu GESDI yang akan diatasi. Untuk itu pastikan data terpilah yang dibutuhkan tersedia, yang dapat disusun dengan cara:

- Mengidentifikasi data dan analisis yang tersedia untuk melihat apa yang dapat digunakan dan mengidentifikasi ketimpangan / kesenjangan.
- Mengumpulkan data baru atau melakukan analisis tambahan terhadap data yang ada.
- Berkonsultasi dengan pimpinan setempat dan layanan yang tersedia, seperti dinas catatan sipil, kesehatan, pendidikan, dan layanan perlindungan sosial; penyedia layanan disabilitas, dan layanan terkait perlindungan terhadap kekerasan dan isu GESDI lainnya.

Dalam melakukan pengumpulan dan analisis data perlu melibatkan partisipasi multipihak, termasuk orang/kelompok yang terpinggirkan. Dalam melibatkan kelompok disabilitas, yang sulit dijangkau atau terpinggirkan diperlukan upaya-upaya khusus untuk memastikan mereka dapat berpartisipasi, misalnya dengan menyediakan akomodasi layak, transportasi, pendamping, juru bahasa isyarat, dan sebagainya ([Lihat data responsif GESDI](#))

Langkah 4: Menetapkan dan Menyusun Prioritas Isu yang Perlu Dianalisis Lebih Lanjut

Gunakan informasi yang dikumpulkan untuk menentukan dan menyusun prioritas, kesenjangan, ketidaksetaraan, atau eksklusi yang akan dijadikan sebagai fokus utama dari analisis. Sekali lagi, pastikan mempertimbangkan ragam identitas yang berlapis dan berkelindan (interseksional), misalnya:

- Orang tanpa identitas hukum, misal KTP, tidak dapat **mengakses** layanan dasar termasuk kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta perbankan dan kredit, dengan perbedaan yang dialami pada berbagai tahap siklus hidup mereka: misalnya. Wanita usia subur – layanan kesehatan; anak-anak – pendidikan; lanjut usia – perlindungan sosial dan kesehatan; rumah tangga dengan orang tua tunggal – perlindungan sosial, perbankan dan kredit.
- Penyandang disabilitas, dengan keragaman identitas yang dimiliki misalnya berdasarkan jenis kelamin, gender, umur, etnis, agama, lokasi geografis yang tidak dapat **berpartisipasi** dalam proses musyawarah dan perencanaan desa.
- Pekerja migran perempuan termasuk mereka yang berpendidikan rendah, bercerai, perempuan, dan mereka yang berada di daerah terpencil tidak memiliki **kendali** / kontrol atas dana yang mereka kirimkan ke rumah.

- Keluarga dari minoritas agama, etnis, atau budaya dan pendatang tidak dimasukkan dalam data penduduk desa dan tidak **mendapat manfaat** dari pembangunan desa, bantuan dan rehabilitasi bencana, atau kegiatan masyarakat lainnya.

Langkah 5: Mengidentifikasi Faktor Penyebab dan Faktor Pendukung (*Enabler*) Pemecahan Masalah dengan Menggunakan Kerangka Kerja Multi-Dimensi

Ketidaksetaraan, eksklusi disabilitas dan eksklusi sosial merupakan isu yang kompleks, yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan dan terkait satu sama lain. Penggunaan kerangka kerja multi-dimensi dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya isu GEDSI serta faktor pendukung untuk mengatasi isu GEDSI.

Kerangka kerja multi-dimensi mencakup empat kuadran atau dimensi:

- **Personal:** Terkadang juga disebut sebagai ‘agensi’. Hal ini termasuk kepercayaan diri individu dan pemahaman tentang hak dan posisi dirinya sendiri, serta pengetahuan, keterampilan, dan komitmen diri.
- **Sumber daya / layanan:** berupa akses dan kontrol terhadap aset dan sumber-sumber daya, termasuk informasi, uang, peluang, layanan, pasar, atau kredit, dan sebagainya.
- **Kultural / masyarakat:** merupakan sumber kekuasaan yang seringkali tersembunyi – sebagai aturan tidak tertulis yang menentukan bagaimana fungsi keluarga dan masyarakat. Hal ini juga termasuk sistem nilai budaya dan norma sosial terkait dengan peran dan relasi sosial dan kekuasaan berdasarkan gender, disabilitas dan identitas sosial lainnya, mekanisme kepemimpinan informal, pengambilan keputusan, dan sanksi.
- **Struktural / negara:** merupakan kekuasaan dan fungsi negara yang terlihat dan mekanisme formal untuk kepemimpinan dan pembuatan keputusan, termasuk undang-undang, kebijakan, tata kelola, program, dan mekanisme akuntabilitas.

Kerangka kerja analisis multi dimensi ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam melakukan analisis GEDSI karena memiliki landasan bagi perubahan sosial dan perilaku.

Gambar 2: Kerangka Kerja Analisis Multi Dimensi



Untuk melakukan perubahan transformatif, maka perlu mempertimbangkan untuk melakukan intervensi di semua bidang pada keempat kuadran tersebut.

Tabel di bawah ini mencantumkan berbagai pertanyaan yang dapat digunakan untuk memandu analisis GESDI tentang masalah atau isu tertentu.

Tabel 2 Pertanyaan panduan untuk analisis GESDI dengan menggunakan kerangka kerja empat kuadran

Kuadran	Pertanyaan
(A) Personal / internal	<p>Apa keyakinan internal yang orang miliki tentang hak dan kewenangan mereka?</p> <p>Apa keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan yang dimiliki seseorang terkait dengan isu atau masalah yang mereka hadapi?</p> <p>Apa pengalaman pribadi seseorang tentang diskriminasi yang berkaitan dengan identitas yang berbeda-beda?</p>

- (B) Fisik / sumber daya
- Layanan atau fasilitas apa saja yang relevan, misal pendidikan, kesehatan, pekerjaan? Pertimbangkan juga layanan dasar lainnya seperti, transportasi, akses terhadap informasi, kredit, dan kebutuhan mendasar lainnya seperti makanan, tempat tinggal, air bersih dan sanitasi.
- Apakah layanan tersebut dapat diakses oleh semua orang yang membutuhkannya?
- Informasi apa yang tersedia? Apakah informasi tersebut aksesibel dan menjangkau bagi semua orang yang membutuhkannya?
- (C) Kultural / masyarakat
- Apa aturan tidak tertulis yang memengaruhi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat individu dan kelompok dengan identitas yang berbeda-beda?
- Apakah norma sosial terkait identitas, misal gender, disabilitas, umur yang menonjol di daerah tersebut? (Lihat juga [Alat 4: Mengidentifikasi dan Mengukur Norma Sosial](#) dan [Alat 5: Mengukur Norma Sosial Gender](#))
- Apakah perilaku yang pantas untuk perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas yang menurut masyarakat setempat sesuai dengan norma sosial yang berlaku? Bagaimana keyakinan mengenai perilaku yang ideal atau pantas ini untuk perempuan, laki-laki dan penyandang disabilitas memengaruhi perilaku mereka?
- Bagaimana masyarakat menegakkan norma-norma sosial termasuk norma gender dan sanksi bagi orang-orang yang tidak mengikuti norma-norma tersebut? Bagaimana norma-norma ini memengaruhi status dan kondisi perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas anak perempuan dan anak laki-laki?
- Apakah persepsi dan keyakinan sosial yang membentuk harapan dan aspirasi perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, misalnya terkait dengan pendidikan, pekerjaan, perkawinan dan keluarga?
- Apakah dan bagaimana norma sosial termasuk norma sosial gender dapat menimbulkan diskriminasi, stigmatisasi, marginalisasi, eksklusi terhadap perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya?
- Bagaimana norma sosial gender akan memengaruhi pencapaian dan keberlanjutan hasil dari program yang akan dilakukan?
- Bagaimana hasil dari program yang akan dilakukan memengaruhi status dan kondisi perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya (termasuk hasil positif dan negatif diluar perkiraan)
- Apakah saja sistem dan praktik agama, budaya, dan sosial yang memengaruhi sikap dan perilaku?

Apa saja jaringan dan hubungan antara berbagai pemangku kepentingan yang berbeda ?

Siapa yang memiliki wewenang membuat keputusan di ranah domestik dan publik ? (jenis kelamin, gender, disabilitas, umur, dan sebagainya). Bagaimana perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas berpartisipasi dalam pengambilan keputusan? Siapa yang memperoleh manfaat? Apakah ada yang perlu diubah agar proses dan hasil pengambilan keputusan dapat lebih adil, setara dan inklusif.

Apakah perempuan, laki-laki dan penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya memiliki perwakilan dalam struktur kepemimpinan di tingkat komunitas dan masyarakat? Apa peran dan posisi yang dimiliki mereka masing-masing pada struktur kepemimpinan tersebut?

Apakah informasi, media komunikasi, gambar-gambar, dan pesan-pesan publik lainnya yang ada di masyarakat atau yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan dalam masyarakat sudah bebas dari stereotip, bias, diskriminasi terhadap orang/kelompok tertentu, misal perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, dan sebagainya?

(D) Struktural / Negara

Apa saja lembaga formal dan pengembalian tugas yang terkait dengan GESDI?

Apa saja kebijakan, hukum dan peraturan tertulis yang ada, yang relevan dengan GESDI?

Apakah lembaga, undang-undang, kebijakan, dan peraturan ini inklusif? Apakah secara khusus menargetkan bidang ketidaksetaraan dan eksklusi ?

Apakah ada pengakuan formal atas identitas yang berbeda? Apakah positif atau negatif?

Apakah ada hubungan formal antara perantara/kelompok perwakilan dan lembaga?

Instrumen: lihat juga

[Alat 4: Mengidentifikasi dan Mengukur Norma Sosial](#)

[Alat 5: Mengukur Norma Sosial Gender](#)

Langkah 6: Menyusun Prioritas dan Mengidentifikasi Titik Masuk (*Entry Point*)

Langkah 6 adalah mengidentifikasi prioritas dan titik masuk (*entry point*) serta intervensi yang akan dilakukan untuk mengatasi ketimpangan GEDSI. Dalam mengidentifikasi dan menyusun prioritas perlu mempertimbangkan/berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- Kekuatan dan sumber daya organisasi – khususnya anggaran dan staf
- Hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya
- Pengetahuan tentang apa yang dilakukan orang lain
- Pengetahuan tentang strategi yang efektif untuk menciptakan perubahan yang diinginkan
- Penilaian tentang urutan upaya yang terbaik, berdasarkan pengalaman sendiri dan bukti yang tersedia.

Pada langkah ini, penting untuk membuat serangkaian prioritas yang realistis. Lebih baik melakukan beberapa hal dengan baik, daripada mencoba melakukan semuanya namun tidak membawa hasil yang maksimal. Jika memungkinkan, libatkan perwakilan kelompok yang mengalami isu atau masalah GEDSI yang telah diidentifikasi.

Mereka bisa memberikan saran dan masukan tentang hambatan utama apa yang dihadapi, untuk membantu menentukan fokus dari upaya yang akan dilakukan dalam mengatasi isu GEDSI.

Jika prioritas yang akan dilakukan adalah memengaruhi lembaga dan praktik atau kebijakan formal dan informal, maka perlu melakukan analisis kekuasaan.

Instrumen : [Alat 2: Pengenalan tentang Analisis Kekuasaan](#)

Tahap 3: Menyusun Dokumen Analisis Situasi GESDI

Setelah melakukan analisis GESDI, maka tahap selanjutnya adalah menyusun laporan hasil analisis situasi GESDI. Laporan hasil analisis GESDI merupakan bagian integral dari dokumen perancangan/desain program. Untuk program yang besar dan jangka panjang, dengan lingkup kerja yang luas dan kompleks, laporan analisis situasi GESDI yang komprehensif disusun sebagai dokumen tersendiri, yang perlu diperbarui secara rutin, misalnya 2 tahun sekali, sesuai dengan perkembangan GESDI yang terjadi.

Tahap 4: Menyusun Teori Perubahan GESDI

Teori perubahan GESDI disusun pada tahap perancangan/ desain proyek untuk menghubungkan antara hasil program GESDI dengan kegiatan yang akan dilakukan dan menjelaskan bagaimana dan mengapa perubahan yang diinginkan akan terjadi (lihat tabel dibawah ini).





		<p>Contoh output:</p> <p># Kelompok marginal yang berpartisipasi dalam pelatihan GESDI</p> <p>% partisipasi kelompok marginal dalam perencanaan pembangunan desa (dipilah berdasarkan, jenis kelamin/ gender, disabilitas, umur, lokasi).</p>	<p>pembangunan , atau perubahan-perubahan yang diharapkan terjadi pada masyarakat.</p> <p>Jangka menengah misal (1-5 tahun)</p>	<p>yang akan akan dilakukan.</p>
<p>Rencana kerja</p>			<p>Hasil yang diharapkan</p>	

Teori perubahan transformatif GESDI disusun berdasarkan analisis GESDI, yang menekankan bahwa pengalaman hidup orang/kelompok berbeda-beda dibentuk oleh identitas, relasi kuasa dan hubungan sosial, serta berbagai faktor-faktor sosial lainnya, sehingga kondisi yang dibutuhkan untuk mewujudkan perubahan bagi perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya pun berbeda-beda. Dalam menyusun teori perubahan GESDI perlu menggunakan perspektif interseksionalitas agar strategi, pendekatan, kebijakan / program / kegiatan/ anggaran dapat disusun dan secara cermat, sesuai dengan konteks, situasi dan kebutuhan (tidak mengeneralisasi), tepat sasaran, dan menjangkau kelompok perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya yang berbeda-beda yang paling tereksklusi dan tertinggal.³⁰



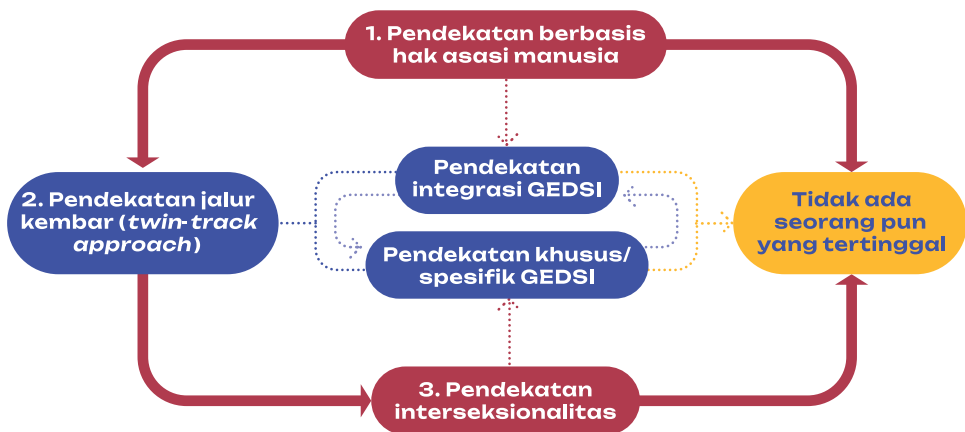
Instrumen: Alat 6: Contoh Templat Teori Perubahan

³⁰ International Labour Organization. ILO Brief (September 2022). [Theory of Change towards a transformative agenda for gender equality in the world of work](#)

Tahap 5: Menyusun Strategi dan Pendekatan GESDI

Tahap ke 5 adalah menyusun strategi dan pendekatan pengarusutamaan GESDI yang akan digunakan untuk mencapai tujuan akhir yang diharapkan. Untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal, pengarusutamaan GESDI sebagai strategi pembangunan diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan multi (*multiple approach*), yaitu 1) pendekatan hak asasi manusia; 2) pendekatan jalur kembar (*twin-track*); 3) pendekatan interseksionalitas. Ketiga pendekatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain guna melakukan perubahan transformatif GESDI.

Gambar 3: Kerangka strategi dan pendekatan Pengarusutamaan GESDI



1. **Pendekatan hak asasi manusia** merupakan landasan utama bagi keseluruhan proses penyusunan dan pelaksanaan strategi dan pendekatan pengarusutamaan GESDI agar pembangunan diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal dan instrumen hak asasi manusia yang sudah disepakati, misalnya CEDAW, CRPD, CRC, dan sebagai dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dan pemberdayaan memberdayakan kelompok marginal seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan sebagainya.

2. **Pendekatan jalur kembar/ganda (*twin-track*):** terdiri dari: 1) pengintegrasian aspek GESDI ke dalam proses perancangan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari suatu kebijakan/ program/ anggaran/ kegiatan, di semua sektor pembangunan dan di dalam organisasi. Misalnya mengintegrasikan GESDI dalam kebijakan, sistem dan tata kelola penyelenggaraan program termasuk sumber daya manusia, penyediaan barang, jasa dan layanan; 2) **intervensi khusus GESDI** ditujukan untuk mengatasi isu GESDI khusus, untuk mengurangi ketimpangan yang ada, serta memperbaiki kondisi dan memberdayakan kelompok marginal tertentu, misalnya penyandang disabilitas, perempuan kepala rumah tangga, perempuan masyarakat adat, kekerasan berbasis gender terhadap anak, perempuan dan penyandang disabilitas, dan sebagainya. Dalam melaksanakan program khusus GESDI, misalnya program pemberdayaan anak berhadapan dengan hukum, maka juga perlu mengintegrasikan aspek GESDI dalam keseluruhan proses perancangan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, termasuk sistem, prosedur dan tata kelola penyelenggaraan program tersebut.
3. **Pendekatan interseksionalitas:** membantu dalam mengidentifikasi siapa sesungguhnya kelompok marginal yang paling tereksklusi dan tertinggal dilihat berdasarkan keterkaitan identitas, relasi kuasa, dan faktor-faktor lingkungan dan struktur masyarakat yang lebih luas yang menyebabkan terjadinya diskriminasi berlapis yang dialami oleh kelompok marginal. Dengan menggunakan pendekatan interseksionalitas maka dapat diidentifikasi pemangku kepentingan dan sektor-sektor terkait yang perlu dilibatkan dalam mewujudkan GESDI secara tepat.

Informasi lebih lengkap tentang pendekatan pengarusutamaan GESDI dapat dilihat pada Buku I: Bab 3 tentang Pengarusutamaan Gender, Inklusi Disabilitas dan Inklusi Sosial

Tahap 6: Menyusun Rencana Aksi GESDI

Rencana aksi GESDI (*GESDI action plan*) merupakan alat perencanaan untuk memastikan GESDI sebagai bagian integral dan tidak terpisahkan dari penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan program/ anggaran/ kegiatan, yang memberikan

Mengapa perlu menyusun rencana aksi GEDSI?

- Membantu mengidentifikasi dan memonitor pelaksanaan strategi dan pendekatan, *input*, kegiatan, serta indikator dan target yang perlu dicapai untuk mengatasi ketimpangan GEDSI, serta memastikan program yang dilakukan memiliki kompetensi GEDSI, seperti bekerja dengan penyandang disabilitas, melibatkan tenaga penasehat/ ahli GEDSI, dan sebagainya.
- Membantu mengidentifikasikan sumber daya dan alokasi anggaran, serta anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pengarusutamaan GEDSI.
- Memastikan semua kegiatan, produk dan layanan program, termasuk teknologi aksesibel terhadap kebutuhan semua orang, misalnya, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, dan sebagainya.
- Meningkatkan ketersediaan akses yang setara terhadap sumber-sumber daya dan layanan publik termasuk pengembangan kapasitas, sarana dan prasarana, infrastruktur, dan teknologi inklusif.
- Memperkuat keberlanjutan melalui pendekatan partisipasi inklusif dari bawah oleh kelompok marginal, termasuk perempuan akar rumput, penyandang disabilitas, organisasi perempuan, organisasi penyandang disabilitas, organisasi pemuda dan anak, serta organisasi masyarakat sipil lainnya, serta dari atas oleh pemerintah di setiap bidang dan tingkatan.

gambaran peta jalan (*road map*) untuk mencapai hasil dan tujuan GEDSI.

Rencana aksi GEDSI disusun berdasarkan hasil analisis GEDSI, yang memuat antara lain *output*, kegiatan-kegiatan, indikator dan target, sumber-sumber daya yang dibutuhkan, periode/jangka waktu pelaksanaan. Format penyusunan rencana aksi GEDSI bervariasi, dapat berbeda-beda, tergantung tujuan, kebutuhan, serta kompleksitas dari isu GEDSI yang akan diatasi. Terlepas dari format yang dipakai, rencana aksi GEDSI harus jelas, mudah dipahami, dan berhubungan dengan komponen, tujuan kegiatan dan hasil akhir (*outcome*) yang diharapkan.

Instrumen: [Alat 7: Contoh Templat Rencana Aksi GESDI](#)

Lembar Kerja

Lembar kerja: Rencana Aksi GESDI

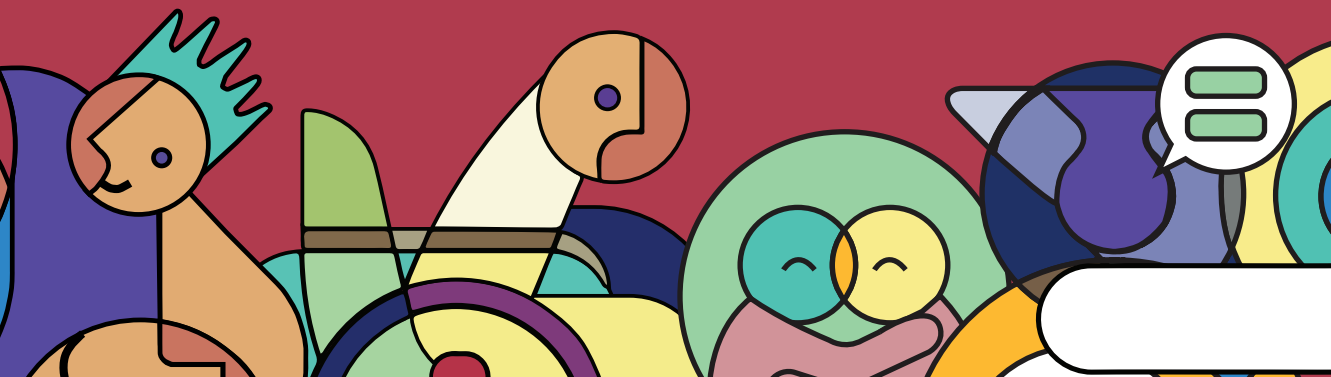
Pikirkan tentang program/proyek yang pernah atau sedang Anda kerjakan. Apakah rencana aksi GESDI disusun pada saat perancangan program/proyek? Jika iya, bagaimana rencana aksi tersebut memengaruhi pelaksanaan dan hasil (*outcome*) dari program/proyek? Jika tidak, apakah terdapat dampak negatif atau kesempatan yang hilang dalam mewujudkan GESDI? Menurut Anda bagaimana rencana aksi GESDI dapat memperkuat organisasi atau sektor pembangunan yang sedang Anda kerjakan?



03 **Perencanaan dan Penganggaran Responsif GEDSI**

Bab 3 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis dalam menyusun perencanaan dan penganggaran responsif GEDSI.

Model *Perencanaan dan Penganggaran Responsif GEDSI* (PPRGI), yang dipakai dalam buku pegangan ini mengadaptasi model Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia. Dengan mengadaptasi model PPRG pemerintah, maka dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis organisasi masyarakat sipil dan para pemangku kepentingan lainnya dalam mengintegrasikan dan mengadvokasi perencanaan dan penganggaran GEDSI untuk memperkuat pelaksanaan dan hasil PPRG yang dilaksanakan oleh pemerintah.



Apa Itu Perencanaan dan Penganggaran Responsif GESDI?

PPRGI merupakan instrumen untuk mengatasi isu GESDI yang dimulai dengan mengidentifikasi perbedaan antara perempuan dan laki-laki termasuk anak-anak, pemuda, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya dalam memperoleh akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan, dengan tujuan untuk mewujudkan GESDI.



Hal yang perlu diingat:

- PPRGI bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki, tetapi merupakan perencanaan dan anggaran inklusif berdasarkan strategi pengarusutamaan GESDI dengan menggunakan pendekatan jalur kembar (*'twin-track'*) berbasis hak asasi manusia dengan mempertimbangkan keragaman identitas perempuan dan laki-laki (jenis kelamin, gender, disabilitas, umur, lokasi geografis dan karakteristi sosial lainnya)
- PPRGI merupakan upaya untuk mengintegrasikan perspektif GESDI di dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang sudah ada, serta pengendaliannya melalui monitoring dan evaluasi.
- PPRGI bukanlah tujuan akhir, melainkan kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial dalam keseluruhan proses dan tahapan penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan, program, kegiatan dan manfaat pembangunan.



Landasan Hukum dan Kebijakan

Berbagai landasan hukum dan kebijakan bagi perencanaan dan penganggaran responsif GESDI antara lain sebagai berikut:³¹

³¹ Kementerian Keuangan (2023); dan Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2020). Buku Panduan. Perencanaan & Penganggaran Responsif Gender.

Dasar hukum dan kebijakan:

- ◇ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW / *Convention on the Elimination Against Women*).
- ◇ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- ◇ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menetapkan sistem perencanaan multi tahunan nasional yang berbasis prioritas, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- ◇ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menetapkan adanya audit kinerja disamping audit keuangan lainnya yang kemudian memberikan peluang untuk mengintegrasikan audit gender ke dalam audit kinerja.
- ◇ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pendahuluan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025.
- ◇ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- ◇ Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- ◇ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
- ◇ Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- ◇ Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- ◇ Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- ◇ Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- ◇ Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

- ◇ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- ◇ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.02/2012 mengenai Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- ◇ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, dan peraturan yang berlaku.
- ◇ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Tujuan Perencanaan dan Penganggaran Responsif GESDI

Perencanaan dan penganggaran responsif GESDI dimaksudkan untuk mendorong pembangunan yang lebih adil dan inklusif, dan meningkatkan partisipasi aktif dan bermakna semua pemangku kepentingan, termasuk kelompok marginal dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan dan evaluasi. Adapun tujuan dari perencanaan dan penganggaran responsif GESDI (PPRGI) adalah:

Mewujudkan GESDI melalui proses perencanaan dan penganggaran yang adil, setara dan inklusif: PPRGI membantu perencana dan pelaksana pembangunan dalam mengidentifikasi dan menganalisa isu GESDI serta kebutuhan perempuan dan laki-laki, anak-anak, pemuda, lansia, penyandang disabilitas, kelompok marginal termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga ketimpangan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan dapat dicegah dan/atau diatasi

Mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan berkelanjutan: PPRGI membantu dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling tertinggal dan menentukan kelompok sasaran, menyusun rencana aksi dan indikator responsif GESDI untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan kebijakan/program/kegiatan,

serta dalam menentukan kelompok sasaran dan para pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dalam proses pembangunan.

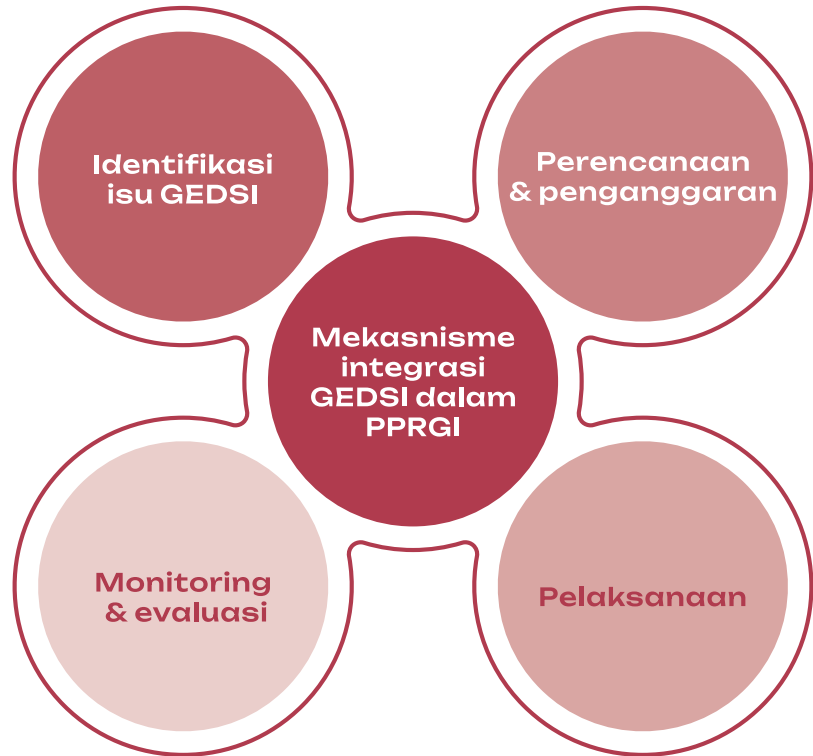
Memperkuat komitmen dan akuntabilitas: PPRGI sebagai alat untuk memperkuat komitmen dan akuntabilitas para pimpinan dan pengambil keputusan, perencana dan pelaksana pembangunan dalam mewujudkan GESDI sesuai dengan kebijakan dan komitmen di tingkat internasional, nasional dan internal organisasi.



Mekanisme Pengintegrasian GESDI dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif GESDI

Aspek GESDI diintegrasikan pada tahap:

- **Identifikasi isu:** dengan melakukan analisis GESDI berdasarkan pengumpulan dan analisa data yang tepat.
- **Perencanaan dan penganggaran,** yang tertuang dalam anggaran responsif GESDI dan GESDI Action Budget (GAB).
- **Pelaksanaan,** dengan memperhatikan aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM).
- **Monitoring dan evaluasi,** dengan menggunakan berbagai indikator responsif GESDI.



Komponen Perencanaan dan Penganggaran Responsif GESDI

Terdapat dua komponen pokok perencanaan dan penganggaran responsif GESDI (PPRGI), yaitu: 1) Perencanaan responsif GESDI; 2) Penganggaran responsif GESDI.



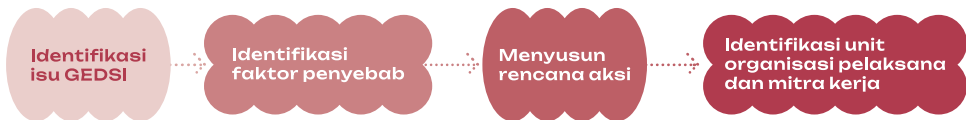
Apa itu Perencanaan Responsif GEDSI?

Perencanaan responsif GEDSI adalah suatu proses pengambilan keputusan dan perencanaan program/kegiatan yang dalam penyusunan dan penyelenggaraannya dilakukan untuk mengatasi isu GEDSI dalam proses pembangunan, yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan mengakomodasi perbedaan dan keragaman identitas, pengalaman, aspirasi, kebutuhan perempuan, dan laki-laki, anak-anak, pemuda, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok marginal lainnya yang tertinggal dalam pembangunan.³²

Penerapan Perencanaan Responsif GEDSI

Terdapat empat langkah pokok penyusunan perencanaan responsif GEDSI³³

Empat Langkah Pokok Perencanaan Responsif GEDSI



Langkah	Kegiatan
Langkah 1: Identifikasi isu GEDSI	Identifikasi isu GEDSI tertentu, misalnya dengan merujuk pada indeks pembangunan terkait GEDSI, misalnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Pembangunan Anak (IPA), Indeks pembangunan pemuda, disabilitas, lansia dan sebagainya, serta data dan informasi dari lembaga dan pemberi layanan di tingkat lokal, dan masyarakat. <ul style="list-style-type: none"> • Akses: identifikasi apakah kebijakan/program/kegiatan pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil, setara dan inklusif bagi semua orang/kelompok (perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses informasi, sumber daya dan layanan publik.

³² Diadaptasi dari Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2020). Buku Panduan. Perencanaan & Penganggaran Responsif Gender

³³ Diadaptasi dari revitalisasi PPRG yang disusun oleh Pemerintah (Bappenas dan KPPPA), yang disampaikan pada Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi Perencana di Kementerian PPN/Bappenas Bogor, 12 Juni 2023

Langkah	Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrol: identifikasi apakah kebijakan/program/kegiatan memberikan kesempatan yang adil, setara dan inklusif kepada bagi semua orang (perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah), untuk mengontrol dan mengambil keputusan atas penggunaan sumber daya pembangunan dan layanan publik. • Partisipasi: identifikasi apakah kebijakan/ program/kegiatan pembangunan memberikan kesempatan secara adil, setara, dan inklusif kepada bagi semua orang (perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah), untuk mengontrol dan mengambil keputusan atas penggunaan sumber daya pembangunan dan layanan publik. • Manfaat: identifikasi apakah kebijakan/program/kegiatan memberikan manfaat yang adil, setara dan inklusif bagi semua orang (perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah). <p>Dalam mengidentifikasi dan menganalisa isu dan ketimpangan GESDI perlu mengumpulkan dan menyajikan data dan Informasi kualitatif dan kuantitatif berbasis data terpilah (seks, gender, disabilitas, umur, lokasi, dan sebagainya) sebagai data pembuka wawasan, yang bersumber dari data primer (dikumpulkan untuk tujuan ini) dan data sekunder (yang telah tersedia). Data pembuka wawasan dapat berupa data statistik, baseline survey, hasil <i>Focused-Group Discussion</i> (FGD), review pustaka, hasil penelitian, kajian dan assesmen, dan hasil dari monitoring dan evaluasi</p>
<p>Langkah 2: Identifikasi faktor penyebab</p>	<p>Identifikasi dan analisa berbagai faktor penyebab ketimpangan GESDI di berbagai tingkatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Individu: terkait pembagian kerja gender (disabilitas dan non-disabilitas), relasi kuasa, persepsi, sikap pandang, dan tindakan diskriminatif terhadap GESDI • Komunitas dan masyarakat: relasi kuasa, persepsi, sikap pandang, dan tindakan diskriminatif, marginalisasi dan eksklusi, norma dan nilai sosial budaya dan keagamaan yang bias gender dan diskriminatif, termasuk stigma dan kekerasan berbasis Identitas (seks, gender, disabilitas, umur, lokasi, dan identitas sosial lainnya) terhadap orang/kelompok masyarakat tertentu (misalnya perempuan, laki-laki, anak-anak, disabilitas, lansia, masyarakat adat) yang menghambat GESDI. • Organisasi: identifikasi dan analisa faktor penghambat GESDI di internal organisasi/ lembaga, misalnya dilihat dari aspek: kebijakan, peraturan, anggaran, budaya organisasi, SoP, sistem perekrutan dan pengadaan (<i>procurement</i>) yang bias gender dan diskriminatif, lemahnya komitmen para pimpinan/

Langkah	Kegiatan
	<p>pengambil keputusan, perencana, pelaksana, dan staf terkait GEDSI, lemahnya kapasitas GEDSI dalam lingkungan organisasi (pimpinan/ pengambil keputusan, perencana, pelaksana dan staf), terbatasnya ketersediaan data terpilah, tidak ada dan/atau belum berfungsinya struktur pengarusutamaan GEDSI, seperti: sekretariat dan pengurus,</p> <ul style="list-style-type: none"> • kelompok kerja (pokja), belum optimalnya koordinasi lintas bidang/sector, dan sebagainya. • Negara: identifikasi dan analisa faktor penghambat GEDSI terkait dengan aspek kebijakan/program/kegiatan, dan anggaran terkait dengan: (i) kerangka regulasi; (ii) kerangka pelayanan umum; (iii) kerangka investasi fisik; dan (iv) kerangka investasi SDM dan Sosial Ekonomi); (v) Administrasi Internal Pemerintahan K/L; dan (vi) Administrasi Internal Pemerintahan (antar K/L dan antar Pemerintah Pusat dan Daerah). • Lingkungan fisik dan komunikasi: identifikasi dan analisa faktor penghambat GEDSI terkait dengan letak geografis yang kurang menguntungkan (3T, rentan terhadap bencana dan konflik), tidak tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur, transportasi dan komunikasi yang inklusif, dan sebagainya.
<p>Langkah 3: Penyusunan rencana aksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Susun rencana aksi untuk mengatasi isu GEDSI dengan merujuk pada hasil identifikasi faktor-faktor penyebab yang dihasilkan di Langkah 2. • Rencana aksi dapat disusun dengan menggunakan kerangka kerja logis. Lihat Bab 2, Tahap 4 tentang Menyusun ToC dan kerangka logis. • Tetapkan baseline/data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan/rencana aksi. Data dasar dapat diambil dari data pembuka wawasan yang menunjang capaian kinerja kebijakan/program/kegiatan • Tetapkan indikator responsif GEDSI baik kuantitatif dan kualitatif sebagai ukuran untuk memantau kemajuan dan capaian dari rencana aksi <i>Penjelasan lebih lengkap tentang rencana aksi GEDSI dapat di lihat Bab 2, Tahap 6: Menyusun rencana aksi GEDSI</i>
<p>Langkah 4: Identifikasi unit organisasi dan mitra kerja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi unit organisasi pelaksana rencana aksi, termasuk mengidentifikasi Kementerian/Lembaga , OMS, organisasi perempuan, organisasi penyandang disabilitas, dan mitra kerja lain yang relevan untuk mendukung dan bekerjasama dalam melaksanakan agenda rencana aksi.

Contoh templat penyusunan perencanaan responsif GEDSI yang dapat dipakai sesuai dengan empat Langkah di atas.

Tabel 3 Contoh Templat Penyusunan Perencanaan Responsif GESDI

Komponen	Keterangan
Isu GESDI	Memuat penjelasan tentang isu GESDI yang sudah diidentifikasi berdasarkan analisis GESDI interseksional : <ul style="list-style-type: none"> • Akses • Partisipasi • Kontrol • Manfaat
Faktor-faktor penyebab	Memuat penjelasan tentang faktor-faktor penyebab (individu, komunitas, organisasi/masyarakat, negara, lingkungan fisik dan komunikasi sesuai dengan konteks)
Rencana Aksi	Memuat penjelasan tentang rencana aksi yang akan dilakukan (<i>Dampak/goal, outcome, output, kegiatan dan input</i>).
Unit pelaksana dan mitra kerja	Memuat penjelasan tentang unit pelaksana dan mitra kerja (lembaga pemerintah, dan non pemerintah, OMS, organisasi perempuan, disabilitas, swasta, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, agama, adat, media masa, influencer, champion, dan sebagainya)

Apa Itu Penganggaran Responsif GESDI?

Penganggaran responsif GESDI adalah anggaran yang tanggap terhadap kebutuhan semua orang/kelompok termasuk perempuan, laki-laki, anak-anak, pemuda, lansia, penyandang disabilitas, kelompok marginal termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan orang/kelompok masyarakat lain yang terpinggirkan, yang ditujukan untuk menghilangkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender, eksklusi disabilitas dan eksklusi sosial dalam rangka mewujudkan GESDI.³⁴

³⁴ Diadaptasi dari Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2020). Buku Panduan. Perencanaan & Penganggaran Responsif Gender

³⁵ Diadaptasi dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2014). Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah

Prinsip Dasar Anggaran Responsif GEDSI (ARG):³⁵

- ARG bukan merupakan klasifikasi anggaran, tetapi menekankan pada masalah keadilan, kesetaraan dan inklusivitas dalam penganggaran, baik dalam proses, maupun dampak alokasi anggaran suatu kebijakan/program/kegiatan, dengan tujuan untuk mewujudkan GEDSI.
- ARG bukan program dan anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki, **tetapi sebagai anggaran untuk mengatasi ketimpangan GEDSI**. Hal ini dilakukan dengan cara menelaah dan memahami permasalahan, perbedaan kebutuhan sesuai dengan keragaman identitas dan isu GEDSI yang dialami oleh masing-masing kelompok masyarakat (misalnya perempuan, laki-laki, anak-anak, pemuda, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, dan kelompok marginal lainnya).
- ARG bukan dasar yang dapat dijadikan untuk meminta tambahan alokasi anggaran, karena ARG merupakan bagian integral yang melekat dan tidak terpisahkan dari struktur anggaran kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
- ARG tidak selalu berarti penambahan program dan anggaran yang dikhususkan untuk program perempuan, tetapi dapat digunakan untuk mengkaji apakah alokasi dan penggunaan anggaran layanan publik sudah mengakomodasi kebutuhan perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, dan kelompok marginal lainnya dengan menggunakan pendekatan GEDSI.
- ARG tidak berarti ada alokasi dana 50% untuk perempuan, 50% untuk laki-laki, atau 50% untuk penyandang disabilitas dan 50% untuk non-disabilitas, atau 50% untuk kelompok marginal tetapi merupakan anggaran yang inklusif untuk melaksanakan rencana aksi GEDSI yang disusun berdasarkan analisis GEDSI berbasis bukti dan data terpilah.



Kategori ARG

Anggaran responsif GESDI dapat dibedakan menjadi tiga kategori:

 <p>Anggaran pengintegrasian GESDI</p>	 <p>Anggaran khusus GESDI</p>	 <p>Anggaran kelembagaan GESDI</p>
<p>Anggaran yang terintegrasi untuk mengatasi ketimpangan GESDI di berbagai bidang/ sektor pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran pembangunan infrastruktur <i>'universal design'</i> yang dirancang responsif terhadap kebutuhan semua orang, termasuk perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia dan kelompok marginal lainnya. • Anggaran pembangunan sekolah inklusif di bidang pendidikan. • Anggaran penanganan pengungsi korban bencana yang dialokasikan dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, masyarakat berpenghasilan rendah, dan kelompok marginal lainnya yang terkena dampak bencana. 	<p>Anggaran khusus/afirmasi untuk mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan khusus GESDI kelompok masyarakat tertentu yang tertinggal berdasarkan analisis GESDI, yang ditujukan untuk percepatan terwujudnya GESDI.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, ibu hamil. • Anggaran perlindungan hak pekerja migran. • Anggaran pendidikan politik bagi perempuan. • Anggaran perlindungan dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual, tindak pidana perdagangan orang/ TPPO. • Anggaran perlindungan sosial bagi lansia, masyarakat berpenghasilan rendah. • Anggaran pemberdayaan ekonomi kelompok masyarakat miskin di wilayah 3T. 	<p>Anggaran pelembagaan pengarusutamaan GESDI untuk menginternalisasi pengarusutamaan GESDI sebagai proses bisnis di internal organisasi/institusi (misal pemerintah dan OMS)</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran penyusunan kebijakan/peraturan responsif GESDI. • Anggaran untuk pembentukan dan penguatan: Sekretariat PUG dan/atau GESDI, kelompok kerja (Pokja), koordinasi GESDI dan PPRGI. • Anggaran pengembangan kapasitas dan pelatihan GESDI • Anggaran kajian/penelitian/ asesmen GESDI. • Anggaran pengumpulan data terpilah dan analisis. • Anggaran penyusunan peralatan pengarusutamaan dan analisis GESDI (misalnya penyusunan panduan, modul dan manual GESDI) • Anggaran sosialisasi dan advokasi GESDI.

Penerapan Perencanaan Responsif GEDSI

Penganggaran responsif GEDSI direalisasikan melalui *GEDSI Action Budget* (GAB) atau Anggaran Aksi GEDSI.

Anggaran Aksi GEDSI (*Gender Action Budget*)

GEDSI Action Budget (GAB) yaitu dokumen akuntabilitas yang berperspektif GEDSI yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu GEDSI dan telah mengalokasikan dana untuk mengatasi permasalahan ketimpangan GEDSI tersebut.

Tabel di bawah ini merupakan contoh templat pengisian formulir *gender action budget* (GAB) yang mengadaptasi format *GEDSI Action Budget* yang dipakai oleh pemerintah.

Tabel 4 Contoh Format GEDSI Action Budget³⁶

Komponen Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ <i>Terms of Reference</i> dan GAB	Keterangan
Organisasi/Lembaga (1)	Memuat nama organisasi/lembaga
Unit organisasi (2)	Memuat nama Unit Organisasi
Program (3)	Memuat Nama program
Sasaran Program (4)	Memuat sasaran program
Indikator Kinerja program (5)	Memuat indikator kinerja program
Kegiatan (6)	Memuat kegiatan yang akan dilakukan
Sasaran Kegiatan (7)	Memuat sasaran dari kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (8)	Memuat indikator kinerja kegiatan

³⁶ Diadaptasi dari format GAB yang dilakukan oleh Pemerintah yang tertuang di dalam revitalisasi PPRG

Komponen Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ <i>Terms of Reference</i> dan GAB	Keterangan
Klasifikasi Rincian <i>Output</i> (KRO) (9)	Memuat klasifikasi rincian <i>output</i>
Indikator KRO (10)	Memuat indikator KRO
Rincian <i>Output</i> (RO) (11)	Memuat rincian <i>output</i>
Indikator RO (12)	Memuat indikator RO
Volume RO (13)	Memuat jumlah atau banyaknya kuantitas RO yang dihasilkan
Satuan RO (14)	Memuat uraian mengenai satuan ukur yang digunakan untuk pengukuran <i>output</i> yang akan dilaksanakan.
Latar Belakang: Landasan hukum (15) Gambaran Umum (16)	Memuat landasan hukum terkait dengan rincian <i>output</i> yang akan dilaksanakan. Memuat gambaran umum mengenai rincian <i>output</i> dan volumenya yang akan dilaksanakan/dicapai. Termasuk memuat: a) Analisis ketimpangan GEDSI dari rincian <i>output</i> yang diusulkan; b) definisi dari GAB yang diusulkan, termasuk penjelasan komponen terkait dengan definisi GAB; c) hasil yang diharapkan.
Penerima Manfaat (17)	Memuat penjelasan tentang penerima manfaat berdasarkan data terpilah menurut seks, gender, umur, lokasi, dan sebagainya (sesuai dengan kebutuhan).
Strategi untuk mencapai keluaran (<i>output</i>) Metode Pelaksanaan (18) Tahapan dan waktu pelaksanaan (19)	Memuat penjelasan cara pelaksanaan dilakukan langsung atau melalui konsultan/kontraktual Memuat tahapan yang digunakan dalam pencapaian rincian <i>output</i> .
Kurun waktu pencapaian Keluaran (20)	Memuat kurun waktu pelaksanaan pencapaian rincian <i>output</i> .
Biaya yang diperlukan (21)	Memuat total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian rincian <i>output</i> .

04 Pelaksanaan

Bab 4 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam mengintegrasikan GEDSI ke dalam tahap pelaksanaan dan pengelolaan program pembangunan.

Langkah-langkah pengintegrasian GEDSI pada tahap pelaksanaan dan pengelolaan antara lain meliputi proses dan kegiatan yang perlu dilakukan dalam memastikan partisipasi inklusif kelompok marginal, pelibatan pemangku kepentingan inklusif, sistem dan struktur organisasi dan tata kelola inklusif, pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan, komunikasi inklusif, pengadaan barang, jasa dan layanan publik.



Tahap pelaksanaan dan pengelolaan merupakan realisasi dari kegiatan-kegiatan GESDI yang telah direncanakan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengintegrasikan GESDI dalam pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan adalah sebagai berikut:

Langkah 1: Memastikan Partisipasi Inklusif Kelompok Marginal

Untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal, maka perlu memastikan bahwa kelompok marginal yang menjadi sasaran program dapat berpartisipasi secara penuh, aktif dan bermakna secara setara dengan para pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi inklusif, yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel. Selain itu perlu juga memastikan kegiatan dilaksanakan berdasarkan prinsip *do no harm* untuk memastikan pelaksanaan program tidak merugikan atau menimbulkan dampak negatif bagi kelompok marginal dan upaya untuk mewujudkan GESDI. Untuk memastikan hal-hal tersebut, dapat menggunakan contoh beberapa pertanyaan di bawah ini:

Contoh pertanyaan memastikan partisipasi inklusif

- Apakah aspirasi, perspektif dan kebutuhan kelompok marginal didengar dan dipertimbangkan dalam rapat-rapat pengambilan keputusan?
- Apakah kelompok marginal (perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas termasuk anak-anak, pemuda dan lansia) terlibat dalam kegiatan secara adil, setara dan inklusif?
- Apakah ada representasi yang setara antara berbagai kelompok marginal dalam posisi atau kegiatan kepemimpinan dalam pelaksanaan program?
- Apakah tersedia sarana dan prasarana aksesibel agar kelompok marginal dapat berpartisipasi secara setara dan inklusif ?
- Apakah program sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *do no harm*?

Langkah 2: Menjalin dan Memperkuat Kemitraan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan yang Inklusif

Pemangku kepentingan adalah perseorangan, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, organisasi profesi, badan pengelola, badan usaha, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, media massa, dan mitra pembangunan yang terkait dalam penyelenggaraan pengarusutamaan GEDSI.³⁷

Analisis pemangku kepentingan adalah teknik analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi perseorangan, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, organisasi profesi, badan pengelola, badan usaha, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, media massa, dan mitra pembangunan yang terkait dalam penyelenggaraan pengarusutamaan GEDSI.

Pelibatan **pemangku kepentingan** dalam pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan adalah hal mutlak yang perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal untuk berpartisipasi, memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya dan layanan publik serta manfaat pembangunan secara menyeluruh.

Pemangku kepentingan tidak bersifat statis, namun dinamis dapat tetap, berubah, berkurang atau bertambah. Untuk itu, perlu dilakukan **analisis pemangku kepentingan (Stakeholder Analysis)** secara rutin, sesuai dengan kebutuhan, mulai dari tahap awal perancangan / desain program, dan dalam keseluruhan proses tahapan pelaksanaan, seiring dengan perubahan atau perluasan dari lingkup kerja, sasaran dan tujuan program.

Dalam melakukan analisis pemangku kepentingan perlu melibatkan dan memberikan kesempatan yang setara bagi kelompok marginal yang memiliki latar belakang identitas dan status sosial yang berbeda-beda untuk menyampaikan aspirasi, dan

³⁷ Disadur dari Peraturan Presiden. Draft Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Strategi Nasional Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (September 2023).

berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam memengaruhi keputusan dan hasil yang berdampak pada kehidupan mereka. (Analisis Kekuasaan).

Analisis pemangku kepentingan berperspektif GESDI

- Mengidentifikasi dan memetakan pemangku kepentingan baik di dalam (internal) maupun di luar organisasi (eksternal) yang relevan untuk mencapai hasil GESDI yang diharapkan.
- Mengkaji dan menilai pengaruh dan kepentingan masing-masing pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan kesetaraan gender, inklusi disabilitas, dan inklusi sosial.
- Menyusun dan mengimplementasikan strategi dan rencana pelibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan / program / anggaran / kegiatan yang mendukung pelibatan dan partisipasi aktif dan bermakna kelompok marginal, organisasi perempuan dan organisasi penyandang disabilitas, dan organisasi masyarakat sipil lainnya yang bergerak pada isu-isu GESDI.
- Mengelola dan memantau hubungan antar pemangku kepentingan.

Langkah 3: Sistem, Struktur, dan Tata Kelola Inklusif

Pimpinan, pembuat kebijakan dan pengambilan keputusan, serta sistem dan struktur tata kelola pelaksanaan program memainkan peranan penting dalam menentukan strategi, arah kebijakan, pendekatan, prioritas, mengelola risiko, memantau dan mengevaluasi dampak program pada kelompok marginal. Oleh karena itu, semua pimpinan di setiap tingkatan harus memiliki komitmen yang kuat dan pemahaman yang menyeluruh tentang pentingnya GESDI. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan tata kelola inklusif bagi program GESDI, antara lain:

Analisis pemangku kepentingan berperspektif GESDI

- Memastikan representasi perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal pada struktur tata kelola program, dengan mempertimbangkan keseimbangan gender dan identitas lainnya.

- Melibatkan perempuan, penyandang disabilitas, dan representasi kelompok marginal lainnya sebagai tim penasihat.
- Memastikan sistem dan struktur organisasi tata kelola, serta pimpinan dan semua staf yang terlibat mendukung Rencana Aksi program GEDSI, termasuk strategi, target, dan indikator kinerja.
- Memberikan laporan rutin kepada Dewan Penasehat Program tentang pencapaian, kendala, uji petik, praktek baik, dan hasil dari pemantauan, pengawasan dan evaluasi kegiatan GEDSI.
- Mendokumentasi dan menyebarkan pengalaman, kemajuan dan pencapaian kelompok marginal yang dihasilkan dari pelaksanaan program.

Langkah 4: Sumber Daya Manusia dan Keuangan

Keberhasilan pengarusutamaan GEDSI sangat ditentukan oleh dukungan dan pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan yang responsif GEDSI. Beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:

Sumber daya manusia:

- Mengintegrasikan aspek GEDSI kedalam keseluruhan proses perekrutan dan pengelolaan sumber daya manusia, termasuk dalam proses seleksi, wawancara, perjanjian kerja, tugas pokok dan fungsi pimpinan, staf dan konsultan, penilaian kinerja, dan pemutusan hubungan kerja berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, non diskriminasi, partisipasi inklusif, terbuka dan akuntabel.
- Memberikan kesempatan yang adil, setara dan inklusif bagi kelompok marginal dalam proses perekrutan dengan menggunakan proses, sarana dan fasilitas yang aksesibel bagi semua orang.
- Melaksanakan program orientasi GEDSI bagi pimpinan, staf, dan konsultan yang baru direkrut.
- Melakukan afirmasi kebijakan untuk mengatasi ketimpangan kesempatan kerja bagi kelompok marginal, misalnya kepada perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas.

- Menyediakan tenaga ahli GEDSI yang berkualitas tinggi yang memiliki pengalaman di berbagai sektor pembangunan terkait.
- Menyelenggarakan program magang untuk penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya yang masih memiliki kesempatan kerja terbatas.
- Menghindarkan penempatan/ penugasan staf berdasarkan stereotip gender, misalnya perempuan sebagai sekretaris, dan laki-laki sebagai pimpinan.
- Membentuk kelompok kerja (Pokja) GEDSI yang beranggotakan wakil dari unit organisasi sebagai agen perubahan, motivator, fasilitator dan advokat GEDSI.
- Menerapkan mekanisme insentif untuk memotivasi staf berperan aktif dalam mewujudkan GEDSI.
- Memastikan tim manajemen program memiliki representasi perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas secara adil, setara dan inklusif .
- Menerapkan lingkungan dan budaya kerja inklusif, yang memberikan perlindungan dan rasa aman bagi semua orang, tidak diskriminatif, menghargai perbedaan latar belakang staf dan pemangku kepentingan lainnya, baik dari segi identitas jenis kelamin, gender, disabilitas, umur, suku, ras dan agama, dan status sosial lainnya.
- Memberlakukan jam kerja fleksibel bagi kelompok pekerja tertentu seperti perempuan hamil, ibu menyusui dan penyandang disabilitas serta kelompok pekerja lain yang membutuhkan.
- Menerapkan aturan: “Zero tolerant” terhadap segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya, sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Keuangan:

Pengarusutamaan GEDSI membutuhkan alokasi dan pengelolaan anggaran keuangan yang inklusif:

- Mengintegrasikan aspek GEDSI dalam proses penganggaran dan pengelolaan keuangan program yang transparan dan akuntabel, berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran yang responsif GEDSI (Lihat .)

- Memastikan ketersediaan anggaran inklusif bagi penyediaan akomodasi yang layak bagi, penyandang disabilitas serta kelompok marginal lainnya, serta bagi terlaksananya konsultasi multipihak yang partisipatif.
- Memastikan alokasi anggaran bagi tenaga ahli GEDSI, dan pengembangan kapasitas GEDSI bagi pimpinan dan staf, serta pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam program.

Langkah 5: Komunikasi Inklusif

Sistem, strategi dan produk komunikasi inklusif memainkan peranan penting bagi penyelenggaraan pengarusutamaan GEDSI. Hal-hal yang perlu dilakukan antara lain:

Integrasi GEDSI dalam komunikasi:

- Mengintegrasikan GEDSI ke dalam strategi dan pendekatan komunikasi organisasi/program.
- Memastikan semua sistem, produk, metode dan materi komunikasi aksesibel untuk semua pemangku kepentingan, dengan mempertimbangkan ragam identitas jenis kelamin, gender, disabilitas, umur, pendidikan dan kemampuan literasi, bahasa, lokasi geografis, biaya, tujuan dan kebutuhan, dan teknologi, agar informasi yang disampaikan dapat menjangkau semua orang.
- Meningkatkan kapasitas semua pemangku kepentingan dalam berinteraksi dan berkomunikasi serta menggunakan bahasa inklusif termasuk dengan penyandang disabilitas.
- Memastikan materi dan produk komunikasi tidak menimbulkan, memperkuat atau melanggengkan berbagai bentuk diskriminasi, stigma, prasangka dan stereotip negatif dan praktek-praktek berbahaya/merugikan terhadap kelompok marginal. Misalnya, tidak menggunakan gambar-gambar yang memperkuat peran stereotip gender atau menggunakan bahasa yang mengandung abelisme.

- Secara rutin menghasilkan produk komunikasi berupa media cetak, audio visual, seperti radio, video, TV, sosial media, dan website, diskusi dan dialog tentang partisipasi aktif dan bermakna, serta pencapaian kelompok marginal di berbagai sektor pembangunan dan di setiap tingkatan (internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan/kelurahan)

Langkah 6: Pengadaan Barang, Jasa dan Layanan Inklusif

Pengarusutamaan GEDSI membutuhkan penyediaan dan tata kelola pengadaan barang, sarana dan prasarana, fasilitas kerja, bangunan gedung yang aksesibel dan inklusif termasuk jasa tenaga ahli/konsultan yang memiliki keahlian di bidang GEDSI.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.³⁸

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk memastikan pengadaan barang dan jasa layanan inklusif, antara lain:

Pengadaan barang, jasa dan layanan inklusif

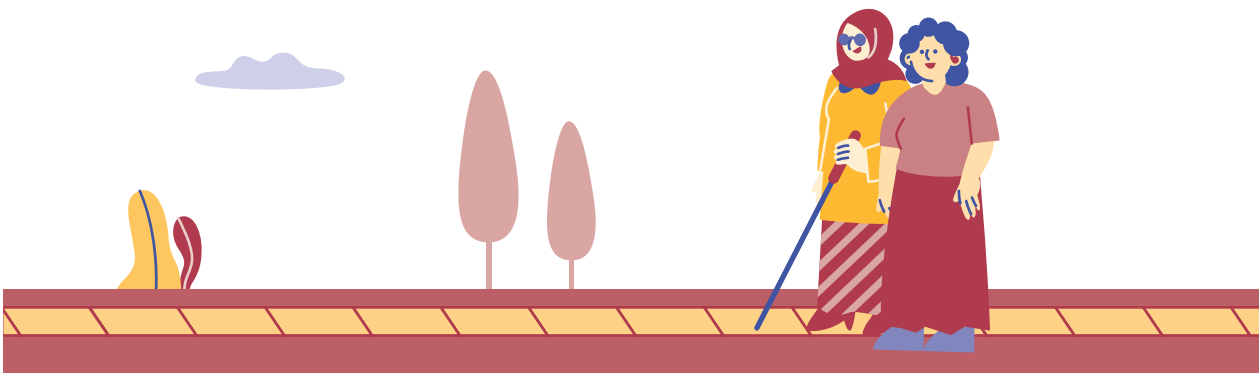
- Mengintegrasikan aspek GEDSI ke dalam keseluruhan proses pengadaan barang dan jasa, termasuk dalam ToR, proses seleksi, dan perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa dengan kontraktor dan/atau konsultan.
- Melakukan kajian terhadap potensi dampak dan manfaat pengadaan barang dan jasa berdasarkan analisis GEDSI, dengan melibatkan dan berkonsultasi dengan tenaga ahli GEDSI termasuk, penyandang disabilitas, untuk memastikan proses yang dilakukan sesuai dengan kebijakan/peraturan yang berlaku, dan produk barang, jasa dan layanan yang disediakan aksesibel bagi

³⁸ Presiden Republik Indonesia (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas.

semua orang, dan tidak membahayakan kelompok tertentu, baik perempuan, laki-laki, anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.

- Menyediakan sarana dan prasarana fasilitas gedung dan kantor yang aksesibel, dengan mempertimbangkan aspek *universal design* dan *akomodasi yang layak*, disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan biaya berdasarkan kajian berbasis data terpilah.

Universal Design adalah desain dan komposisi produk, lingkungan, program, dan layanan agar dapat diakses, dipahami, dan digunakan semaksimal mungkin oleh semua orang secara bersama-sama, tanpa memandang usia, ukuran, disabilitas dan tanpa disabilitas, dan tanpa diperlukan adaptasi atau didesain khusus.³⁹



³⁹ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (2020). Policy Guidelines for Inclusive Sustainable Development Goals. Gender Equality; CBM. Inclusive Participation Toolbox. Universal Design.

Akomodasi layak (*reasonable accommodation*) adalah: “modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan”.⁴⁰

Instrumen: [Alat 8: Kriteria Menentukan Akomodasi yang Layak](#)

Informasi lebih lengkap tentang aksesibilitas, desain universal dan akomodasi yang layak dapat dilihat pada Buku III: Informasi pendukung, Bab B tentang Disabilitas

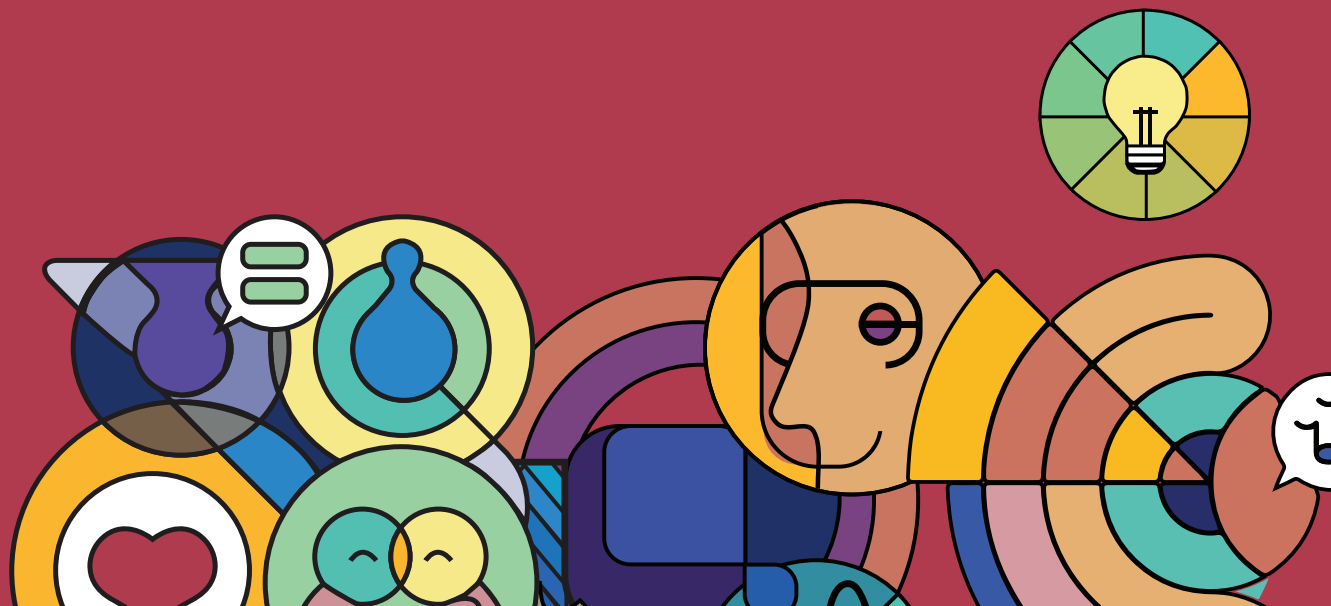


⁴⁰ United Nations Human Rights Office of High Commissioner (2020). The Policy Guidelines for Inclusive Sustainable Development Goals. Foundations.

05 **Monitoring dan Evaluasi**

Bab 5 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis dalam melakukan monitoring dan evaluasi yang responsif GESDI.

Bab ini tidak mencakup aspek teknis umum dari monitoring dan evaluasi (Monev) seperti merancang kerangka kerja, proses dan metodologi monev, tetapi lebih menekankan pada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi yang responsif GESDI.



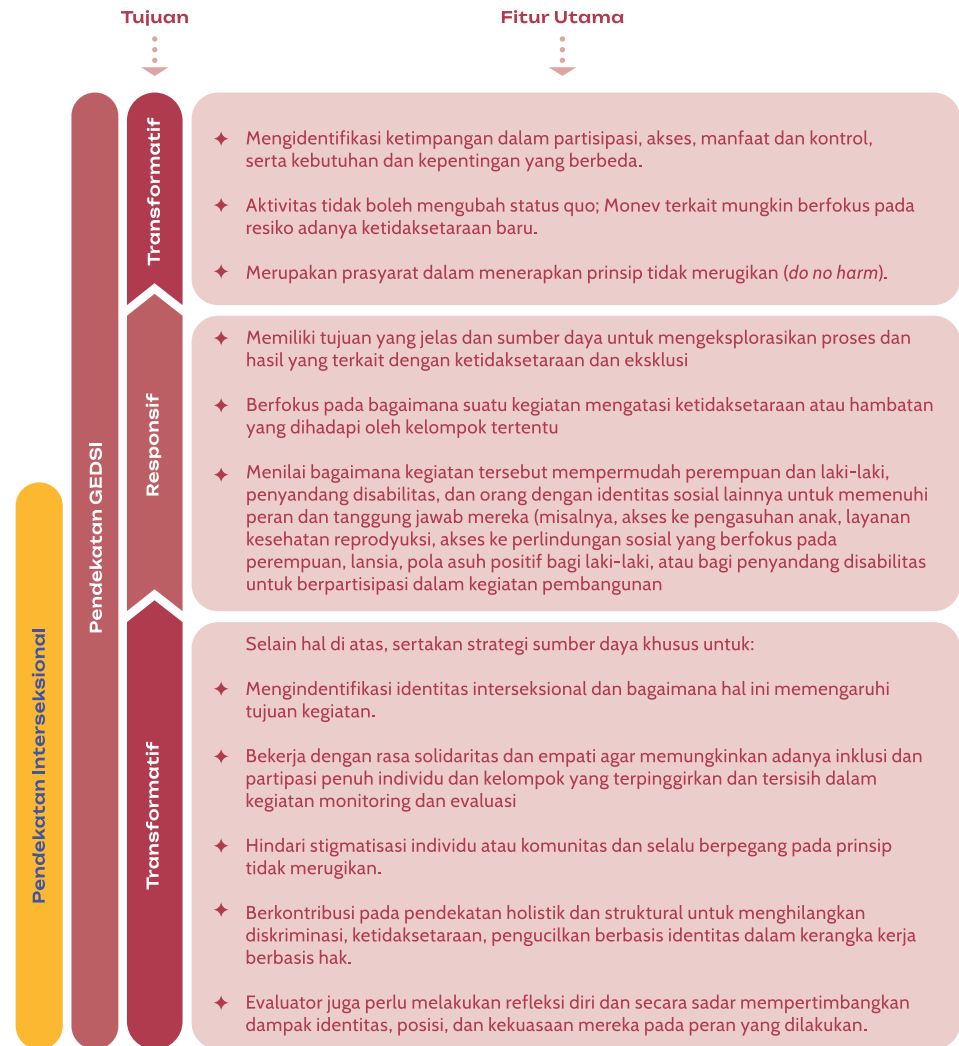
Monitoring dan Evaluasi GEDSI⁴¹

Monev dengan pendekatan GEDSI bukan hanya untuk mengukur tapi juga untuk berkontribusi pada perubahan sosial transformatif. Monev yang menggunakan pendekatan GEDSI melibatkan individu/kelompok marginal yang mengalami dan terkena dampak diskriminasi dan marginalisasi berlapis dan berkelindan (interseksional), dalam menentukan fokus evaluasi, pengumpulan dan analisis data, serta dalam menafsirkan dan menggunakan hasil temuan, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan bagi diri sendiri dan pembangunan secara keseluruhan. Monev GEDSI memaksimalkan hubungan antara evaluasi dan advokasi sehingga proses Monev berkontribusi pada pengembangan bukti untuk perubahan struktural dan norma sosial yang adil, setara dan inklusif.

Untuk mengukur perbedaan dampak program terhadap kelompok marginal yang memiliki ragam identitas dan karakteristik sosial yang berbeda-beda, rencana Monev harus memuat indikator transformatif GEDSI yang dapat mengukur perubahan norma sosial, terkait dengan status perempuan dan laki-laki, relasi kuasa, serta akses, kontrol dan manfaat sumber-sumber daya dan layanan publik bagi kelompok marginal.

⁴¹ Acuan ini diadaptasi dari: Collins-Foley et al (2018) TAAP Toolkit and Guide for Inclusive Development. Transforming Agency, Access, and Power; Kearney S, Days L, Jagosh J, Sarr S (2018) Taking an intersectional approach to evaluation and monitoring: Moving from theory into practice. Our Watch (Menggunakan pendekatan interseksional untuk evaluasi dan monitoring: Beralih dari teori ke praktik. Pengamatan Kami); United Nations Network on Racial Discrimination and Protection of Minorities (Jaringan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Diskriminasi Rasial dan Perlindungan Minoritas) (2022) Guidance Note on Intersectionality, Racial Discrimination and Protection of Minorities. (Jaringan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Diskriminasi Rasial dan Perlindungan Minoritas) (2022) Catatan Panduan tentang Interseksionalitas, Diskriminasi Rasial, dan Perlindungan Minoritas.). Mertens D (2009) Transformative Research and Evaluation / Penelitian dan Evaluasi Transformatif.

Gambar 4: Fitur Utama Monitoring dan Evaluasi Transformatif GESDI



Langkah-Langkah Monitoring dan Evaluasi Transformatif GESDI

Langkah 1: Memastikan Aspek GESDI Terintegrasi Secara Spesifik dalam Logika Program

Logika program merupakan inti dari kerangka Monev. Saat mengembangkan logika program, pastikan hal-hal terkait GESDI diintegrasikan dan dinyatakan dengan jelas pada tingkat hasil (*outcome*), kemudian pada tingkat *output* / kegiatan dan sumber daya pendukung (*input*).

Tentukan dengan jelas perubahan apa yang ingin dilihat, untuk siapa, dan ditingkat mana Anda ingin melihat perubahan pada akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dengan mengacu pada kerangka kerja empat kuadran – personal, fisik / sumber daya, budaya, dan struktural,

Pernyataan hasil (*outcome statement*) bisa panjang, jika menyebutkan setiap identitas yang berkelindan, maka perlu memfokuskan hanya pada kelompok marginal yang menjadi sasaran utama program. Kelompok marginal yang menjadi sasaran utama harus didefinisikan secara jelas, apa dan siapa yang dimaksud, apa artinya dalam konteks untuk kebutuhan Monev, serta apa faktor penyebabnya. Kejelasan dalam pernyataan hasil (*outcome statement*) penting untuk menentukan fokus dari Monev yang akan dilakukan, serta hal-hal apa saja yang perlu diukur. ([Lihat juga Bab 2: Perancangan / Desain / Desain Tahap 4: Menyusun Teori Perubahan GESDI](#)).

Langkah 2: Memastikan Aspek GESDI Terintegrasi dalam Indikator dan Proses

Pastikan membuat dan mengintegrasikan data terpilah sebanyak mungkin dalam rencana Monev. Data terpilah selalu berdasarkan seks, gender, usia, disabilitas, dan lokasi, tergantung pada fokus, tujuan dan hasil akhir (*outcome*) program yang ingin dicapai. Perlu diingat, bahwa untuk menilai perubahan transformatif bagi kelompok marginal yang teresklusi tidak cukup hanya dengan menggunakan data kuantitatif terpilah. Proses dan pengumpulan data kualitatif, juga merupakan aspek yang sangat penting dalam melakukan Monev berperspektif GESDI. Proses pengumpulan data

kualitatif yang mengangkat suara-suara kelompok marginal yang sering kali jarang muncul kepermukaan dan kurang dipertimbangkan, memberikan analisis yang lebih deskriptif, tentang perubahan yang telah terjadi, aspirasi dan pengalaman bermakna, dan arti perubahan transformatif tersebut bagi kelompok marginal yang tereksklusi.

Indikator GESDI

Indikator GESDI menunjukkan dampak dari perubahan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya. Indikator GESDI terkait dengan tujuan untuk memperbaiki situasi perempuan dan kelompok marginal lainnya, serta untuk memastikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan bermanfaat untuk semua orang. *(Lihat juga Buku III terkait dengan indikator pencapaian TPB/SDGs)*

Indikator GESDI adalah: alat untuk mengukur ketimpangan GESDI yang terjadi antara perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya. Indikator GESDI mengukur perbedaan peran, tanggung jawab, akses, kontrol dan manfaat pembangunan yang diperoleh oleh perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya berdasarkan data terpilah, serta memberikan gambaran kemajuan dan perubahan GESDI dari waktu ke waktu.

Indikator GESDI juga untuk mengukur perubahan relasi gender antara perempuan dan laki-laki (baik disabilitas maupun non-disabilitas) yang dihasilkan dari kegiatan, misalnya, revisi kebijakan, layanan publik yang baru, pembangunan infrastruktur, training atau perubahan dalam status perempuan dan laki-laki (disabilitas maupun non-disabilitas).

Indikator GESDI termasuk ukuran kuantitatif atas data terpilah berdasarkan jenis kelamin, gender, disabilitas, lokasi, dan sebagainya. Indikator kualitatif, misalnya pengalaman, perilaku, pendapat dan persepsi dari perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya. Kombinasi dari indikator kuantitatif dan kualitatif dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh terhadap perubahan yang terjadi. Indikator yang berbeda-beda digunakan disetiap tahapan dari siklus program untuk tujuan yang berbeda-beda.

Tip dalam membuat Indikator GESDI

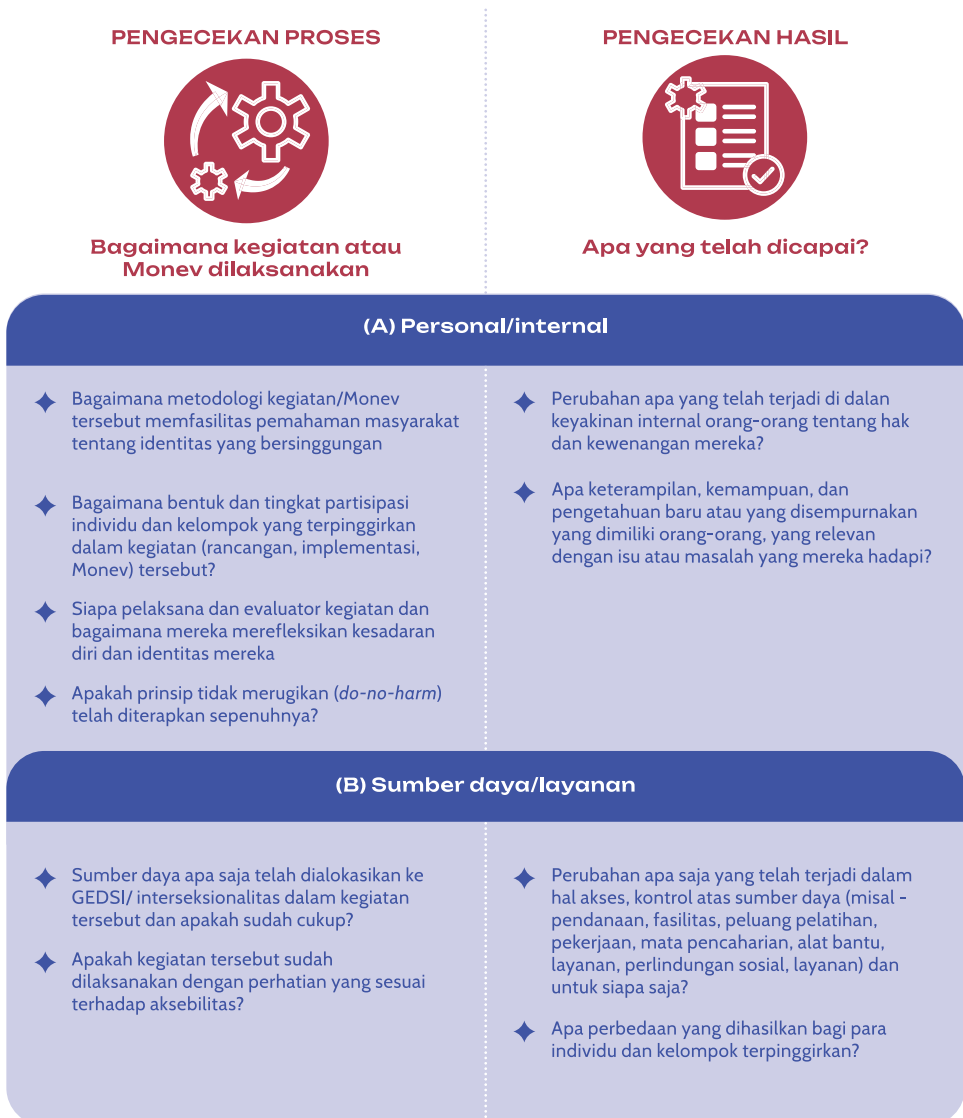
- Disusun bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan secara partisipatif dan inklusif.
- Indikator harus dikaitkan dengan pernyataan masalah, teori perubahan dan rencana aksi GESDI
- Seluruh indikator membutuhkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, gender, umur, disabilitas, lokasi dan variabel penting yang dibutuhkan.
- Harus dirumuskan secara jelas dan tepat.
- Pilih sejumlah indikator saja, umumnya tidak lebih dari 6 indikator / kategori
- Indikator harus menjawab data GESDI yang dibutuhkan.

Langkah 3: Membingkai Pertanyaan Monitoring dan Evaluasi Transformatif GESDI

Kerangka kerja empat kuadran selain dapat digunakan untuk melakukan analisis faktor penyebab dan pendukung, juga dapat digunakan untuk membingkai pertanyaan – pertanyaan pokok untuk mengevaluasi proses dan hasil (*outcome*) berperspektif transformatif GESDI. Pembobotan dan perincian pertanyaan

indikator ini dapat disepakati dengan keikutsertaan individu dan kelompok yang mengalami diskriminasi dan marginalisasi berbasis identitas yang tengah digarap dalam kegiatan tersebut. Tidak semua pertanyaan harus digunakan setiap saat; pertanyaan harus memandu pengecekan tentang bagaimana prinsip-prinsip interseksionalitas dan daya tanggap GEDSI dipatuhi dalam desain kegiatan, implementasi, dan Monev, dan kemudian dalam kaitannya dengan hasil.

Gambar 5: Menggunakan Empat Kuadran untuk Membingkai Pertanyaan Monev Berperspektif Transformatif GEDSI





(C) Kultural/masyarakat

- ◆ Bagaimana kegiatan tersebut memfasilitasi keterlibatan antara individu atau kelompok yang terpinggirkan dan pemegang kekuasaan yang tidak terlihat atau tersembunyi/kelompok dan jaringan tradisional, agama, dan komunitas?
- ◆ Apa penilaian relatif atas masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses tersebut - apakah orang-orang yang terpinggirkan merasa didengarkan?
- ◆ Pergeseran apa yang dapat diamati dalam norma sosial yang telah berkontribusi oleh kegiatan tersebut?
- ◆ Perubahan apa yang terjadi pada orang-orang dari kelompok yang terpinggirkan atau dikucilkan dalam hal akses dan partisipasi dalam jaringan, kelompok, dan pengambilan keputusan informal?
- ◆ Apa yang terjadi sebagai akibatnya?

(D) Struktural/negara

- ◆ Bagaimana kegiatan tersebut memfasilitasi keterlibatan antara individu atau kelompok yang terpinggirkan dan lembaga dan proses formal, termasuk pengembangan kebijakan?
- ◆ Apa penilaian relatif atas masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses tersebut - apakah orang-orang yang terpinggirkan merasakan didengarkan?
- ◆ Perubahan apa yang terjadi dalam undang-undang, kebijakan, peraturan yang akan berdampak positif pada kesetaraan dan inklusi yang telah disumbangkan oleh kegiatan tersebut (pertimbangan juga upaya-upaya efektif dalam 'mempertahankan barisan' untuk menghadapi langkah-langkah mundur pada kebijakan-kebijakan berbasis hak asasi manusia).

Langkah 4: Mengelola Risiko dalam Pengumpulan Data

Bekerja dengan, dan untuk kelompok marginal, mengandung risiko tinggi karena seringkali melibatkan isu-isu sensitif, misalnya kelompok marginal tersebut memiliki identitas yang kurang diterima oleh kelompok arus utama, atau pemegang kekuasaan, mengalami ancaman, atau trauma terkait diskriminasi, marginalisasi, penindasan dan eksklusi. Oleh karena itu dalam melakukan Monev dan pengumpulan data, diperlukan pengelolaan risiko dan kepekaan yang tinggi agar kegiatan Monev yang dilakukan tidak membahayakan, dan menimbulkan kerugian bagi kelompok marginal, tim Monev dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam kegiatan Monev, seperti konflik, menimbulkan tekanan emosional, atau membangkitkan trauma masa lalu bagi kelompok marginal. Dalam melakukan pengelolaan risiko perlu mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

- **Keselamatan dan keamanan:** Memastikan kegiatan Monev tidak merugikan, serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik antar kelompok marginal dan atau antar kelompok marginal dan kelompok penguasa/elit, yang dapat yang membahayakan keselamatan dan keamanan kelompok marginal, tim Monev dan para pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam kegiatan Monev
- **Kesehatan emosional:** melakukan mitigasi terhadap kemungkinan tekanan emosional baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dialami oleh kelompok marginal, tim Monev dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dari kegiatan Monev, sebagai dampak sampingan dari berbagi atau mendengarkan pengalaman terkait dengan isu-isu sensitif, misalnya isu kekerasan. Untuk itu, perlu juga menyediakan informasi dan rujukan terkait layanan yang tersedia untuk mengantisipasi dan membantu mengatasi kemungkinan dampak negatif terhadap kesehatan emosional kelompok marginal dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Monev.
- **Kapasitas untuk berpartisipasi:** penting mempertimbangkan waktu, pengetahuan, dan kesediaan kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam kegiatan. Proses pengumpulan data seringkali memerlukan waktu yang panjang. Kelompok marginal seringkali tidak terbiasa dimintai masukan, kemungkinan

sulit bagi mereka untuk berbagi informasi dan pengalamannya, dikarenakan rasa takut, ragu-ragu, waspada, atau tidak tahu bagaimana sebaiknya menceritakan pengalamannya. Oleh karena itu dibutuhkan kesabaran dalam proses pengumpulan data Monev, sampai kelompok marginal benar-benar siap untuk berpartisipasi, dan percaya bahwa kegiatan Monev memberikan tidak membahayakan dan memberi manfaat bagi mereka.

- **Reaksi negatif:** kegiatan Monev yang melibatkan kelompok marginal memiliki risiko mendapat reaksi negatif, seperti penolakan dan ancaman dari kelompok arus utama atau penguasa /elit yang menentang keterlibatan kelompok marginal, yang semakin meminggirkan kelompok marginal dari kegiatan Monev. Oleh karena perlu dilakukan pengelolaan mitigasi terhadap risiko seperti ini, termasuk bias yang dimiliki oleh tim Monev dan pemangku kepentingan lainnya yang mungkin kurang menghormati kelompok marginal.

Langkah 5: Memfasilitasi Penggunaan Evaluasi

Monev berperspektif GESDI memiliki tujuan untuk perubahan transformatif. Oleh karena itu kegiatan Monev perlu dirancang dengan mempertimbangkan kegunaannya, dengan memfasilitasi penggunaan hasil temuan Monev, termasuk keseluruhan proses dan alokasi sumber daya kepada kelompok marginal, semua anggota tim Monev, pimpinan program di semua tingkatan, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Secara bersama-sama semua pemangku kepentingan mengkaji kemajuan dan pencapaian yang dihasilkan, melakukan perbaikan termasuk perbaikan manajemen program, menjaga akuntabilitas, melakukan pembelajaran dan adaptasi, serta pengembangan bukti bagi advokasi untuk mencapai hasil yang lebih baik guna mewujudkan perubahan transformatif GESDI yang diharapkan.

Alat 1: Latihan Interaktif: Memahami Identitas⁴²

Bagian menjelaskan beberapa bentuk latihan yang dapat digunakan baik dalam organisasi maupun bersama sekelompok orang untuk memahami identitas individu. Latihan ini dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.

⁴² Acuan ini diadaptasi dari IGLYO (2013) Intersectionality Toolkit; Facing History and Ourselves (2018) Understanding Identity, June; Christian Aid and Social Development Direct (2021) Gender, Inclusion, Power & Politics Analysis Toolkit Part 2 - templates, tools, workshop plans

Interseksionalitas mengakui bahwa kita semua membawa nilai, kepentingan, keyakinan pribadi berdasarkan pengalaman kehidupan kita sendiri yang berbeda-beda. Oleh karena itu, langkah pertama yang perlu diambil adalah melakukan refleksi diri terkait identitas, kekuasaan dan bias yang kita miliki. Hal ini mencakup:

- Nilai, pengalaman, kepentingan, keyakinan, dan komitmen politik yang dimiliki.
- Bagaimana hal ini dapat memengaruhi pengetahuan, nilai, dan bias terhadap apa yang akan dilakukan di lingkungan kerja, masyarakat, komunitas atau keluarga.
- Berbagai bidang kehidupan dan pekerjaan yang menjadi sumber kekuasaan dan bidang yang menjadi kelemahan diri sendiri.
- Bagaimana status jenis kelamin, gender, disabilitas, seksualitas, usia, suku/ etnis, agama, bahasa, status sosial ekonomi, dan hal lain yang dimiliki memengaruhi pandangan dan pengalaman tentang berbagai bentuk diskriminasi, ketidaksetaraan, marginalisasi, eksklusi, kekuasaan atau keistimewaan sepanjang siklus kehidupan.

Sebelum Mulai

Sebelum memulai latihan tentang identitas pribadi, keistimewaan (*privilege*), dan diskriminasi dalam kelompok atau organisasi mana pun, penting bagi fasilitator untuk memastikan tersedianya ruang yang aman. Sebagian orang tidak akan merasa nyaman untuk berbicara tentang pengalaman pribadi mereka, terutama dalam kelompok yang anggotanya memiliki latar belakang yang berbeda-beda atau apabila mereka memiliki persepsi adanya tingkat kekuasaan yang berbeda.

Fasilitator pertama-tama harus menilai apakah kelompok siap berbicara tentang identitas dan apakah berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif. Kelompok dapat didorong untuk memperlakukan semua orang dan pengalaman secara setara dan untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Sangat penting untuk tetap peka, menjaga martabat dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kelompok yang lebih besar, mungkin lebih tepat untuk melakukan kegiatan latihan secara berpasangan atau dalam kelompok kecil agar lebih nyaman. Terakhir, fasilitator tidak boleh mencoba memaksa siapa pun untuk berpartisipasi dalam latihan ini atau berbagi informasi pribadi di luar tingkat kenyamanan mereka. Berikan perhatian jika terungkap identitas

atau pengalaman traumatis tertentu yang dapat membahayakan peserta. Jika prinsip *'do no harm / jangan merugikan'* tidak dapat diterapkan, maka ubah bentuk latihannya atau jangan lakukan kegiatan latihan tersebut pada saat itu.

Refleksi Diri⁴³

Latihan pertama ini bertujuan agar setiap orang mulai memikirkan tentang identitas dirinya. Latihan ini juga dapat digunakan fasilitator untuk menilai kesiapan setiap orang dan kelompok untuk berdiskusi secara terbuka. Beri waktu sekitar 30 menit bagi peserta untuk memikirkan tentang pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Anda tidak harus menggunakan pertanyaan yang sama persis – Pertanyaan-pertanyaan ini dapat disesuaikan dengan konteks lokal dan norma sosial dan budaya yang berbeda.

Lembar Kerja

Pertanyaan kegiatan refleksi diri.

- Apa jenis kelamin Anda? Apa identitas gender Anda? Apa status perkawinan atau status keluarga Anda? Apa peran faktor-faktor ini dalam cara Anda memandang diri Anda sendiri?
- Di mana Anda lahir, dari mana Anda berasal, dari mana keluarga Anda; di mana Anda beranjak dewasa? Apakah tempat-tempat ini berbeda dengan tempat Anda berada sekarang? Apakah hal-hal ini penting bagi Anda?
- Apakah Anda mengidentifikasi diri sebagai orang yang berasal dari provinsi atau pulau tertentu, atau dari kelompok etnis tertentu?
- Apa agama atau kepercayaan Anda? Apakah agama atau kepercayaan menjadi bagian besar yang membentuk diri Anda? Bagaimana hal ini memengaruhi interaksi Anda dengan orang lain?
- Apa ideologi politik Anda? Apakah ideologi politik tersebut bermakna bagi Anda dan mengapa? Apakah Anda berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki ideologi yang berbeda?

⁴³ Latihan ini Refleksi Diri dan Latihan 2, Roda Identitas (Identity Wheel) diadaptasi dari Collins-Foley, Jennifer, Meri Ghorkhmazyran, Lauren Godfrey and Jennifer Whatley. April 2018. TAAP Toolkit and Guide for Inclusive Development. Transforming Agency, Access, and Power. Secara lengkap dapat diakses di <https://www.taapinclusion.org>.

- Apakah Anda memiliki minat atau hobi? Apakah minat atau hobi Ini menjadi bagian dari identitas Anda?
- Apa tingkat pendidikan Anda? Jika Anda mengakses pendidikan tinggi, apakah hal ini menjadi bagian dari diri Anda? Apakah Anda memiliki hubungan dengan anggota kelompok akademik lainnya? Apakah Anda studi di negara lain?
- Apa profesi Anda? Apakah Anda menganggap pekerjaan Anda atau jabatan atau posisi Anda menjadi bagian penting dari siapa diri Anda? Apakah orang lain mengharapkan berbagai hal dari Anda?
- Apa kelas sosial ekonomi Anda? Bagaimana status ekonomi atau pengalaman hidup Anda dapat membantu membentuk siapa Anda sekarang?
- Apa aspek lainnya dari diri Anda, pengalaman hidup, atau kelompok yang Anda terlibat di dalamnya, yang Anda anggap sebagai bagian penting dari identitas Anda?

Roda Identitas

Pada bagian selanjutnya, berikan setiap peserta templat roda identitas kosong atau peserta dapat menggambar lingkaran di atas selembar kertas. Di tengah lingkaran tersebut, peserta dapat menulis 'saya' atau 'manusia'.

Langkah 1 [15 menit] Mengidentifikasi identitas pribadi: Di sekitar bagian luar atau di bagian roda yang berbeda, minta peserta untuk menulis atau menggambar aspek identitas mereka yang mereka anggap paling penting – misalnya, perempuan, aktivis, pengguna kursi roda, Muslim – minta peserta untuk berpikir tentang kelompok yang dapat dikenali orang lain (biasanya kata benda), bukan ciri-ciri atau deskriptor pribadi / kata sifat seperti perhatian, pekerja keras, pemalu.

Langkah 2 [15 menit] Mengidentifikasi sumber kekuasaan dan marginalisasi: Setelah peserta menyelesaikan roda identitas, mintalah peserta untuk memikirkan identitas

mana yang memberi mereka keuntungan dan kekuasaan, dan identitas mana, jika ada, yang menyebabkan mereka terpinggirkan atau dikecualikan.

Minta peserta untuk menggambar tanda panah ATAS pada bagian identitas diri mereka yang mereka anggap sebagai aspek identitas yang membentuk satu kesatuan atau berhubungan dengan kelompok identitas lainnya – sehingga apabila memiliki berbagai identitas ini berarti memberikan keuntungan baginya.

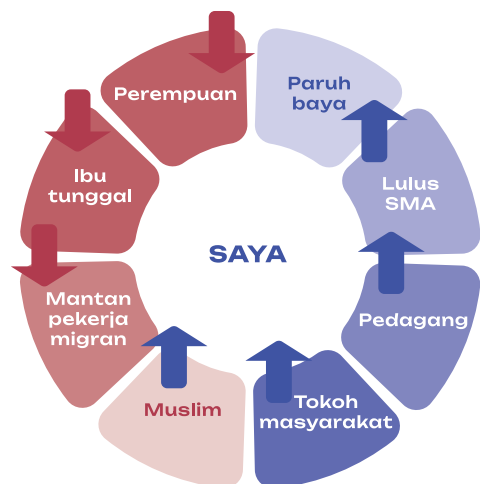
Kemudian mitra peserta menggambar tanda panah BAWAH pada bagian identitas diri mereka yang mereka anggap sebagai penyebab mereka mengalami marginalisasi atau dikucilkan karena mereka menjadi bagian dari kelompok tersebut.

Beberapa identitas mungkin terkadang dikaitkan dengan keberuntungan dan marginalisasi tergantung pada konteksnya. Kalau demikian, peserta dapat meletakkan tanda panah ke atas dan ke bawah, kemudian menuliskan konteks untuk tanda panah ke atas dan konteks untuk tanda panah ke bawah.

Contoh yang sudah dilengkapi - langkah 1:



Contoh yang sudah dilengkapi - langkah 2:



Langkah 3 [30 menit] diskusi yang dipandu: Pertama-tama fasilitator dapat mengingatkan peserta bahwa mereka tidak harus membagikan roda identitas pribadi mereka kepada orang lain, dan agar semua peserta mendengarkan dengan penuh

hormat, dan tanpa menghakimi. Diskusi dapat dilakukan dalam kelompok kecil atau tidak sama sekali. Fasilitator dapat memilih pertanyaan yang relevan bagi peserta, misalnya:

Pertanyaan kegiatan refleksi diri dengan menggunakan roda identitas.

- Faktor apa yang membentuk identitas Anda?
- Bagian identitas apa yang Anda pilih untuk diri sendiri?
- Bagian identitas apa yang Anda miliki sejak lahir?
- Bagian identitas apa dari diri Anda yang ditentukan oleh orang lain atau masyarakat ?
- Aspek identitas mana yang Anda tandai dengan tanda panah BAWAH? Pertimbangkan untuk merenungkan atau mendiskusikan bagaimana rasanya dulu atau saat ini menjadi anggota kelompok yang terpinggirkan atau tereksklusi.
- Aspek identitas mana yang Anda tandai dengan tanda panah ATAS? Pertimbangkan untuk merenungkan atau membahas bagaimana rasanya dulu atau saat ini menjadi anggota kelompok yang memiliki keistimewaan (*privilege*) atau terinklusi.
- Apa saja stereotip umum tentang identitas Anda?
- Bagaimana identitas Anda akan memengaruhi pekerjaan yang Anda lakukan dalam konteks Anda sendiri atau konteks lain?
- Apakah latihan ini meningkatkan kesadaran diri Anda tentang posisi Anda terutama dalam kaitannya dengan konteks di mana Anda akan menerapkan pemrograman? Dengan meningkatnya kesadaran Anda, apa yang akan Anda lakukan secara berbeda?

Sungai Kehidupan (*The River Of Life*)

Latihan ini dapat digunakan sebagai kegiatan selingan (*ice breaker*) kelompok dengan anggota yang tidak terlalu saling mengenal. Latihan ini tidak secara spesifik tentang memahami identitas, tetapi melalui latihan ini, peserta dapat secara tidak terlalu langsung membicarakan mengenai hal-hal yang dianggap penting bagi diri mereka.

Siapkan kertas dan alat tulis untuk menggambar (pensil warna, spidol, dan lain-lain).

Latihan ini memerlukan waktu - sekitar 20 menit untuk mengerjakan bagian pertama (menggambar sungai) dan sekitar 5 menit per peserta untuk memberikan penjelasan, terkadang perlu waktu tambahan.

Petunjuk bagi fasilitator: Mintalah setiap peserta menggambar 'sungai kehidupan' masing-masing - sungai kehidupan ini menceritakan lika-liku kehidupan peserta masing-masing dan perjalanan yang harus mereka tempuh dalam kehidupan dan karirnya masing-masing mulai dari suatu titik awal tertentu (boleh dari titik awal mana pun) hingga saat ini.

Tidak ada batasan - peserta bebas menjelaskan apa pun sesuai dengan yang diinginkan. Peserta dapat memberikan penjelasan yang berfokus pada identitas-identitas individu yang dimilikinya atau interaksi identitas-identitas individu tersebut dengan lingkungannya - peserta seringkali akan menjelaskan keduanya.

Setelah peserta selesai menggambar, minta setiap peserta memberikan penjelasan singkat di hadapan semua peserta. Agar latihan ini dapat berfokus lebih langsung pada identitas, gunakanlah pertanyaan berikut ini:

Lembar Kerja

Pertanyaan untuk kegiatan memahami identitas-“Sungai kehidupan”

- Pengalaman apa yang telah membentuk identitas Anda?
- Bagian identitas mana yang Anda pilih untuk diri Anda sendiri, dan bagian identitas mana yang ditentukan oleh orang lain di sepanjang sungai kehidupan Anda?
- Bagian identitas mana yang telah Anda miliki sejak lahir?
- Bagian identitas apa yang ada pada diri Anda yang ditentukan oleh orang lain atau masyarakat?

Penilaian Diri⁴⁴

Berikut ini merupakan kuesioner penilaian diri yang dirancang khusus secara anonim hanya untuk tujuan refleksi diri. Apabila digunakan untuk suatu kelompok atau organisasi, setiap responden harus membaca pernyataan-pernyataan yang tertera dan memberikan skor sesuai dengan penilaian atas perilakunya masing-masing terhadap setiap pernyataan, dengan skala: 0 = Tidak, tidak sama sekali; 1 = Jarang; 2 = Terkadang atau sebagian; 3 = Selalu atau secara konsisten.

Lembar Kerja

No.	Pernyataan	0	1	2	3
1	Saya tahu bagaimana menggunakan bahasa dan istilah yang tepat untuk memajukan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.				
2	Saya sadar akan posisi atau status saya dan bagaimana posisi atau status saya dapat menghambat orang lain untuk angkat bicara.				
3	Saya tahu bagaimana menggunakan pendekatan yang berbeda dalam pekerjaan saya untuk memastikan semua orang dapat berpartisipasi secara setara.				
4	Saya tahu bagaimana mengidentifikasi diskriminasi berdasarkan disabilitas, jenis kelamin dan identitas gender, usia, keyakinan, etnis, dll.				
5	Saya merasa nyaman bekerja dengan orang yang berbeda dengan saya misalnya berbeda dalam hal jenis kelamin, identitas gender, disabilitas, etnis, keyakinan (termasuk tidak memiliki keyakinan), dan usia.				
6	Saya memperlakukan rekan kerja dengan cara yang sama terlepas dari jenis kelamin, identitas gender, disabilitas, etnis, seksualitas, keyakinan (termasuk tidak memiliki keyakinan), usia, dll. yang mereka miliki.				
7	Saya percaya diri untuk meminta penyesuaian akomodasi dan/atau kerja yang wajar / Saya mengambil tindakan secara aktif untuk mendukung rekan kerja dengan penyesuaian akomodasi dan/atau kerja yang wajar.				
8	Saya percaya diri untuk mengkritik secara terbuka terhadap orang lain yang mungkin menggunakan perilaku, bahasa, lelucon, atau komentar yang dapat memarginalkan, menstigmatisasi, atau mengeksklusi orang lain.				

⁴⁴ Latihan ini Periksa diri Anda (Check Yourself) diadaptasi dari CBM (2019) Disability and Gender Analysis Toolkit.

Alat 2: Pengenalan tentang Analisis Kekuasaan

Apa Itu Analisis Kekuasaan?

Analisis kekuasaan⁴⁵ sangatlah penting bagi penerapan pendekatan responsif atau transformatif GESDI dan merupakan bagian penting dalam perencanaan program, sebagai alat untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk waktu kerja staf, dan efektivitas kerja. Analisis kekuasaan membantu memahami lingkungan politik, sosial, budaya dan ekonomi dalam masyarakat tertentu. Analisis ini juga membantu untuk menyempurnakan strategi perubahan yang akan dilakukan dengan berfokus pada siapa dan apa yang perlu dipengaruhi, bagaimana, dan apa urutannya.

Tip melakukan kegiatan analisis kekuasaan

- Jangan terlalu lama melakukan analisis kekuasaan - hanya perlu melakukannya untuk membantu menentukan fokus yang akan dilakukan.
- Kesalahan yang biasa dilakukan yaitu mencoba mengidentifikasi semua hal dan semua orang yang berinteraksi dengan suatu isu. Hal ini dapat membuat analisis yang dilakukan menjadi rumit. Fokus saja pada isu / hal-hal yang benar-benar penting.
- Coba untuk memperoleh sebanyak mungkin pengalaman dan bukti yang relevan dalam melakukan analisis kekuasaan - Apa yang diketahui tentang individu/lembaga ini dari pengalaman sebelumnya dan apa cara yang efektif untuk memengaruhi mereka; pernyataan apa yang mereka berikan di depan publik tentang isu yang ingin diatasi; apakah secara pribadi orang / lembaga tersebut memiliki hubungan / terkait secara langsung terhadap , terhadap isu tersebut.
- Perbarui analisis kekuasaan seiring dengan kemajuan yang dicapai dan seiring dengan apa yang dipelajari. Individu/lembaga utama juga akan berubah seiring waktu, begitu pula kekuasaan yang dimiliki dan kekuasaan di antara mereka.

⁴⁵ Disadaptasi dari Christian Aid and Social Development Direct (2021) Gender, Inclusion, Power & Politics Analysis Toolkit Part 2 - templates, tools, workshop plans; Collins-Foley J et al, (2018). TAAP Toolkit and Guide for Inclusive Development. Transforming Agency, Access, and Power. Selengkapnya dapat diakses di <https://www.taapinclusion.org>.

Metode Pemetaan Kekuasaan

Berikut ini adalah dua metode berbeda yang dapat digunakan untuk memfasilitasi latihan pemetaan kekuasaan dalam proses penyusunan perencanaan kegiatan dan desain program/proyek.

Metode 1: Pemetaan Pelibatan Pemangku Kepentingan

Metode ini merupakan kegiatan pemetaan pemangku kepentingan yang sederhana, yang akan membantu mengelompokkan pemangku kepentingan sesuai dengan berbagai jenis pelibatan pemangku kepentingan yang akan difokuskan terkait dengan suatu isu atau masalah tertentu yang akan diatasi. Kegiatan pelatihan pemetaan pemangku kepentingan ini dapat dilakukan secara individu atau dalam kelompok, yang diawali dengan menyatakan secara jelas isu atau masalah yang ingin diatasi.

Langkah 1: Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan Utama

Mulai dengan membuat daftar individu atau lembaga yang:

1. Sedikit banyak terdampak oleh masalah atau isu terkait - misalnya pihak yang mengalami masalah atau isu tersebut (pemangku kepentingan primer) dan pihak yang mungkin dapat terkena dampak oleh perubahan yang terjadi dalam situasi terkini.
2. Memiliki kekuasaan (terlihat, tersembunyi, tidak nampak) untuk memengaruhi situasi agar menjadi lebih baik, yang dilakukan melalui intervensi secara langsung atau melalui pengaruh mereka terhadap orang lain.

Langkah 2: Mengelompokkan Pemangku Kepentingan Utama dengan Menggunakan Matriks

Gambarlah sebuah matriks di papan tulis atau kertas untuk mengelompokkan pemangku kepentingan utama berdasarkan (1) tingkat kepentingan dalam menangani isu atau masalah dan komitmen mereka terhadap perubahan sosial yang positif; dan (2) tingkat pengaruh – yaitu kekuasaan pemangku kepentingan tersebut untuk membuat atau mendorong perubahan positif (lihat contoh matriks di samping)

		Tingkat Kepentingan		
		Tinggi	Sedang	Rendah
Tingkat Pengaruh	Tinggi			
	Sedang			
	Rendah			

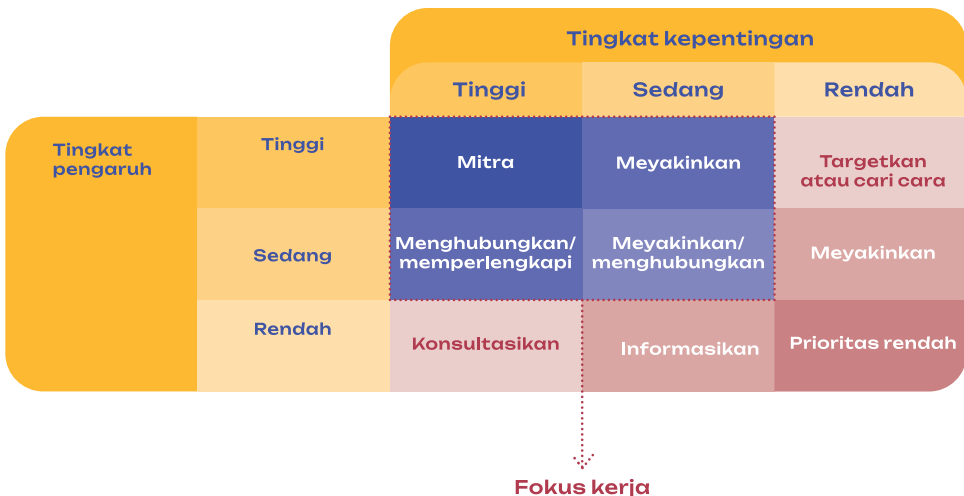
Langkah 3: Identifikasi Jenis Pelibatan Berdasarkan Posisi dalam Matriks

Melalui matriks ini, akan dapat diidentifikasi jenis pelibatan yang paling efektif dengan pemangku kepentingan tertentu, berdasarkan pengelompokan sebagai berikut:

- Kepentingan tinggi dan pengaruh tinggi: Pemangku kepentingan inilah yang perlu diajak untuk bermitra sebagai mitra utama.
- Kepentingan tinggi dan pengaruh sedang: Para pemangku kepentingan yang perlu dijalin hubungan satu sama lain terkait dengan upaya yang akan dilakukan,. Melalui aksi kolektif, para pemangku kepentingan ini dapat memiliki pengaruh (kekuasaan) yang lebih tinggi, dan pengaruh (kekuasaan) pemangku kepentingan ini dapat menjadi lebih efektif apabila diperlengkapi dengan informasi dan instrumen yang lebih memadai. **Kepentingan tinggi dan pengaruh rendah:** kelompok pemangku kepentingan yang perlu diajak berkonsultasi terlebih dahulu, karena mereka mungkin memiliki pengalaman dan informasi relevan yang dibutuhkan. Pemangku kepentingan ini juga akan dapat menjadi mitra kerja yang lebih kuat melalui aksi kolektif.
- Kepentingan sedang dan pengaruh tinggi: Pemangku kepentingan ini berpotensi menjadi mitra kerja tetapi perlu diyakinkan sedikit agar ikut berupaya menangani isu tertentu yang akan diatasi. Untuk itu perlu meyakinkan mereka tentang betapa penting dan berharganya keterlibatan mereka bagi upaya yang akan dilakukan.
- Kepentingan sedang dan pengaruh sedang: kelompok pemangku kepentingan ini perlu diyakinkan tentang pentingnya keterlibatan dan hubungan antara

mereka satu sama lain dalam mendukung upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi isu tertentu. Melalui aksi kolektif, kelompok pemangku kepentingan ini dapat memiliki pengaruh yang lebih tinggi.

- Kepentingan sedang dan pengaruh rendah: kelompok pemangku kepentingan yang perlu diinformasikan tentang isu-isu GEDSI tertentu dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi isu-isu tersebut sebagai bagian dari strategi untuk membangun gerakan perubahan.
- Kepentingan rendah dan pengaruh tinggi: kelompok pemangku kepentingan yang merupakan target dari upaya untuk mengatasi isu atau masalah terkait. Namun, apabila posisi mereka tidak dapat diubah, maka perlu mencari cara yang lebih baik agar tetap dapat bekerja sama.
- Kepentingan rendah dan pengaruh sedang: Pemangku kepentingan ini mungkin dapat diubah posisinya ke kelompok pemangku kepentingan dengan kepentingan yang lebih tinggi melalui pelibatan secara khusus.
- Kepentingan rendah dan pengaruh rendah: Pemangku kepentingan ini merupakan kelompok pemangku kepentingan dengan prioritas terendah untuk dilibatkan.



Metode 2: Mengidentifikasi Kekuasaan dan Garis Pengaruh Individu

Metode ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi para pemegang kekuasaan yang terkait dengan isu-isu GESDI tertentu, kemudian memetakan hubungan yang dimiliki oleh organisasi tempat bekerja dengan para pemegang kekuasaan tersebut. Metode ini bergantung pada modal sosial dan meyakini bahwa mitra kerja dapat ditemukan dan dibangun melalui jalur jaringan pribadi, dan paling cocok dilakukan dalam kelompok.

Langkah 1: Sebutkan Solusi yang Ingin Dicapai

Di tengah selembur kertas besar atau di atas karton, tuliskan mengapa penting untuk mengatasi isu atau masalah GESDI yang telah diidentifikasi. Nyatakan hal-hal penting yang ingin dilakukan, sehingga membutuhkan dukungan untuk mengatasi isu GESDI tersebut, misalnya:

- Meningkatkan layanan pusat kesehatan untuk lansia disabilitas.
- Memformalkan proses musyawarah pembangunan desa yang melibatkan kelompok terpinggirkan.

Langkah 2: Petakan Lembaga, Kelompok, atau Organisasi yang Memiliki Pengaruh

Identifikasi lembaga utama pembuat keputusan, kemudian identifikasi kelompok, organisasi, atau institusi lainnya terkait dengan upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi isu GESDI. Tuliskan atau gambarkan di kertas besar atau karton dalam lingkaran yang mengelilingi solusi. Gunakan garis atau warna yang berbeda untuk mengidentifikasi apakah pengaruhnya cenderung positif atau negatif

Langkah 3: Petakan Individu yang Terkait dengan Lembaga Tersebut

Lakukan Brainstorming dengan dua atau tiga individu yang terlibat atau yang memiliki pengaruh kuat di dalam lembaga/institusi tersebut. Pada titik ini cobalah untuk mengidentifikasi individu-individu tersebut secara lebih spesifik.

Selanjutnya, identifikasi posisi individu-individu tersebut terkait dengan isu GESDI yang akan didiatasi, dan seberapa besar kemungkinan individu-individu tersebut mendukung upaya yang akan dilakukan dalam mengatasi isu GESDI tersebut.

Contoh pertanyaan untuk pemetaan individu pendukung GESDI

- Apa yang Anda ketahui tentang keragaman identitas yang mereka miliki? Setiap orang memiliki lebih dari satu identitas, jadi apa yang Anda lihat dari luar atau apa yang mereka tunjukkan di muka umum kemungkinan hanyalah sebagian kecil dari identitas mereka.
- Apa yang mereka katakan/sampaikan di depan umum?
- Kelompok atau jaringan lain apa yang berafiliasi dengan mereka? Apakah mereka terhubung dengan lebih dari satu pemangku kepentingan yang diperlukan untuk mengatasi isu GESDI yang akan dilakukan ?
- Apakah mereka secara pribadi memiliki hubungan atau terkait dengan masalah atau solusi yang akan dilakukan? Misalnya, mereka mungkin memiliki anak dengan disabilitas, saudara perempuan yang merupakan pekerja migran, seorang ibu dengan status janda.

Pertanyaan-pertanyaan di atas akan membantu dalam mengidentifikasi individu yang paling mungkin terlibat atau mendukung solusi/ rencana aksi yang akan dilakukan.



Waspada, hindari pandangan bahwa hanya orang yang memiliki hubungan dengan isu tersebut yang harus peduli. Anda perlu mendapat dukungan luas, tetapi menjadikan suatu isu terhubung secara pribadi dapat membantu Anda mulai melangkah. Perhatikan, jangan sampai mengeksploitasi situasi pribadi seseorang. Jangan mempublikasikan atau menarik perhatian publik terhadap sesuatu yang sensitif atau yang menjadi bagian dari identitas seseorang yang tidak ingin diungkapkan.

Langkah 4: Temukan Jalur Pengaruh dan Hubungan/Relasi, serta Buat Rencana

Mintalah peserta untuk memikirkan tentang orang-orang yang mereka kenal yang berhubungan dengan orang-orang penting/berpengaruh. Hal ini dimaksudkan agar dapat lebih mudah mengakses individu atau lembaga yang dapat mendukung upaya dalam mengatasi masalah dan/atau rencana aksi yang akan dilakukan berdasarkan hubungan yang sudah terbangun sebelumnya. Selanjutnya, bersama-sama dengan individu dan lembaga tersebut menyepakati pendekatan terbaik yang dapat digunakan, termasuk menentukan siapa yang akan bertanggung jawab dan kapan dilakukan.

Langkah 5: Mulai Membangun Hubungan dan Memberi Pengaruh!

Setelah langkah 4 dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah memulai dan terus menjalin hubungan serta memperkuat relasi dengan orang-orang/ kelompok pemangku kepentingan yang berpengaruh yang sudah diidentifikasi tersebut untuk mendukung rencana aksi bagi perubahan transformatif GESDI.

Alat 3: Contoh Pertanyaan Pengumpulan Data Pembuka Wawasan

Contoh pertanyaan pengumpulan data awal pembuka wawasan

- Bagaimana profil demografis dari penduduk di daerah sasaran (jenis kelamin, gender, disabilitas, umur, lokasi) ?
- Bagaimana sistem sosial, budaya, ekonomi, politik dan pemerintahan yang berlaku di lokasi sasaran?
- Bagaimana situasi GESDI di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik secara umum di lokasi sasaran, termasuk kemajuan, capaian, hambatan dan peluang?
- Apakah terdapat kebijakan/ peraturan yang berlaku yang dapat menghambat GESDI?
- Bagaimana sistem nilai norma sosial budaya, dan adat istiadat terkait dengan dengan GESDI yang berlaku pada masyarakat di lokasi sasaran? (misalnya terkait dengan status perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas, peran gender, relasi kuasa dan pola pengambilan keputusan di ranah domestik dan publik). Apakah norma sosial ini menghambat atau mendukung GESDI? Apa konsekuensinya seandainya perempuan, laki-laki dan penyandang disabilitas mengikuti atau tidak mengikuti norma sosial yang berlaku tersebut?
- Apa kebijakan/program /kegiatan terkait GESDI yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah dan organisasi lainnya di lokasi sasaran? Siapa yang menjadi kelompok sasaran dari kebijakan / program /kegiatan terkait GESDI tersebut?
- Siapa kelompok masyarakat yang memiliki keistimewaan dari suatu kebijakan / program/ anggaran/ kegiatan, dan siapa kelompok marginal yang paling tertinggal akibat dari suatu kebijakan / program/ anggaran/ kegiatan.
- Bagaimana pola pembagian kerja yang ada pada masyarakat di lokasi sasaran tersebut? Apa yang dilakukan oleh perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas sehari-hari (peran, kegiatan, pekerjaan dan tanggung jawab di ranah domestik dan publik? (jenis kelamin, gender, disabilitas, umur, lokasi), kapan dan di mana?
- Siapa pengambil keputusan di ranah domestik dan publik? (jenis kelamin, gender, disabilitas, umur, lokasi).

- Siapa kelompok pemangku kepentingan yang berpengaruh yang dapat menghambat atau memajukan GEDSI?
- Apakah perempuan, laki-laki dan penyandang disabilitas memiliki hambatan / batasan secara sosial dan fisik, komunikasi, teknologi, infrastruktur, sarana dan prasarana lainnya, termasuk jalan dan transportasi publik untuk melakukan aktifitas sehari-hari dan mengakses layanan publik? Apa saja batasan-batasan tersebut? Bagaimana hambatan/batasan ini memengaruhi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya?
- Bagaimana perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya akan terdampak oleh program yang akan dilakukan?
- Apa kebutuhan praktis dan strategis kelompok marginal (perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas) yang perlu diakomodasi untuk mengatasi ketimpangan GEDSI?
- Apa dan bagaimana mengembangkan potensi dan kapasitas perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya agar menjadi agen perubahan dalam program yang akan dilakukan?



Alat 4: Mengidentifikasi dan Mengukur Norma Sosial

Norma sosial memiliki tiga elemen utama yaitu: (1) keyakinan seseorang tentang hal yang dilakukan oleh orang lain dan keyakinan seseorang tentang apa yang disetujui orang lain, di dalam (2) kelompok acuan, yang (3) dipertahankan baik disetujui atau tidak disetujui. Oleh karena itu, untuk mengukur norma sosial dan perubahannya, perlu mengkaji tiga elemen tersebut, yang biasanya dalam konteks perilaku-perilaku tertentu.⁴⁶

⁴⁶ Diadaptasi dari: Learning Collaborative to Advance Normative Change. 2019. Resources for Measuring Social Norms: A Practical Guide for Program Implementers. Washington, DC: Institute for Reproductive Health, (Belajar Kolaboratif untuk Memajukan Perubahan Normatif. 2019. Sumber Daya Pengukuran Norma Sosial: Panduan Praktis bagi Pelaksana Program. Washington, DC: Institut Kesehatan Reproduksi) Georgetown University; Mackie G, Moneti F, Shakya H, and Denny E (2015) What are Social Norms? How are They Measured? (Apa itu Norma Sosial? Bagaimana Mereka Diukur) UNICEF / University of California, San Diego, Center on Global Justice; Sood S, Stevens S, Kostizak K, Okumura M (2020) The ACT Framework Package: Measuring Social Norms around Female Genital Mutilation. (Paket Kerangka Kerja ACT: Mengukur Norma Sosial seputar Mutilasi Alat Kelamin Perempuan). UNICEF, UNFPA

Mengidentifikasi Norma Sosial

Identifikasi Perilaku yang Ingin Dipelajari

Langkah pertama adalah mengidentifikasi perilaku apa yang akan menjadi fokus kajian. Tetapkan perilaku khusus yang menjadi kunci darimasalah yang sedang dihadapi. Misalnya:

- Kepala sekolah melarang anak perempuan yang sudah menikah atau yang memiliki anak untuk bersekolah.
- Petugas kesehatan masyarakat menolak layanan kesehatan bagi kelompok minoritas HIV/AIDS.
- Aparat desa tidak mengizinkan penyandang disabilitas untuk mengikuti musyawarah desa.

Selain norma-norma sosial negatif, dapat juga diukur norma-norma sosial yang positif dan bermanfaat. Misalnya, laki-laki mengambil bagian yang lebih besar dari pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak; perlakuan yang sama terhadap kelompok minoritas; penolakan terhadap praktik berbahaya seperti perkawinan anak, dan KDRT.

Identifikasi Kelompok Acuan

Dalam teori norma sosial, orang termotivasi oleh keinginan untuk dapat menyesuaikan diri, atau mendapatkan persetujuan dan menghindari penolakan dari kelompok yang pendapatnya penting bagi mereka. Kelompok ini adalah kelompok acuan.

Ketika mengidentifikasi kelompok acuan akan sangat membantu jika difokuskan pada perilaku atau isu yang diminati, karena kelompok acuan seseorang akan berbeda untuk hal-hal yang berbeda. Pertanyaan kunci yang dapat digunakan adalah:

Sehubungan dengan perilaku atau isu ini [masukkan perilaku atau masalah] siapa yang penting bagi Anda, atau dengan siapa Anda membicarakan tentang perilaku atau isu ini?

Sebagai contoh, pertanyaan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

- Siapa yang memengaruhi keputusan Anda untuk mengizinkan anak perempuan tetap bersekolah? / Siapa yang memengaruhi keputusan Anda dalam menentukan kepada siapa anda memberikan layanan? / Siapa yang memengaruhi keputusan Anda dalam menentukan orang-orang yang dapat berpartisipasi dalam pertemuan desa?

Atau

- Reaksi dari siapa yang Anda khawatirkan apabila Anda mengizinkan anak perempuan yang hamil untuk tetap bersekolah? / Reaksi dari siapa yang Anda khawatirkan apabila Anda menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat minoritas gender-seksualitas? / Reaksi dari siapa yang Anda khawatirkan apabila Anda mengundang penyandang disabilitas untuk berbicara di pertemuan desa?

Jika Anda ingin memulai dengan hal-hal lebih umum dan terbuka, Anda bisa mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

- Terkait dengan pekerjaan/ anak / keluarga / dan peran Anda di masyarakat, siapa orang yang penting menurut Anda? Pendapat siapa yang penting menurut Anda?
- Kepada siapa Anda berkonsultasi atau meminta nasihat jika ingin berbicara tentang pekerjaan/ anak / keluarga / peran Anda di masyarakat? Siapa yang paling sering Anda dengarkan?

Dari sini, Anda dapat menggunakan teknik pemetaan sosial untuk mengidentifikasi anggota kelompok acuan yang paling berpengaruh, berdasarkan seberapa sering orang atau posisi tertentu teridentifikasi (misalnya pemuka agama, pejabat pemerintah, *influencer* di berbagai media sosial).

Mengidentifikasi Perilaku, Sikap dan Keyakinan tentang Orang Lain

Pendekatan norma sosial mencakup pertanyaan tentang keyakinan seseorang mengenai perilaku khusus orang lain, dan pertanyaan terkait dengan ekspektasi-ekspektasi orang-orang.

Tabel di bawah ini menyajikan struktur pertanyaan berbasis norma yang dapat digunakan untuk mengembangkan survei atau panduan pertanyaan. Contoh pertanyaan yang berkaitan dengan ini adalah:

Tabel 5 Matriks untuk Pertanyaan Berbasis Norma Sosial

Apa yang saya yakini tentang...	Diri sendiri	Apa yang saya pikirkan tentang orang lain	Apa yang orang lain pikirkan tentang saya
Perilaku yang dapat diamati dan diukur	1. Apa yang saya lakukan (perilaku)	3. Apa yang orang lain lakukan	5. Apa yang menurut orang lain saya lakukan
Persepsi dan asumsi	2. Apa yang menurut saya harus saya lakukan (sikap)	4. Apa yang menurut saya harus dilakukan orang lain	6. Menurut orang lain, apa yang harus saya lakukan

Pertama terkait dengan perilaku orang:

1. Apakah Anda melakukan (masukkan perilaku)?

- Ya, selalu
 Ya, jarang (kurang dari separuh waktu)
 Ya, sering (lebih dari separuh waktu)
 Tidak (tidak pernah)
 Ya, kadang-kadang (sekitar separuh waktu)

2. Apakah menurut Anda, Anda harus melakukan (masukkan perilaku)?

- Ya, selalu
 Ya, jarang (kurang dari separuh waktu)
 Ya, sering (lebih dari separuh waktu)
 Tidak (tidak pernah)
 Ya, kadang-kadang (sekitar separuh waktu)

Saat Anda menganalisis dua pertanyaan ini, Anda ingin melihat apakah tindakan orang selaras dengan sikap mereka sendiri – apakah mereka melakukan apa yang menurut mereka seharusnya mereka lakukan?

Misalnya, jika seseorang menjawab seperti ini:

Apakah Anda membuat komentar yang tidak pantas tentang orang-orang dari kelompok terpinggirkan / orang yang berbeda dengan Anda? | Ya, sering

Apakah menurut Anda Anda harus membuat komentar yang tidak pantas tentang orang-orang dari kelompok terpinggirkan / orang yang berbeda dengan Anda? | Tidak, mungkin tidak

Berarti mereka bertindak dengan cara yang bertentangan dengan keyakinan atau standar mereka sendiri, dan ada hal lain yang membuat mereka bertindak seperti itu, seperti norma sosial.

Tetapi jika mereka menjawab seperti ini:

Apakah Anda memperlakukan semua orang yang datang ke layanan ini dengan cara yang sama? | Ya, sering

Menurut Anda, apakah Anda harus memperlakukan semua orang yang datang ke layanan ini dengan cara yang sama? | Ya, harus

Berarti mereka umumnya bertindak sesuai dengan keyakinan mereka sendiri, dan perilaku mereka mungkin tidak terkait dengan norma sosial.

Untuk beberapa pertanyaan sensitif, seperti kekerasan dalam rumah tangga, Anda tidak akan memulai dengan pertanyaan 1, tetapi Anda dapat menanyakan pertanyaan kedua dengan cara yang lebih terbuka, misalnya, *'Apakah menurut Anda, Anda harus menerapkan disiplin fisik di rumah?'*

Pertanyaan selanjutnya menanyakan apa yang diamati tentang perilaku orang lain. Pertanyaan ini untuk mendapatkan gambaran tentang seberapa stabil suatu perilaku. Jika kebanyakan orang yang menjawab pertanyaan ini mengatakan bahwa semua atau lebih dari setengahnya melakukan perilaku ini, berarti perilaku tersebut sangat stabil.

3. Berapa banyak orang yang penting bagi Anda melakukan (masukkan perilaku)?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Ya, selalu | <input type="checkbox"/> Ya, jarang (kurang dari separuh waktu) |
| <input type="checkbox"/> Ya, sering (lebih dari separuh waktu) | <input type="checkbox"/> Tidak (tidak pernah) |
| <input type="checkbox"/> Ya, kadang-kadang (sekitar separuh waktu) | |

4. Apakah menurut Anda, orang-orang yang penting bagi Anda harus melakukan (masukkan perilaku)?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Ya, selalu | <input type="checkbox"/> Ya, jarang (kurang dari separuh waktu) |
| <input type="checkbox"/> Ya, sering (lebih dari separuh waktu) | <input type="checkbox"/> Tidak (tidak pernah) |
| <input type="checkbox"/> Ya, kadang-kadang (sekitar separuh waktu) | |

5. Apakah menurut Anda, orang-orang yang penting bagi Anda berpikir bahwa Anda (masukkan perilaku)?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Ya, selalu | <input type="checkbox"/> Ya, jarang (kurang dari separuh waktu) |
| <input type="checkbox"/> Ya, sering (lebih dari separuh waktu) | <input type="checkbox"/> Tidak (tidak pernah) |
| <input type="checkbox"/> Ya, kadang-kadang (sekitar separuh waktu) | |

6. Apakah menurut Anda, orang-orang yang penting bagi Anda berpikir bahwa Anda harus (atau Anda setuju untuk) (masukkan perilaku)?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Ya, selalu | <input type="checkbox"/> Ya, jarang (kurang dari separuh waktu) |
| <input type="checkbox"/> Ya, sering (lebih dari separuh waktu) | <input type="checkbox"/> Tidak (tidak pernah) |
| <input type="checkbox"/> Ya, kadang-kadang (sekitar separuh waktu) | |



Menggunakan contoh yang sama seperti sebelumnya, *Apakah Anda membuat komentar yang tidak pantas tentang orang-orang dari kelompok terpinggirkan / orang yang berbeda?* Seseorang menjawab dengan pola berikut:

Diri sendiri	Apa yang saya pikirkan tentang orang lain	Apa yang orang lain pikirkan tentang saya
1. Apakah Anda membuat komentar yang tidak pantas?	3. Berapa banyak orang lain membuat komentar tidak pantas?	5. Apakah mereka pikir Anda membuat komentar yang tidak pantas?
Ya, sering	Lebih dari setengahnya	Ya mungkin
2. Apakah menurut Anda, Anda harus membuat komentar yang tidak pantas?	4. Apakah menurut Anda, orang lain harus membuat komentar yang tidak pantas?	6. Apakah menurut Anda orang lain berpikir bahwa tidak apa-apa bagi Anda untuk membuat komentar yang tidak pantas?
Tidak, mungkin tidak	Tidak, mungkin tidak	Ya Pasti

Pada contoh ini, tampaknya orang tersebut membuat komentar yang tidak pantas tentang orang yang berbeda dengannya, meskipun dia tahu bahwa dia tidak boleh melakukannya dan juga menganggap orang lain tidak boleh melakukannya. Namun mereka melihat orang lain melakukannya, dan mereka mengira orang lain berpikir bahwa itu adalah perilaku yang dapat diterima, sehingga mereka melakukannya juga. Ini adalah contoh perilaku yang tampaknya didorong oleh norma sosial. Beberapa fitur penting di sini adalah bahwa orang lain melakukannya (pertanyaan 3), dan seseorang berpikir bahwa mereka juga diharapkan untuk melakukannya (pertanyaan 6).

Mengidentifikasi Sanksi

Tentu saja banyak orang melihat orang lain melakukan sesuatu dengan perasaan bahwa mereka diharapkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, dan mereka tidak melakukannya. Di sinilah peran sanksi, baik positif (imbalan) maupun negatif (hukuman) menjadi penting.

Oleh karena itu, bidang pertanyaan terakhir adalah untuk menanyakan apa yang orang pikirkan jika mereka melakukan / tidak bertindak sesuai dengan norma sosial. Misalnya, menurut Anda apa yang akan terjadi jika Anda tidak bergabung dengan kelompok dan membuat komentar yang tidak pantas tentang orang yang berbeda?

Atau Apa yang memotivasi Anda untuk membuat komentar yang tidak pantas tentang orang yang berbeda, padahal Anda berpikir bahwa Anda tidak boleh melakukan ini?

Dari sini Anda dapat melihat apa yang dikhawatirkan seseorang jika mereka tidak mematuhi norma, atau kalau tidak, bagaimana mereka merasa dihargai jika melakukannya. Ini juga membantu mengidentifikasi faktor-faktor apa yang dapat dimanipulasi untuk mengubah norma.

Mengukur Perubahan Norma

Untuk mengukur perubahan dalam norma sosial, cara paling sederhana adalah berfokus pada persepsi tentang apa yang dilakukan dan diharapkan orang lain dalam jangka waktu tertentu:

- Apakah ada bukti bahwa kelompok acuan kurang menyetujui perilaku/tindakan berbahaya (atau lebih menyetujui perilaku positif)?
- Apakah tindakan berbahaya dianggap kurang umum dalam kelompok? (Sebagian kecil melakukan perilaku tertentu atau melakukannya lebih jarang)
- Apakah perilaku positif dianggap lebih umum (atau lebih sering menyumbang)?
- Apakah persepsi orang tentang apa yang akan terjadi jika mereka mengikuti atau tidak mengikuti norma sosial yang diubah?

Alat 5: Mengidentifikasi dan Mengukur Norma Sosial

Indeks Norma Sosial Gender

Indeks Norma Sosial Gender (*Gender Social Norms Indeks/GSNI*) pertama kali diperkenalkan oleh UNDP dalam Laporan Pembangunan Manusia 2019, untuk mengungkapkan secara mendalam akar penyebab ketidaksetaraan gender yang menghambat kemajuan bagi perempuan dan anak perempuan berdasarkan pada keyakinan, bias, dan prasangka terkait dengan hak dan kemampuan perempuan dan laki-laki di berbagai bidang kehidupan.

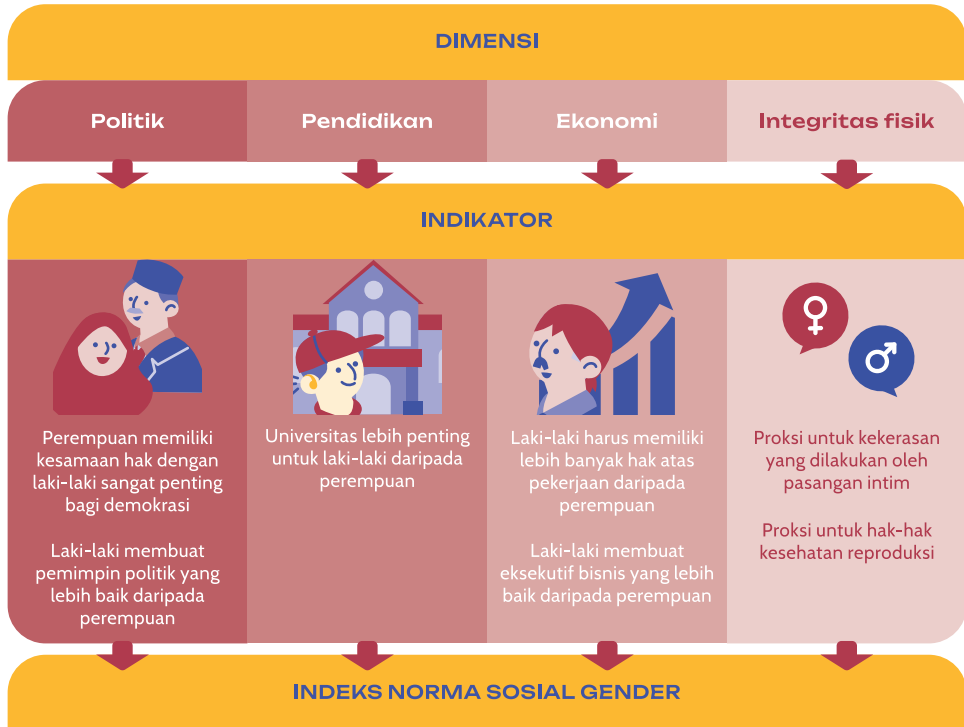
Dimensi dan Indikator Indeks Norma Sosial Gender

Terdapat empat dimensi dari indeks norma sosial gender (GSNI), yaitu: politik, pendidikan, ekonomi dan integritas fisik, yang dipakai untuk menilai bagaimana keyakinan yang bias dapat mendukung dan menghormati atau menghambat kesetaraan gender dan hak asasi manusia.⁴⁷ Setiap dimensi memiliki satu atau dua indikator tersendiri, total terdapat 7 indikator GSNI yang digunakan untuk memahami bidang-bidang di mana perempuan dan anak perempuan mengalami diskriminasi sistematis dan kerugian yang terus-menerus akibat dari norma sosial yang bias gender, yaitu⁴⁸:

1. **Dimensi politik:** memiliki dua indikator: 1) indikator untuk mengetahui apakah orang berpikir “perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki sangat penting untuk demokrasi”, yang digunakan untuk menilai keyakinan tentang partisipasi politik dasar; 2) indikator yang mengukur apakah orang berpikir “laki-laki membuat pemimpin politik yang lebih baik daripada perempuan, untuk menilai keyakinan tentang pencapaian dalam kekuasaan politik tingkat tinggi.
2. **Dimensi pendidikan:** memiliki satu indikator, yang mengukur apakah orang berpikir “universitas lebih penting bagi pria daripada wanita”, untuk menilai keyakinan tentang peluang untuk melanjutkan pendidikan tinggi (universitas).
3. **Dimensi ekonomi: memiliki dua indikator:** 1) indikator “laki-laki harus memiliki lebih banyak hak atas pekerjaan daripada perempuan” menilai keyakinan tentang partisipasi ekonomi; dan 2) indikator yang mengukur apakah orang berpikir “laki-laki membuat eksekutif bisnis yang lebih baik daripada perempuan”, untuk menilai keyakinan tentang peningkatan pemberdayaan ekonomi.
4. **Dimensi integritas fisik:** berfungsi sebagai proksi untuk mengukur 1) kekerasan yang dilakukan oleh pasangan intim; dan 2) hak-hak kesehatan reproduksi.

⁴⁷ United Nations Development Programme (2023). [2023 Gender Social Norms Index. Breaking Down Gender Biases Shifting Social Norms Towards Gender Equality.](#)

⁴⁸ Ibid

Gambar 6: Dimensi dan Indikator Indeks Norma Sosial Gender⁴⁹

Penilaian

GSNI dihitung dengan menggunakan data dari *World Values Survey (WVS)* yang menggunakan kuesioner untuk mengkaji nilai dan norma sosial, politik, ekonomi dan budaya, dan menyediakan *micro-data* yang memfasilitasi untuk mengkaji pergeseran nilai-nilai budaya, sikap dan keyakinan di seluruh negara dan dari waktu ke waktu berdasarkan tujuh indikator GSNI.

Setiap indikator memiliki nilai 1 artinya: seorang individu memiliki bias, nilai 0: tidak bias. Untuk indikator yang pilihan jawabannya adalah : Sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju, atau untuk pilhan jawabannya adalah : setuju, tidak setuju, atau tidak semuanya, jika orang tersebut memilih jawaban sangat setuju atau setuju, artinya orang tersebut memiliki bias. Misalnya untuk indikator dimensi pendidikan:” Universitas lebih penting untuk laki-laki daripada perempuan”, jika orang tersebut menjawab sangat setuju dan setuju, maka nilainya adalah 1, dan orang tersebut memiliki bias, sedangkan jika jawabannya adalah tidak setuju atau sangat tidak setuju, nilainya adalah 0, artinya tidak bias.

⁴⁹ Ibid

Tabel 6: Indeks Norma Sosial Gender dan Penilaian

Dimensi	Indikator (7)	Pilihan jawaban	Bias
Politik	Perempuan memiliki kesamaan hak dengan laki-laki sangat penting bagi demokrasi	0: bertentangan dengan demokrasi 1: tidak penting 10: penting	1: tidak pernah 10: selalu
	Pria menjadi pemimpin politik yang lebih baik daripada perempuan	Sangat setuju, Setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju	Sangat setuju dan setuju: Bias, nilai 1 Tidak setuju, Sangat tidak setuju: tidak bias, nilai 0
Pendidikan	Universitas lebih penting bagi laki-laki daripada perempuan	Sangat setuju, Setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju	Sangat setuju dan setuju: bias, nilai: 1. Tidak setuju, sangat tidak setuju: tidak bias, nilai : 0
	Laki-laki harus lebih berhak di bidang pekerjaan daripada perempuan	Setuju Tidak setuju Tidak semuanya	Setuju: bias, nilai : 1 Tidak setuju, tidak semuanya: tidak bias, nilai 0
Ekonomi	Laki-laki membuat bisnis eksekutif lebih baik dari perempuan.	Sangat setuju, Setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju	Sangat setuju dan setuju: bias , nilai 1 Tidak setuju, sangat tidak setuju: tidak bias, nilai 0
	Proksi untuk kekerasan oleh pasangan intim (Dibenarkan bagi laki-laki untuk memukuli istrinya)	1: tidak pernah 10: selalu	Jawaban 1: tidak bias, nilai 0 Jawaban 2-10: Bias, nilai 1
Integritas fisik	Proksi untuk hak-hak reproduksi (Aborsi tidak pernah dapat dibenarkan)	1: tidak pernah 10: selalu	Jawaban 1: bias, nilai 1 Jawaban 2-10: tidak bias, nilai 0

Alat 6: Contoh *Template* Teori Perubahan

<i>Input</i>	<i>Kegiatan / Proses</i>	<i>Output / Keluaran</i>	<i>Outcome / Hasil akhir</i>	<i>Tujuan akhir/ Goal</i>

Alat 7: Contoh *Template* Rencana Aksi GEDSI

Alat 8: Kriteria Menentukan Akomodasi yang Layak



Untuk membantu menentukan kelayakan suatu penyesuaian dalam konteks penyediaan akomodasi yang layak dapat menggunakan daftar pertanyaan pada tabel di bawah ini.

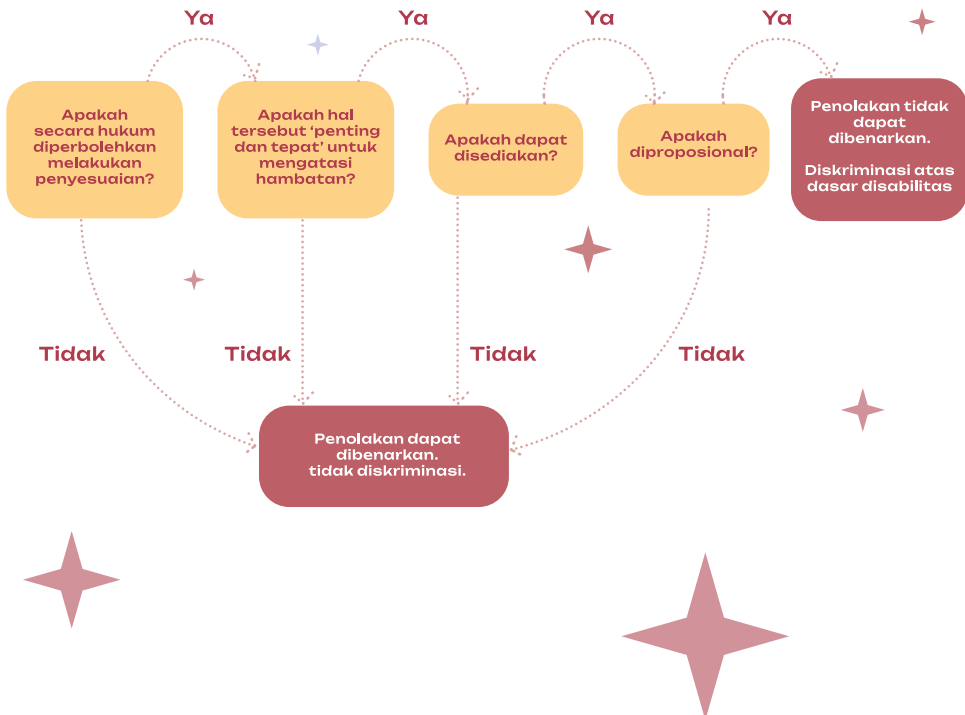
Tabel 7 Kriteria Penentuan Akomodasi yang Layak⁵⁰

Pertanyaan	Akomodasi diperlukan...
Apakah secara hukum diperbolehkan melakukan penyesuaian?	... diatur dalam undang-undang/peraturan (misalnya, <i>screen-reader software</i> , apakah secara hukum diperbolehkan?)
Apakah “penting dan tepat” untuk mengatasi hambatan?	... memungkinkan partisipasi dan akses - tidak lebih dari apa yang diperlukan untuk situasi tersebut ... dapat memenuhi kebutuhan pengguna, dan memungkinkan akses dan partisipasi (misalnya, menyediakan bidang miring/ <i>ramp</i> yang dapat dipindahkan agar penyandang disabilitas dapat mengakses ruangan)
Apakah dapat disediakan?	... tersedia dalam situasi tersebut? (misalnya pertemuan di negara XX, dibutuhkan juru bahasa isyarat Indonesia, tetapi juru bahasa isyarat Indonesia tidak tersedia)
Apakah proporsional? (tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional atau tidak semestinya)?	... secara finansial Pemegang tanggungjawab (<i>duty bearer</i>) memiliki kemampuan anggaran untuk menyediakannya. ... Penyediaan akomodasi layak tidak menempatkan pihak yang bertanggung jawab mengalami risiko kebangkrutan (misalnya perusahaan diharuskan untuk menyesuaikan kamar mandi untuk karyawan, namun kemampuan keuangan perusahaan tidak memungkinkan).

⁵⁰ Ibid

Jika pihak yang bertanggung jawab menyediakan akomodasi menjawab **YA** untuk semua pertanyaan pada tabel di atas, maka penolakan tidak dapat dibenarkan, dan jika terjadi penolakan terhadap penyediaan akomodasi yang layak maka hal ini merupakan diskriminasi berbasis disabilitas. Jika jawabannya adalah **TIDAK** untuk semua pertanyaan di atas, maka penolakan terhadap penyediaan akomodasi yang layak tersebut dapat dibenarkan dan bukan merupakan diskriminasi (lihat Gambar di bawah ini).

Gambar 7: Menentukan “Kelayakan” dalam Konteks Akomodasi yang Layak⁵¹



⁵¹ Diadopsi dari United Nations Human Rights Office of High Commissioner (2020).The Policy Guidelines for Inclusive Sustainable Development Goals. Foundations.



